

MEMBANGUN KEMBALI
DANAUTOBA

FOKUS, MENGAJAI PARIWISATA
DAN LADA

MEDIA BPP

J E N D E L A I N F O R M A S I K E L I T B A N G A N



QUO VADIS?
MASA DEPAN?
PENELITI ■



9 1772528 418001

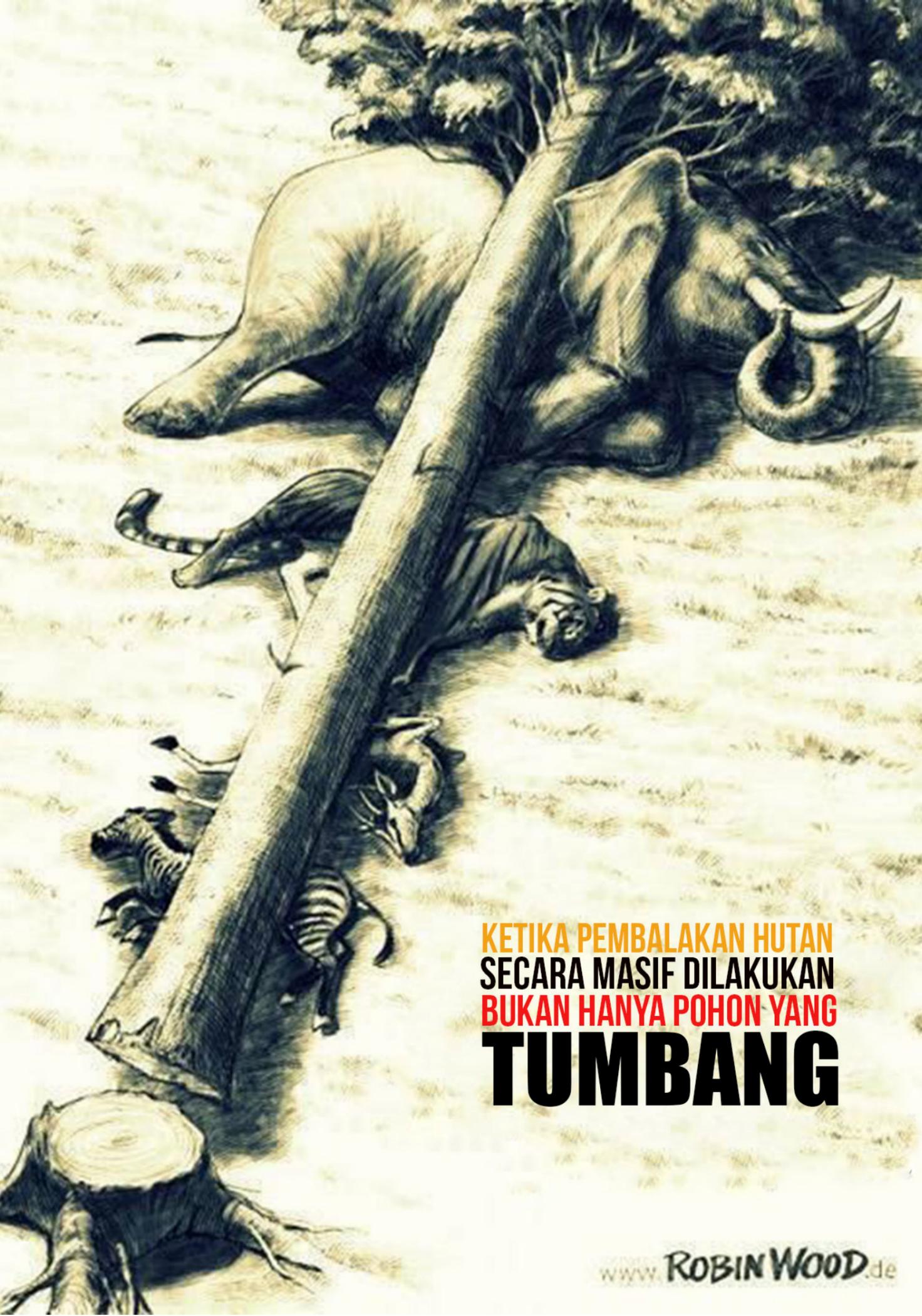
VOLUME 2 NO 6 | DESEMBER 2017

litbang.kemendagri.go.id

Majalah Dwi Bulanan

P-ISSN 2503 3352

E-ISSN 2528 4181



**KETIKA PEMBALAKAN HUTAN
SECARA MASIF DILAKUKAN
BUKAN HANYA POHON YANG
TUMBANG**

www.ROBINWOOD.de

SALAM REDAKSI

Lahirnya PP No 11 Tahun 2017 mengenai Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negera) melahirkan pasal baru yang dianggap diskriminatif bagi peneliti di kalangan Kementerian/Lembaga. Mereka dipaksa pensiun dari semula usia 65 Tahun menjadi 60 Tahun. Tidak hanya itu, beberapa pasal dianggap memberatkan peneliti sebagai salah satu abdi negara dalam dunia perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal, menjadi seorang peneliti bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Perlu *passion* tersendiri bagi mereka yang memang mencintai dunia riset, membaca, dan menulis. Maka tidak heran banyak di antara mereka yang protes, bahkan melayangkan gugatan ke MA (Mahkamah Agung) untuk dilakukan *judicial review*.

Mereka yang protes, menganggap keluarnya PP tersebut adalah salah satu cara untuk memangkas generasi tua dan menghadirkan beragam generasi baru melalui riset. Pemangkasan itu dianggap tidak adil bila membandingkan fenomena riset di Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju, yang didukung tunjangan besar, masa usia pensiun lebih lama, dan fasilitas penunjang lainnya.

Keributan itulah yang ingin kami hadirkan dalam suguhan berita pada Laporan Utama edisi Desember 2017. Diskusi dalam pemberitaan Laporan Utama itu menjadi menarik untuk dibaca agar peneliti di seluruh K/L khususnya Lembaga Litbang memahami aturan baru tersebut dan paham bagaimana peran penting peneliti dalam memajukan dunia sains negaranya.



Tidak hanya terkait PP tersebut, *Media BPP* juga menghadirkan beragam informasi yang tidak kalah menarik. Seperti pada rubrik BPP Daerah yang menceritakan jatuh bangun perjuangan mendirikan lembaga litbang yang membutuhkan banyak peneliti di daerahnya, ada juga laporan khusus yang membahas pengembangan destinasi pariwisata nasional yang digencarkan oleh Presiden Jokowi, dan beberapa rubrik internal lainnya, seperti rubrik Aktivitas, kegiatan dari seluruh Pusat Litbang BPP yang gencar melakukan kajian penelitian, juga agenda besar tiap-tiap Pusat Litbang dalam Program Prioritas Nasional seperti *Leadership Award* dan *Innovative Government Award*. Semuanya kami rangkum dalam Media akhir 2017. Semoga segenap pembaca dapat menikmatinya dan menjadi santapan diskusi bersama dan perkembangan ilmu pengetahuan di akhir tahun. Akhir kata, selamat membaca!

Redaksi..

MEDIA BPP

PELINDUNG MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO
PENANGGUNG JAWAB DODI RIYADMADJI

PEMIMPIN REDAKSI	LITA DEWI WULANTIKA
REDAKTUR PELAKSANA	MOH. ILHAM A. HAMUDY
REDAKTUR	KURNIASIH SYABNIKMAT NIZAM HORAS MAURITZ PANJAITAN SAFRIZAL LITA DEWI WULANTIKA MOH. ILHAM A. HAMUDY
PENYUNTING	I NENGAH RUMAWAN BUNGARAN DAMANIK FRISCA NATALIA ELPINO WINDY
PELIPUTAN	INDAH F. ROSALINA SAIDI RIFKY
PENATA LETAK DAN GRAFIS	SAIDI RIFKY

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

ALAMAT REDAKSI
JALAN KRAMAT RAYA NO. 132, JAKARTA PUSAT
MEDIABPPKEMENDAGRI@GMAIL.COM

Kurang Update

Saya sangat senang membaca Media BPP yang 2 tahun ini tampil dengan wajah baru, namun saran saya, sebaiknya Media BPP hendaknya dapat menyajikan isu-isu yang kekinian dan yang merepresentasikan nuansa Kemendagri baik lokal maupun secara nasional. Maksudnya isu-isu dimaksud dapat disajikan langkah-langkah antisipasinya sesuai dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) atau kacamata Kementerian Dalam Negeri, sehingga pembaca dapat mendapatkan pemahaman dan pencerahan yang segar dan *up to date*. Jangan menyajikannya bahan/isu yang sudah lewat/lama baru di sajikan belakangan.

- Zainal Arifin, Kabid Pengembangan Inovasi Daerah-

Sebelumnya kami ingin meluruskan terkait pemberitaan tentang Kemendagri, terhubung ini adalah Media BPP Kemendagri maka pemberitaannya adalah seputar BPP atau dunia riset dan pengembangan, bukan Kemendagri. Kalau berita Kemendagri ada lagi nama majalahnya, yakni Media Praja. Namun, ruang pemberitaan Kemendagri di kami, selalu kami kasih ruang sekira 20 persen, yang ada di rubrik Kilas Berita dan juga terkadang di rubrik Aktivitas. Lalu terkait masalah update, terhubung Media ini adalah dwi bulanan, jadi berita yang ada di dalamnya adalah kumpulan berita selama dua bulan. Kalau yang lebih update lagi bapak bisa melihatnya di situs kami, litbang.kemendagri.go.id/website untuk berita harian. Sekali lagi, kami segenap redaksi mengucapkan terima kasih banyak atas masukannya, semoga jawaban ini bisa menjawab pertanyaan bapak.

Redaksi

Beri Ruang Mereka yang Berkontribusi

Media BPP yang saya baca selama ini sudah baik, namun saran saya, Media BPP bisa lebih lengkap lagi apabila ada pejabat fungsional peneliti BPP Kemendagri yang ikut berkontribusi dan berkomentar terkait hasil kajian dan penelitian di lingkup BPP Kemendagri. Beri mereka juga ruang untuk berbicara dan jembatan antara pejabat struktural dan fungsional peneliti, agar sejalan dengan program yang ada, terimakasih.

- Nur Sabar, Kasubbid Potensi Daerah BPP Kemendagri -

Terkait pejabat sebenarnya kami tidak keberatan jika siapapun itu masuk dalam pemberitaan Media BPP, tentu

ini menjadi masukan yang berarti bagi kami, namun ketika naskah sudah berada di tangan pejabat Eselon II dan ada beberapa koreksi yang beberapa nama terpaksa harus dihapuskan, kami mohon maaf pak. Semoga dengan hadirnya pejabat baru yang hadir di BPP Kemendagri ini bisa jauh-jauh lebih baik dari pejabat sebelumnya, sehingga semua orang yang berkontribusi dalam kemajuan BPP, bisa turut serta namanya dalam pemberitaan Media BPP. Terima kasih.

Redaksi

Lambat Buka Website BPP Kemendagri

Saya salah satu pegawai di BPP Daerah. Sebagai peneliti, informasi kelitbangan tentu sangat penting. BPP melalui websitenya yang direformasi telah berhasil menyuguhkan informasi seputar dunia riset yang kekinian, meski kadang mengutip dari berbagai media lain, namun lebih akurat dan sangat menarik karena tampilan yang lebih moderat. BPP pun dalam hal informasi sekelas K/L berada di jalan yang benar. Namun informasi yang bagus tersebut tidak dibarengi dengan kemudahan aksesnya. Misalnya, untuk membuka website litbang.kemendagri.go.id/website kita harus menunggu hingga 10-20 detik, padahal untuk website yang terbilang baru dan website berita itu tidak perlu loading. Kedua, sangat disayangkan jika website BPP yang *eye catching* tersebut hanya menyuguhkan berita saja, akan lebih baik dibumbui dengan suguhan infografis, videografis dari hasil-hasil kajian atau hasil capaian kinerja setahun terakhir BPP Kemendagri. Tentu ini akan menarik minat tidak hanya kalangan internal, namun juga semua BPP yang ada di daerah.

-NN, Peneliti BPP Daerah-

Kami menyadari tentu informasi menjadi hal penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, akses informasi yang memudahkan dan menyenangkan menjadi pilihan utama ditengah banyaknya situs penyedia informasi yang lebih baik. Kami berharap saran saudara bisa segera diaplikasikan oleh pengelola website kami. Masukan anda sangat berharga bagi perkembangan dunia informasi tidak hanya untuk BPP Kemendagri, namun juga untuk website K/L lainnya. Kreativitas pengelola website sangat dibutuhkan ditengah gempuran informasi yang tidak berimbang. website-website K/L sudah selayaknya dikelola secara profesional, karena menyuguhkan informasi secara akurat. Dan sebaiknya juga menjadi rujukan informasi yang bisa dikutip oleh media-media lainnya.

Redaksi

MEDIA BPP

VOLUME 2 NO 6 | DESEMBER 2017

BPP DAERAH 32

BIDANG LITBANG PROVINSI BANGKA BELITUNG
FOKUS MENGAJAI LADA DAN PARIWISATA

LAPORAN KHUSUS 26

MENATA KEMBALI DANAU TOBA

Presiden Joko Widodo tengah menekankan pembangunan 10 destinasi pariwisata baru seiring dengan bergeliatnya sektor industri pariwisata di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung Presiden membentuk lembaga-lembaga yang diberikan tanggung jawab khusus mengembangkan pariwisata. Danau Toba, misalnya, Presiden membentuk Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) melalui Perpres No 49 Tahun 2016 untuk mempercepat pembangunan setelah 30 tahun mati suri.

AKTIVITAS 8

JENDELA BPP 12-15

KILAS BERITA 42-43

GAYA HIDUP 44

SAINS DAN
TEKNOLOGI 45

RESENSI FILM 46

RESENSI BUKU 48

KOMIK 49

SASTRA 50

OPINI

MENGHUKUM PERUSAK LINGKUNGAN 54

RPJMD DAN TOLOK UKUR KANDIDAT
PETAHANA 56

CATATAN

BAGI-BAGI JATAH PASCAPILKADA 58

DAERAH 36

BALI, PROYEKSI WISATA KELAS DUNIA

Beberapa waktu lalu, situs pariwisata dalam jaringan Tripadvisor menobatkan Bali sebagai daerah tujuan wisata terbaik dunia 2017, dan menduduki urutan pertama berdasarkan pilihan wisatawan mancanegara. Bali berada di urutan pertama sebagai destinasi terbaik dunia dari 25 tujuan wisata. Sementara urutan kedua dan seterusnya diraih London, Paris, Roma, dan New York City.

TOKOH 40

Bagi ISMAIL HASANI direktur riset setara institute, enjadi peneliti merupakan jalan istimewa bagi siapa saja yang ingin mengabdikan diri sepenuh hati pada ilmu pengetahuan. Sebuah riset yang baik tentu akan menghadirkan pengaruh yang baik di tengah masyarakat, terutama peneliti yang bekerja pada instansi pemerintahan. Jalan istimewa itulah yang semestinya dijalani dengan semaksimal mungkin, agar peneliti dapat menjadi roda penggerak bagi instansinya untuk menciptakan "Basic Policy Making" (pembuat dasar kebijakan).

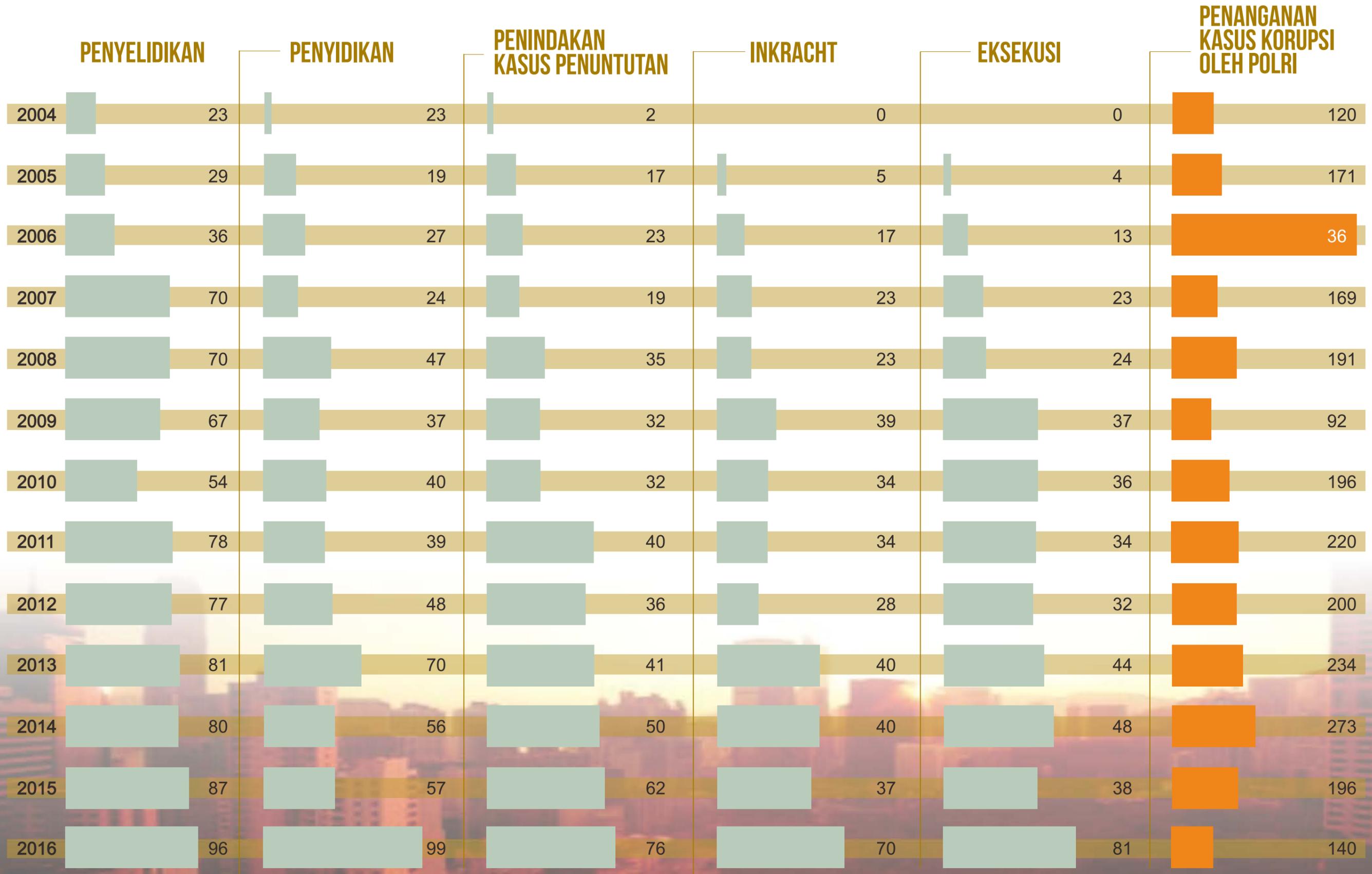
LAPORAN UTAMA 16-23

QUO VADIS MASA DEPAN PENELITI?

LAHIRNYA PP NO 11 TAHUN 2017 MENGENAI MANAJEMEN ASN (APARATUR SIPIL NEGERA) MENIMBULKAN BEBERAPA PASAL BARU YANG DIANGGAP DISKRIMINATIF BAGI PENELITI DI KALANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA. APAKAH ADA LANGKAH BIJAK DARI PEMERINTAH?



Penanganan Kasus Korupsi Oleh KPK



DODI RIYADMADJI: KEMENDAGRI DORONG TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA



JAKARTA - Tidak bisa dimungkiri, Indonesia kini menghadapi transformasi model bisnis dari arah konvensional ke era digital dan teknologi. Bayangkan saja, dengan populasi penduduk 262 juta, pengguna internet 132,7 juta, Indonesia tentu punya potensi besar di sektor ini. Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam konferensi Lintas Teknologi Solutions Day yang diadakan di Ritz Carlton Ballroom Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri Dodi Riyadmadji menjadi pembicara mewakili Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Gelaran yang mengusung tema "*Business Information Through Technology*" ini juga mengumpulkan para pakar untuk berdiskusi soal wacana perkembangan teknologi dan dampaknya pada kehidupan masyarakat.

Selain Dodi, hadir pula Muhamad Paisol Presiden Direktur PT Lintas Teknologi Indonesia, Dian Siswarini CEO XL Axiata, dan Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika.

Menurut Paisol, transformasi digital di negara ini bisa didorong dengan lima 'pilar' dari kategori yang berbeda, di antaranya meliputi infrastruktur atau standarisasi, legal, ekonomi, pembangunan, serta sosial dan budaya.

"Untuk memaksimalkan era digitalisasi berbasis teknologi ini, diperlukan konsistensi dan peran serta pemerintah dan masyarakat untuk mendukung, mengendalikan, dan mengembangkan teknologi inovasi agar bisa digunakan lebih optimal," ujarnya.

Selain Paisol, Dodi mengatakan, pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri berperan penting dalam mendorong pengembangan transformasi digital Indonesia di masa depan. Salah satu contoh hadirnya beberapa regulasi dalam mewujudkan *smart city* tersebut di antaranya UU No18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta Perber Menristek & Mendagri No 03 & 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDA.

Selain itu kata Dodi, Kemendagri juga mendorong upaya inovasi yang dilakukan pemda untuk mengembangkan konsep *smart city*. Seperti di beberapa daerah telah menggunakan *E-Budgeting* (sistem informasi pembiayaan pembangunan daerah), *E-Controlling/E-Monitoring* (sistem informasi pengawasan pembangunan daerah), *E-PR* (sistem pengadaan barang & jasa pemerintah), *E-Planning* (sistem informasi perencanaan pembangunan daerah), dan *E-Government* (sistem informasi pelayanan bagi masyarakat), semua itu dilakukan dalam rangka penerapan *smart governance*.

"Kota-kota di Indonesia banyak yang telah memanfaatkan teknologi *smart city* ini di antaranya Bandung, Surabaya, dan DKI Jakarta. Kota-kota ini telah sukses memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah dan layanan publik," ucapnya.

Adapun menurutnya masih ada beberapa faktor penghambat penerapan *smart city* di daerah seperti pembiayaan, regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Untuk itu ia menyarankan agar daerah bisa membuka diri dengan menggandeng investor untuk memfasilitasi terciptanya *smart city* di daerah. "Selain itu juga yang lebih penting adalah memberikan jaminan melalui regulasi-regulasi yang mendukung," tutupnya. (MSR)

BPP LAKUKAN RISET DESA ONLINE

JAKARTA - Sejak lahirnya UU Desa, seluruh desa di Indonesia banyak diberikan dana desa untuk kemajuan dan kemandirian masing-masing desa. Salah satu akses dan tingkat keberhasilan desa juga patut dipublikasikan dalam informasi yang mudah diakses. Baik itu diakses oleh masyarakat desa sendiri maupun pemerintah pusat.

Akses informasi itu biasanya terdapat dalam portal atau web desa yang didukung oleh SDM desa yang maju dan infrastruktur yang memumpuni. Oleh karena itu, demi terciptanya desa *online* melalui

informasi yang akuntabel, transparan melalui portal resmi perangkat desa, Puslitbang Adwil, Kependudukan, dan Pemerintahan Desa BPP Kemendagri telah melakukan kajian terkait pemetaan desa dan evaluasi pengawasan profil desa melalui web atau portal *online*.

Gunawan, ketua tim penelitian tersebut mengatakan, beberapa desa yang ditelitinya di Pulau Jawa memang sudah sebagian desa menghidupkan web atau portal *online* mengenai profil desa tersebut. "Beberapa desa yang sudah secara aktif dalam portalnya biasanya

RISET BPP: ANGGARAN PILKADA PERLU DIEVALUASI

JAKARTA - Temuan Puslitbang Pembangunan dan Keuda Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri menyatakan pembiayaan Pilkada serentak patut dievaluasi. Hal itu dipertegas oleh pernyataan Bahtiar Direktur Politik Kemendagri dalam acara diskusi publik model pembiayaan pilkada serentak yang efektif dan efisien, yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Jakarta.

"Temuan awal BPP ini akan memperkuat justifikasi kita ke depan. Menuju Pemilu 2024, harus ada peraturan yang terintegrasi antara Pilkada dan Pemilu secara nasional. Untuk itu, penelitian ini harus dibicarakan lebih lanjut dan dimasukkan dalam regulasi pemilu yang akan datang," ucapnya.

Bahtiar juga mengusulkan agar pendanaan Pilkada sebaiknya ditanggung oleh APBN. Pasalnya jika Pilkada masih didanai dari APBD, maka bisa dipastikan banyak pembangunan daerah terhambat gara-gara dananya harus ditarik untuk Pilkada.

"Kasihannya juga pemerintah, karena Pilkada Serentak, banyak proyek di Kaltim tidak dibayar, bupati mengeluh karena ada proyek yang sudah lelang karena ada Pilkada harus dialihkan, karena tiba-tiba ada slot anggaran yang begitu besar tidak direncanakan secara baik oleh pemda maupun pemerintah pusat. Untuk itu Kemendagri akan melakukan penataan. Pada masa yang akan datang akan kita kodifikasikan ke pemilihan antara nasional dan lokal terintegrasi dalam satu kitab UU," tuturnya.

Terkait dengan mahalannya anggaran Pilkada tersebut, Pramono Ubaid Tanthowi Komisioner KPU mengatakan tidak efisiennya anggaran Pilkada disebabkan oleh beberapa faktor seperti Pilkada hanya didesain untuk menyerentakkan daerah-daerah yang waktunya berdekatan, kemudian porsi anggaran Pilkada 40-50 persen untuk honor penyelenggara seperti PPK, PPS, KPPS, sementara selebihnya dipergunakan untuk operasional, bimtek, tahapan, sosialisasi, kampanye, logistik, dll.

"Kemudian kenapa mahal? Karena KPU saat ini harus menyusun anggaran dengan asumsi 5-6 Paslon (Pasangan Calon). Sementara Pilkada 2015 dan 2017 cenderung hanya

beragam, ada yang tampilannya sudah bagus, dengan profile lengkap dan foto, atau bahkan pelayanan masyarakat secara *online*, namun ada juga yang *mangkrak* hanya tampilan lama dan sederhana saja," terang Gunawan

Namun memang tidak jarang ada beberapa desa yang memang belum memiliki web/portal profil desa itu sendiri. Hal itulah yang disayangkan oleh narasumber yang hadir dalam memberikan masukan terhadap kajian yang dibawakan oleh Gunawan, dkk, Ivanovich Agusta menjelaskan

sebenarnya ada dana desa dan ADD yang sudah dibebankan untuk membuat portal berita. "Namun saya khawatir ada mekanisme yang salah. Selain itu apakah persoalan informasi ini benar-benar dibutuhkan oleh desa," tandasnya

Ivanovich juga mempertanyakan soal urgensi dari keberadaan web ini, apakah memang diperintahkan Pemerintah Pusat atau ikut dilombakan. "Kalau ingin meringkas profil desa yang mana. Lalu terkait kontinyu data pada portal desa, pernah muncul penyediaan dana



diikuti 2-4 Paslon. Selain itu sebagian biaya kampanye Paslon ditanggung KPU seperti alat peraga kampanye, bahan kampanye, debat kandidat di TV, iklan media cetak dan elektronik," tuturnya.

Di sisi lain, Shadiq Pasadigoe Staf Ahli Menteri PAN dan RB mengatakan, tidak efektifnya pembiayaan Pilkada disebabkan oleh regulasi yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah dalam jangka waktu yang sebentar. Alasan lainnya adalah tidak adanya pengawasan terhadap KPU, serta tidak adanya hasil audit dari hasil pelaksanaan pemilu.

"Tidak ada audit dari pemilu ke pemilu. Audit semestinya tidak hanya dilakukan dalam hal keuangan saja, namun juga perlu dalam hal kinerjanya apakah program yang dilakukan KPU ada kaitannya?" terangnya.

Shadiq juga menyarankan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, sebaiknya penyuluhan oleh KPU dilakukan di tingkat terendah seperti kecamatan, dari pada membuat program studi banding yang selama ini tidak terlalu bermanfaat. (MSR)

untuk profil desa melalui portal desa atau web. Sejak itu dari 2010 sampai 2013 portal desa jadi meningkat. Dari 3 persen sampai belasan persen," terangnya.

Menurut Ivanovich, salah satu desa yang menjadi kiblat terkait web desa adalah Kabupaten Solok. "Kabupaten itu sering menjadi narsum untuk profil desa di beberapa acara, dan mungkin kajian pemetaan desa *online* yang dilakukan litbang ke depannya bisa belajar dari Kab. Solok," tutupnya (IFR)

BPP SELENGGARAKAN BEDAH BUKU TATA KELOLA DESA



JAKARTA – Sejak diterbitkannya UU Desa No 6 tahun 2014 banyak sekali perubahan yang terjadi di desa. Perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik terus digencarkan oleh pemerintah dalam upaya penciptaan desa yang mandiri, berkembang dan menjawab cita-cita Nawacita Presiden Joko Widodo. Begitu pula dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang terus berupaya melakukan pembinaan aparatur desa agar aparatur memiliki kapasitas yang mumpuni dalam melakukan berbagai hal khususnya pengelolaan keuangan desa.

“Kami juga terus berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kemendes terkait pembangunan desa. Desa menjadi ujung tombak daerah. Banyak aparatur desa tidak paham tuntutan pemerintah harus ada bukti,” ucap Nata Irawan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, dalam acara Bedah buku Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa di Aula BPP Kemendagri, Jakarta.

Dalam acara tersebut juga, turut

hadir beberapa narasumber di antaranya Dodi Riyadmadji Plt. Kepala BPP Kemendagri, Ivanovich Agusta Pemerhati Perdesaan IPB, dan Akhmad Muqowam Ketua Komite I DPD RI.

Muqowam dalam acara tersebut membahas isi buku yang ditulis Nata Irawan tersebut. Ia juga mengapresiasi Nata Irawan, pasalnya di tengah-tengah kesibukannya sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, masih menyempatkan diri untuk menulis buku. “Saya apresiasi karena beliau telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikirannya guna menulis sebuah buku yang selain sesuai dengan tugas dan kewenangannya, buku yang ditulisnya memuat isu yang sangat strategis dalam dinamika masyarakat dan bangsa, paling tidak dalam lima tahun terakhir,” ucapnya.

Menurut Muqowam, Nata memandang UU Desa sebagai kebijakan yang positif, yang digolongkan sebagai kebijakan afirmatif dalam program pembangunan desa. Selain itu, UU desa juga dijadikan teori dalam

mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan desa dalam proses penyejahteraan masyarakat desa.

Selain Muqowam, Ivanovich Agusta juga mengatakan buku ini sebagai rekomendasi kajian ilmiah atas UU Desa. Selain itu juga bisa sebagai analisis studi lapangan yang sesuai dengan kondisi terkini.

Nata dalam bukunya mengatakan bahwa tata kelola desa era UU Desa menyodorkan sumbangan berharga untuk menjelaskan dengan detail efektivitas pemerintah desa dalam mengelola organisasinya, melayani masyarakat, dan menjaga deliberasi warga. Buku yang juga merupakan hasil kajian tesis-nya itu juga memberikan informasi bahwa kebijakan desa efektif lantaran dibubuhi transfer dana desa. Hal itulah yang dituliskan oleh Nata dalam menguatkan sumber daya finansial dan kapasitas pemerintah desa melalui dana desa yang melimpah ruah. (MSR)

KAJIAN BPP, E-REKAPITULASI BISA DILAKSANAKAN DI PEMILU 2019

JAKARTA - Lamanya waktu penghitungan suara di KPU kerap dianggap menjadi penyebab pemilu rawan dimanipulasi. Untuk itu, sudah saatnya *e-rekapitulasi* dilaksanakan dalam pemilu 2019 yang akan datang. Hal tersebut disampaikan oleh Kapuslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri Syabnikmat Nizam dalam acara Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan Politik Dalam Negeri Mengenai Penerapan E-Rekapitulasi untuk pemilu serentak 2019 di Aula BPP Kemendagri, Senin.

Menurut Syabnikmat, *e-rekapitulasi* dalam penghitungan suara terbukti memangkas waktu yang efektif dibanding dengan penghitungan suara manual yang membutuhkan waktu hingga satu bulan. Dengan *e-rekapitulasi* penghitungan hanya butuh waktu maksimal dua hari. “Dan itu sudah terbukti di Bogor dan Pekalongan. Selain lama, penghitungan suara manual juga kerap mendatangkan masalah, karena penghitungan suara di daerah menjadi berbeda dengan hasil hitungan suara di pusat,” ucapnya.

Menurut Andrari Grahitudaru Kepala Program Sistem Pemilu Elektronik Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), *e-rekapitulasi* bertujuan untuk menghasilkan pemilu yang lebih kredibel, bersih, transparan, murah, dan mudah.

“E-Rekapitulasi adalah cara penghitungan perolehan suara dengan cara teknologi informasi sehingga hasilnya saat itu juga bisa langsung sampai di pusat data, dalam hal ini KPU yang dikirim langsung dari TPS,” jelasnya ketika menjadi narasumber dalam acara tersebut.

Dengan *e-rekapitulasi* menurutnya ketika ada kesalahan rekap bisa diketahui, karena setiap tahapan ketika menggunakan teknologi informasi dapat di telusuri kesalahannya.



Terkait hal itu Plt. Kepala BPP Kemendagri mengungkapkan wacana penggunaan *e-rekapitulasi* perlu mendapat masukan dari berbagai pihak. Untuk itu, ia mengharapkan agar para peserta yang hadir dalam acara tersebut bisa memberikan saran.

“Saya berharap para peserta khususnya perwakilan dari partai politik bisa memberikan saran, karena pemilu menyangkut nasib 250 juta rakyat yang tidak boleh salah ketika menentukan

pemimpin,” ucapnya.

Secara pribadi Plt. BPP Kemendagri optimis jika *e-rekapitulasi* bisa terlaksana pada pemilu serentak 2019 akan memangkas biaya pilkada yang selama ini dianggap mahal yang diakibatkan dari honorarium ketika penghitungan suara. (MSR)

JAKARTA – Sejak dianggarkannya dana desa terutama sejak era Presiden Jokowi, masyarakat dan pemerintahan desa dituntut harus mandiri dan maju, bahkan memunyai tingkat PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang terus melonjak.

Di Desa Ponggok, Klaten, sejak dianggarkan dana oleh pemerintah pada 2015, kini Desa Ponggok sudah menjadi desa mandiri yang memiliki pendapatan dari pemanfaatan sumber daya alam hingga milyaran rupiah per tahunnya.

Keberhasilan Desa Ponggok ini pernah mendapat banyak pujian dari aparatur negara, seperti Menteri Keuangan yang mengatakan, Desa Ponggok telah berhasil keluar dari jurang kemiskinan dan menjadi desa mandiri berkat dukungan sumber

daya alam, dan sumber daya manusia setempatnya. Berangkat dari hal tersebut, Bidang Pemerintahan Desa Puslitbang Adwil, Kependudukan, dan Pemdes mengadakan penelitian di Desa Ponggok untuk mencari tahu kunci sukses kemandirian Desa Ponggok.

PONGGOK, JATENG JADI SALAH SATU DESA MANDIRI

Worry Mambusi salah satu peneliti yang menggarap penelitian tersebut mengatakan, Desa Ponggok dapat maju karena warga sekitar mampu melihat potensi wisata dari sebuah umbul (kolam). “Mereka mampu menyulap sebuah kolam yang dihiasnya sedemikian cantik dan menghasilkan pendapat

asli daerahnya yang maju dan berkembang,” kata Worry.

Namun, dalam hasil penelitian yang juga dihadiri oleh berapa narasumber itu, seperti Ivanovich Agusta (Praktisi IPB), dan Subiyono (Kepala Pusat Adwil) memberi beberapa masukan terhadap penelitian Worry agar jauh lebih baik lagi ke depan. Seperti Ivanovich mengatakan, ada 4 hal faktor PAD meningkat, seperti hasil asset, usaha, swadaya, dan lain-

lain. “*Nah*, fokus kajiannya kemana? Sebaiknya saran saya, harus dapat dilihat juga bagaimana faktor kepemimpinan, baik itu Pemerintah Jateng, maupun Kabupaten Klaten sendiri dalam mendukung kemajuan Desa Ponggok. Tapi secara menyeluruh sudah cukup baik penelitian ini,” sarannya. (IFR)

PUSAT LITBANG INOVASI DAERAH

LAKUKAN PENILAIAN IGA

Pusat Inovasi Daerah BPP Kemendagri telah melakukan sejumlah penilaian IGA (*Innovation Government Award*) 2017 terhadap Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Acara yang berlangsung selama satu minggu penuh itu, mulai dari 23-30 Oktober 2017 berjalan secara lancar dan penuh dengan suasana kompetitif antar daerah.

Hadir pada acara tersebut, Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam beberapa perwakilan yang berhasil lolos dalam seleksi berjenjang tim penilai IGA 2017. Untuk tingkat provinsi yang masuk dalam finalisasi IGA adalah Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur Jawa Barat. Sementara di tingkat Kabupaten ada dari Kabupaten Gresik, Sleman, dan Magelang, dan di tingkat Kota ada Kota Surabaya, Kota Bontang, Kota Bandung, dll yang masuk dalam kandidat.

Dalam sambutan Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji berpesan hadirnya IGA ini merupakan tuntutan daerah dalam era UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemda dituntut harus berinovasi dalam daerah otonomnya. "Inovasi yang dimaksud adalah pembaruan yang adapun ruang lingkupnya adalah semua inovasi yang berkaitan dengan kewenangan Pemda, seperti pelayanan publik yang sudah banyak memberikan kontribusi dan manfaat bagi warganya," kata Dodi dalam sambutan pembukaan penilai IGA 2017 di Hotel Acacia, Jakarta Pusat.

BPP Kemendagri selalu mengembangkan wadah dan fasilitasi bagi daerah dengan memberikan rangkaian kegiatan seperti sosialisasi PP Inovda, peninjauan data, verifikasi, dan penilaian pada Oktober/November. "Harapannya dengan IGA ini, mampu menghasilkan validasi data yang objektif sehingga ditetapkan sebagai pemenang dan menjadi motivasi bagi daerah lainnya," paparnya.

Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri Rochayati Basra

mengatakan beberapa kepala daerah bahkan menjelaskan secara detail bisnis proses dari inovasi teknologi tersebut, sehingga pada saat penilaian berlangsung tercipta suasana kompetitif dan semangat daerah dalam memenangkan IGA 2017 yang diselenggarakan oleh Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri itu. "Beberapa Kepala Daerah bahkan memaparkan secara rinci bisnis proses inovasi teknologi yang mereka buat. Sebut saja Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, misalnya, ia menampilkan tiga inovasi unggulannya seperti pengurusan perizinan Surabaya *Single Window* (SSW), Pusat Kendali (*Command Center*) dan *Government Resource Management Center* (GMRC)," tuturnya.

Selain Walikota Surabaya, Airin Rachmi Diany Walikota Tangerang Selatan juga turut memaparkan aplikasi unggulan seperti Aplikasi Praktek (Proses Balik Nama Otomatis) dan aplikasi Simppel (Sistem Penyampaian SPPT PBB Elektronik), "Beberapa inovasi yang berkaitan dengan teknologi adalah hasil kerja sama dengan BPPT, Puspitek, dan Universitas yang ada di Tangsel," ucap Airin yang turut hadir dalam penilaian tersebut.

Di Tingkat Provinsi, Jawa Barat mengusulkan beberapa inovasi teknologi informasi seperti E-SAMSAT, SIMPATIK JABAR (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu Untuk Publik Jawa Barat), dan si-Dadali Kawal SPJ, menurut Ahmad Heryawan Gubernur Jabar, inovasi tersebut selaras dengan misi Jawa Barat yang mengusung sistem pemerintahan modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Tidak kalah dengan isu teknologi, isu lingkungan juga menjadi tema menarik yang dibuat oleh kepala daerah inovatif di Indonesia. Seperti di Kota Magelang, Walikota Sigit Widyonindito membuat inovasi kampung organik. Upaya menghijaukan kota dengan ikut memeransertakan masyarakat sebagai penggerak.



Kampung Organik tersebut saat ini sudah diterapkan di 51 lokasi yang tersebar di Kota Magelang. "Kampung Organik ini memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepedulian warga dalam pengelolaan sampah. Konsep Kampung Organik ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kota Magelang pada tahun sebelumnya dan saat ini sudah diikuti oleh daerah-daerah lainnya," tegasnya.

Selain beberapa Kepala Daerah di atas masih banyak lagi Kepala Daerah di Indonesia yang turut mengusulkan inovasi di daerahnya dalam penilaian inovasi daerah. Adapun penghargaan akan diberikan kepada Pemerintah Daerah yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab dalam upaya peningkatan pelayanan publik, peningkatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Hasilnya akan diumumkan pada 11 Desember 2017 mendatang di Jakarta. Rochayati berharap para Kepala Daerah yang berhasil memenangkan penghargaan ini menjadi penyemangat untuk kinerja yang jauh lebih baik lagi dan menjadi replikasi bagi daerah yang masih tertinggal. "Tentu harapan kami dengan adanya IGA 2017, Kepala Daerah seluruh Indonesia dapat terpacu untuk bekerja lebih baik lagi dan berinovasi demi kepentingan masyarakat banyak," (MSR)

PUSAT LITBANG PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

MENCARI SOLUSI PEMBIAYAAN PILKADA EFEKTIF

Mahalnya anggaran Pilkada menjadi alasan Pilkada serentak dilaksanakan beberapa tahun terakhir. Namun, alih-alih menghemat anggaran, justru Pilkada serentak tidak lantas membuat anggaran hemat, nyatanya anggaran yang digunakan tidak jauh berbeda bahkan cenderung mahal dari Pilkada tidak serentak.

Hasil penelitian Perludem (Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi) menunjukkan pada 2015 sebanyak 269 daerah yang mengikuti Pilkada menghabiskan anggaran sebesar 7,8 triliun dengan rata-rata 70,9 miliar per daerah, dan tidak jauh berbeda pada 2016.

Di sisi lain, Pilkada serentak belum mampu dan belum cukup optimal membangun budaya demokrasi. Data menunjukkan terjadi penurunan indeks demokrasi dalam kurun waktu dua tahun. Hak-hak politik, misalnya, terjadi penurunan indeks dari 70,63% menjadi 70,61%, maraknya politisasi anggaran, dan masih banyak permasalahan lainnya, serta keberadaan KPU yang dianggap belum mampu merespons secara optimal terkait beberapa permasalahan tersebut.

Beberapa problematika di atas menjadi alasan Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri membuat sebuah kajian mengenai pembiayaan pilkada serentak yang efisien dan efektif, yang didiseminasikan pada Rabu-Kamis (2/11) dan Diskusi Publik Model Pembiayaan Pilkada yang Efisien dan Efektif di Hotel Mercure, Jakarta.

Pembangunan dan Keuda BPP Kemendagri menunjukkan adanya kesenjangan indeks biaya per pemilih pada masing-masing wilayah. Selain itu, penelitian juga menemukan adanya pengaruh petahana dalam pembiayaan pilkada. Menurut Plt. Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda Sastri Yunizarti Bakry, Pilkada serentak yang selama ini dicitacitakan menghemat anggaran, tidak lantas membuat pembiayaan efektif dan efisien. Beberapa faktor menjadi penyebabnya.

"Hasil kajian Tim kami ternyata dipengaruhi beberapa faktor seperti dari sisi regulasi, struktur, dan kultur yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas pembiayaan pilkada," ucapnya

Ketua KPU Arief Budiman menyebut memang pada banyak daerah terjadi pemotongan anggaran pilkada. Pilkada serentak terakhir menyebabkan terjadi penambahan tugas dan biaya. "Tidak hanya persoalan pengadaan barang besarnya, namun tidak menutup mata juga berasal dari honor dan pokja yang tidak sedikit," katanya, seraya mengatakan efisiensi dalam demokrasi memang keniscayaan.

Hal-hal semacam itulah yang kemudian ditangkap BPP Kemendagri. Dengan demikian bisa memetakan permasalahan yang timbul sebagai dampak pembiayaan yang berasal dari APBD dan APBN. Dari sana akan didapat model pembiayaan pilkada serentak yang lebih hemat.

Bahkan dari diskusi itu didapatkan masalah, yakni rata-rata dana yang diajukan untuk pelaksanaan Pilkada membengkak dibanding alokasi APBD

Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bahtiar menunjukkan terjadi peningkatan hibah dana Pilkada ber-NPDH (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari Rp 5 triliun pada 2017 meningkat sebesar Rp 15 triliun pada 2018. Adanya *trend* peningkatan dana Pilkada Serentak tersebut diprediksi memaksa negara harus menyiapkan sekira Rp 30 triliun pada Pemilu 2024 mendatang.

"Artinya kalau memang mau melakukan Pilkada serentak nasional pada 2024, maka kita harus siapkan uang sekira Rp 30 triliun, dengan standar dan parameter yang lebih jelas. Ketimbang yang seperti ini. Pada 2015 misalnya 269 daerah menghabiskan uang Rp7 triliun, begitu juga pada 2017 yang hanya 101 daerah, tapi uang habis Rp 5 triliun, apa ukurannya dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang kurang lebih sama," kata Bahtiar

Sebelumnya terkait dengan hal tersebut Arief mengatakan berbicara efisiensi dan efektivitas terkait Pilkada serentak, sama saja dengan mimpi. Menurutnya perlu ditinjau ulang filosofi bangsa ini memilih Pilkada sebagai cara regenerasi kepemimpinan.

"Pilkada tidak diciptakan dan tidak dipilih untuk menghasilkan efektivitas dan efisiensi, kalau mau efektif dan efisien, maka negara itu tidak akan memilih demokrasi sebagai regenerasi kepemimpinannya. Dia akan pilih monarki. Efektif dan efisien akan selalu berhubungan dengan penghematan waktu dan uang. Anda lihat kita selenggarakan Pilkada 10 bulan, Pemilu 2 tahun. Jadi, bicara efisiensi dan efektivitas rasa-rasanya hanya mimpi," ucapnya

"Selama ini problem dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu berulang. KPU berinisiatif untuk mendesain pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan. Sistem ini akan menghemat anggaran sekira Rp 600-900 miliar," tuturnya.

Selain pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU juga telah melakukan pengadanan logistik secara *online*, "KPU memperkenalkan e-katalog. Contohnya surat suara Pilkada Banten, anggaran Rp 700/lembar, harga kemudian menjadi Rp 78/lembar. Surat suara Pilgub DKI Putaran I, anggaran Rp 1.275 menjadi Rp 100. Putaran II anggaran Rp 750 menjadi Rp 78,1. Langkah selanjutnya adalah KPU secara bertahap akan menerapkan e-rekapitulasi, dan ini memotong waktu rekapitulasi kurang lebih 1 bulan," tutupnya. (MSR)



Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda Sastri Yunizarti Bakry

Pusat Litbang Adwil, Pemdes, dan Kependudukan

PERTANYAKAN PERAN BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejatinya merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi perwakilan pemerintahan desa berdasarkan representasi wilayah dan ditetapkan secara demokratis, sekaligus lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara.

Gaek Guguak, Koto Baru, Totiyo, dan Gentan.

Dalam riset tersebut, penilaian berupa adakah aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RPJMDes, musyawarah BPD, musyawarah desa, koordinasi dengan Pemdes, Pembahasan Peraturan Desa, dan Kesepakatan Perdes bersama Kades. Dari beberapa penelitian tersebut, masih banyak desa yang belum optimal menjalankan hal tersebut.

Selain itu faktor regulasi pun turut meliputi, seperti Pemda belum meniadakan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, baik dalam bentuk Perda ataupun Perbup tentang BPD, aturan tidak mudah diterapkan di lapangan, yang membuat aturan belum pernah menyampaikan filosofi aturan, sosialisasi kepada BPD belum ada sehingga menafsirkan sendiri-sendiri, tidak ada pasal yang mengatur boleh atau tidak BPD/BMN melihat SPJ (tidak ada pasal yang melarang/membolehkan), masih dijumpai dalam UU dan peraturan turunannya yang bahasanya samar-samar, sehingga timbul konflik, pengaturan pengisian jabatan perangkat desa yang bebas dari dinasti keluarga Kades

Dari hasil penelitian tersebut, Asrori dkk menyarankan perlu ada pengkajian & revisi Permendagri No 110 Tahun 2016 terkait pasal yang mengatur fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kades yang dianggap masih multi tafsir seperti ketegasan pasal yang mengatur BPD boleh/tidak melihat SPJ.

“Perlu juga mengkaji & merevisi Permendagri yang mengatur pengisian jabatan perangkat desa bebas dari dinasti keluarga kades. Kemendagri atau Dirjen Bina juga perlu mengeluarkan Surat Edaran mengenai Pemerintahan Desa terkait dengan percepatan masing-masing daerah Kab/Kota untuk segera menerbitkan Perda/Perbup/Perwali,” tutupnya. (IFR)



Namun di beberapa daerah masih ada beberapa fungsi dan peran BPD yang belum optimal. Untuk itu, Bidang Pemerintahan Desa, Pusat Litbang Administrasi Wilayah, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan melakukan riset dan kajian terhadap peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Riset tersebut dilakukan di beberapa desa, seperti Kertajaya, Kraja, Koto Gaek, Koto

Faktor penyebab adalah disharmonisasi anggota BPD dan Kepala Desa sebagai akibat ego kepentingan. “Lemahnya pemahaman BPD terhadap tugas dan fungsi sebagai akibat kurangnya BinteK dan sosialisasi, lemahnya tingkat kepercayaan BPD terhadap Kades, sebagai akibat dari Pemerintah Desa kurang kooperatif dan kurang transparan,” kata Asrori, peneliti BPP Kemendagri

Pusat Litbang Otda, Politik, dan PUM

ORMAS ASING PERLU PENGAWASAN

Pengawasan terhadap ormas asing yang ada di Indonesia penting dilakukan oleh pemerintah, pasalnya selama ini ormas asing yang beraktivitas di Indonesia kerap dianggap menyebarkan ideologi yang berisiko terhadap infiltrasi paham yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, peraturan pemerintah juga dianggap memberikan keleluasaan ruang lingkup aktivitas ormas asing sehingga dikhawatirkan melakukan upaya melanggar kedaulatan negara. Hal tersebut dikemukakan oleh Catur Wibowo Budi Santoso Peneliti Pusat Litbang Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, dalam acara Seminar Kajian Strategis Urgensi Pengawasan Ormas Asing dalam Rangka Menjaga Ketahanan Nasional, di Aula BPP Kemendagri.

Menurut Catur, pengawasan semakin penting ketika banyaknya aliran dana yang dibawa dari negara asal ormas tersebut ke Indonesia. Selain itu, keberadaan ormas asing di daerah semakin mengkhawatirkan ketika beberapa ormas tidak melaporkan keberadaan dan aktivitasnya kepada pemerintah daerah, namun hanya melaporkan kepada lembaga yang menjadi mitra ormas tersebut seperti Kemeterian/Lembaga tertentu.

“Pada kerangka lain, sejauh ini belum ada data yang menunjukkan jumlah

keberadaan ormas asing yang akurat di daerah. Hingga Agustus 2017 saja, menurut data dari Ditjen Poltik, dan PUM Kemendagri terdapat 332.495 ormas yang pendaftarannya tersebar di beberapa instansi. Dari jumlah tersebut, 374 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, di provinsi sebanyak 7.427 ormas dan kabupaten/kota sebanyak 15.433 organisasi, 83 ormas di Kementerian Luar Negeri, dan 309.178 terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, ketika ke lokasi penelitian di daerah tertentu tidak tepat datanya, masih simpang siur,” tutur Catur.

Dalam acara tersebut hadir pula Direktur Ormas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri La Ode Ahmad, dan beberapa peserta dari berbagai instansi seperti Kementerian Luar Negeri dan beberapa perwakilan ormas asing. Laode mengatakan selama ini pengawasan yang dilakukan Kemendagri terhadap ormas asing intens dilakukan, bahkan pemantauannya sangat ketat, dan sudah diatur dalam Permendagri No 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah, yang diawali dari verifikasi ormas hingga penetapan terhadap rencana kegiatan ormas tersebut.

“Itu sudah ada di Pasal 19, yang diawali dengan verifikasi kelengkapan kesahihan dokumen, kemudian melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan, dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan imigrasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan/penindakan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Senada dengan La Ode, Yuniar Irawati Kaseksi Wilayah II Dirjen Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri mengatakan banyaknya ormas di Indonesia dikarenakan adanya

peluang yang besar serta kemudahan dalam membentuk ormas. Namun, kemudahan itu menjadikan tidak semua ormas yang terdaftar berkualitas dikarenakan tidak adanya kejelasan tujuan ormas.

Irawati dalam kesempatan tersebut juga menyoroti hasil penelitian yang dilakukan Tim Puslitbang Otda, Politik, dan PUM. Menurutnya perlu validitas data yang disajikan agar tidak terkesan asal-asalan. Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi monitoring Tim POA (Pengawas Orang Asing) secara rutin dan lebih terfokus yang dituturkan Catur. Ia menyarankan rekomendasi tersebut harus jelas, karena individu sebagai orang asing dan ormas asing dua hal yang berbeda. “Ini juga agar tidak membingungkan di kemudian hari,” katanya.

Ormas asing semakin diperketat setelah adanya ormas asing yang terlibat pelanggaran hukum beberapa tahun lalu. Ormas tersebut tidak mendaftarkan diri di Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, menerima dana judi dan lotere asing, serta menyalahi izin peruntukkan bangunan. Hal ini kemudian membuat Tim khusus perancang undang-undang organisasi masyarakat DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas LSM asing.

Pada sesi yang lain dari pertemuan ini, Kepala Puslitbang Otda, Politik, dan PUM BPP Kemendagri Syabnikmat Nizam mengatakan, seminar kajian strategis tersebut diharapkan mendapat masukan yang berarti untuk bahan rekomendasi ke Mendagri, lebih jauh bisa menentukan apa saja yang perlu diatur dalam keberadaan ormas asing yang ada di Indonesia.

“Sehingga bisa ditentukan ormas asing yang mana yang di bawah pengawasan Kemendagri, Kemenlu, dan Kemenkum dan HAM,” ujarnya. (MSR)



MATRA 132

132

LAPORAN UTAMA

QUO VADIS MASA DEPAN PENELITI?

LAHIRNYA PP NO 11 TAHUN 2017 MENGENAI MANAJEMEN ASN (APARATUR SIPIL NEGERA) MENIMBULKAN BEBERAPA PASAL BARU YANG DIANGGAP DISKRIMINATIF BAGI PENELITI DI KALANGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA. MEREKA DIPAKSA PENSIUN DARI SEMULA USIA 65 TAHUN MENJADI 60 TAHUN. TIDAK TERIMA DENGAN HASIL REGULASI, MEREKA MENGGUGAT KE MA (MAHKAMAH AGUNG) UNTUK JUDICIAL REVIEW. LANTAS BAGAIMANA SEBENARNYA ISI DARI PP TENTANG MANAJEMEN ASN TERSEBUT? DAN APAKAH ADA LANGKAH BIJAK DARI PEMERINTAH?

Dipaksa Pensiun



Menjadi seorang peneliti bukan pekerjaan mudah. Perlu *passion* tersendiri bagi mereka yang memang mencintai dunia riset, membaca, dan menulis. Untuk itu, beberapa era kepresidenan Indonesia mencoba mengangkat derajat peneliti sebagai profesi yang istimewa. Tujuannya tidak lain adalah agar peneliti Indonesia bisa berkarya dengan optimal dan tidak gampang pindah ke luar negeri.

Tunjangan peneliti disebut-sebut paling tinggi di antara ASN (Aparatur Sipil Negara) lainnya. Menurut Perpres No 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti, peneliti Utama bisa mendapatkan tunjangan sebesar Rp 5,2 juta, Peneliti Madya Rp 3 juta, angka itu masih sangat jauh bila dibandingkan dengan Perancang Per-UU-an Utama dan Madya yang masih di angka Rp 1,4 dan Rp 1,2 juta.

Tidak hanya soal tunjangan, usia masa pensiun peneliti juga dianggap paling lama dibandingkan dengan ASN lainnya, yakni 65 Tahun, lebih lama 5 Tahun dari ASN yang hanya 60 Tahun. Bisa kebayang bukan betapa nikmatnya menjadi peneliti di Indonesia?

Beberapa fasilitas dan jalan keistimewaan itu dianggap sebagian orang wajar. Pasalnya, secara kuantitas jumlah peneliti di Indonesia juga masih sangat terbatas, apalagi masalah kualitas. Menurut Wendy Zulfikar, salah seorang Peneliti Madya dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) Kemenristek Dikti, jumlah peneliti di Indonesia baru sekira 89 orang per satu juta penduduk. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara tetangga.

“Sebut saja Jepang, dari jumlahnya mereka memunyai 6.000 peneliti per sejuta jiwa dengan kualitas yang ada, mereka mampu menjadikan riset sebagai negara maju di Asia,” terangnya.

Tentu tidak adil bila membandingkan fenomena riset di Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju, tapi beragam upaya juga sudah diusahakan oleh pemerintah, agar orang-orang tertarik menjadi peneliti, baik melalui tunjangan besar, masa usia pensiun peneliti, dan juga membuka jalur umum bagi pejabat struktural ke Jabatan Fungsional Peneliti melalui *inpassing* berdasarkan Perka LIPI No 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam Jabatan Fungsional Penelitian Melalui Penyesuaian (*Inpassing*).

Selain meningkatkan secara kuantitas, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas peneliti Indonesia, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan baru yakni PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Namun beberapa kebijakan yang baru dikeluarkan per 7 April 2017 itu menimbulkan beberapa kegaduhan, yakni terkait masa usia pensiun peneliti yang disunat.

Perubahan masa usia pensiun Jabatan Fungsional Peneliti dalam PP tersebut adalah memotong usia pensiun Peneliti Pertama & Muda dari 60 Tahun menjadi 58 Tahun, Peneliti Madya dari 65 Tahun menjadi 60, dan Peneliti Utama tetap di usia 65 Tahun. Artinya per PP ini dikeluarkan, yakni 7 April 2017, peneliti yang masih dalam jenjang dan usia mendekati masa pensiun yang ditetapkan terpaksa harus pensiun.

Misalnya Peneliti A ini merupakan Peneliti Madya, usianya pada 8 April menginjak 60 Tahun, tapi selama dia berprofesi sebagai JFP (Jabatan Fungsional Peneliti) dia tidak mampu meningkatkan kualitas diri ke jenjang yang lebih tinggi sebagai Peneliti Utama, maka ia terpaksa harus pensiun di usia 60 Tahun kurang sehari, karena masa tenggang waktunya jatuh pada 7 April sejak PP itu disahkan. Begitu pula dengan peneliti Pertama dan Muda.

Tentu ini membuat sebagian besar peneliti bergeming, pasalnya aturan ini disebut sebagai regulasi yang mendadak tanpa mempertimbangkan berbagai aspek seperti jumlah peneliti yang menjelang pensiun, dan tenggang waktu yang begitu singkat untuk meningkatkan kualitasnya ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa peneliti bahkan menganggap ini adalah upaya pemotongan generasi peneliti. Bahkan menurut Wendy, ini bukan hanya pemotongan generasi saja, tapi juga upaya pembodohan bangsa.

“Tidak hanya soal pemotongan generasi, saya kira ini sudah pembodohan bangsa. Secara kuantitas saja kita masih saja kurang, apalagi dipotong dan dipaksa pensiun begitu,” paparnya.

Selaku salah satu peneliti yang bakal terkena imbasnya itu, Wendy yang

juga anggota Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia) itu mengatakan, peneliti Madya yang terpaksa pensiun menjelang usia 60 Tahun ada sekira 556 orang. “Bisa dibayangkan *kan*, jumlah peneliti kita saja hanya 89 orang per sejuta orang, apalagi dikurangi lagi dengan upaya pemangkas,” jelasnya.

Padahal banyak sekali rencana jangka panjang yang sudah direncanakan mayoritas Peneliti Madya seperti Wendy. “Kalau di usia 60 Tahun saya dan teman-teman sudah pensiun, lalu 5 Tahun ini dari mana kami harus melanjutkan segala kebutuhan seperti cicilan rumah, mobil, dan lain-lain itu,” tuturnya.

Hal itu dibenarkan oleh Dwi Eni Djoko Setyono Kapusbindiklat LIPI yang dihubungi Media BPP beberapa pekan lalu. Menurutnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi atau yang biasa dikenal dengan KemenPAN RB itu sebaiknya memberitahukan isi dari PP tersebut minimal 15 bulan sebelum peneliti pensiun. “Karena syarat mengajukan pensiun itu minimal satu tahun sebelumnya sudah melakukan pengajuan. Jadi PP ini tidak pas, ada orang yang dipaksa pensiun,” terang Djoko.

Untuk itu, Himpenindo mencoba melayangkan gugatan ke MA untuk dilakukan *judicial review*. Dalam proses pengajuan gugatan itu, Wendy lah salah satu orang yang mengurus pemberkasan ke MA dan yang mencari dukungan ke berbagai pihak. Salah satu dukungan yang berhasil dia dapat adalah dari LIPI, Komisi ASN, dan Himpenindo. “Yang jelas, LIPI sudah menyatakan keberatannya terhadap pasal yang bermasalah itu,” ujarnya.

Kalau ada 3 lembaga besar yang menyatakan tidak setuju, seharusnya BKN (Badan Kepegawaian Nasional) yang berada

di bawah naungan KemenPAN RB sebaiknya mempertimbangkan gugatan keberatan tersebut. “Bukan malah keukeh pada regulasi yang diskriminatif demikian,” kata Wendy.

Tidak hanya di LIPI atau Kementerian/Lembaga. Di BPP (Badan Penelitian dan Pengembangan) Kemendagri juga bernasib sama. Ada 68 peneliti di BPP, dan ada sekira 6 orang Peneliti Madya yang usianya menjelang pensiun. Yang lebih parah, sebagian dari mereka tidak tahu atau tidak menggubris regulasi baru tersebut. Maka siap-siaplah bagi mereka yang memasuki usia 60 Tahun sebelum 7 April mereka akan dirumahkan atau dipensiunkan. “Itulah yang ingin kita sosialisasikan ke mereka, kalau sekarang aturannya begini *lho*,” ungkap Rachman Kosasih, Kepala Sub Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional BPP Kemendagri.

Selain di BPP Kemendagri, nasib lain juga akan dialami oleh Kuncoro Budy Prayitno yang pernah melayangkan surat pembaca di SKH (Surat Kabar Harian) Kompas pada 20 November lalu. Kuncoro yang juga Peneliti Madya dari BPPT itu mengatakan, ia dan kawan-kawannya seolah dipaksa pensiun dengan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. “Mengapa PP No 11 Tahun 2017 diberlakukan pada kami yang sudah menduduki lama menduduki JFP Madya. Bukankah biasanya peraturan diberlakukan bagi yang belum atau akan mengajukan jabatan fungsional tertentu,” tukasnya.

Pada suratnya itu Kuncoro hanya bisa berharap kebijaksanaan dari Presiden dan Wakilnya untuk meninjau kembali PP tersebut dan mempertimbangkan revisi Pasal 354 sesuai PP No 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencakup skema pemberhentian PNS, termasuk batas usia pensiun tersebut.

Pada Pasal 240 PP No 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil mengatakan, adapun PNS yang telah mencapai Batas Usia Pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai sebagaimana yang dimaksud yaitu: a. 58 (lima puluh delapan) Tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat

fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan; b. 60 (enam puluh) Tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan c. 65 (enam puluh lima) Tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama. “Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF (Jabatan Fungsional) yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Tentu ini seperti ada tumpang tindih regulasi juga, dan nasib kami di ambang batas tak tentu,” terangnya seraya pasrah.

Tidak dilibatkan

Rachman, Djoko, dan Wendy juga mengaku sama sekali tidak mengetahui tentang rencana pembentukan PP tersebut. Padahal seharusnya, orang-orang yang terkena imbasnya langsung semestinya dikenal *draft*-nya atau paling tidak dilibatkan dalam seminar *draft* tersebut sebelum ketok palu. “Kami juga tidak tahu yang jelas kenapa PP tersebut bisa dilahirkan, yang pasti kami tahu-tahu sudah diberikan itu dan kami tidak terima, akhirnya kami mengajukan gugatan, dan sudah di MA dengan nomor gugatan 60 P/HUM/2017, kita mengajukan dari 9 Oktober lalu, namun belum ada kabar selanjutnya,” terang Wendy.

Wendy berharap gugatan yang dia layangkan mendapat tanggapan positif dari KemenPAN RB, meskipun di dalam 364 pasal, namun hanya beberapa pasal saja yang dianggap keberatan. “*Ya* meski hanya sekian persen, tapi justru ini yang fatal bagi kemajuan bangsa ke depan. Kalau secara kualitas saja kita masih kurang, bagaimana dengan kuantitas yang juga dikurangi. Bisa-bisa mereka yang masih bertahan di negeri ini pindah ke negeri tetangga karena lebih dihargai dan diberikan fasilitas dan tunjangan yang lebih memadai,” tutupnya.

Sayangnya, saat *Media BPP* hendak konfirmasi Bambang Soepijanto Staf Khusus Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, KemenPAN RB hingga berita ini diturunkan, dirinya belum berhasil ditemukan. “Maaf saya tidak bisa bertemu,” tuturnya. (IFR)



REGULASI RANCU TERKAIT PENELITI

Selain Pasal 354 yang berhasil menyunat usia pensiun peneliti, lahirnya PP No 11 Tahun 2017 ini juga membuat beragam kebijakan berbeda dan dianggap 'berbeda' oleh sebagian peneliti. Seolah tugasnya sudah begitu berat, namun peneliti masih mendapatkan tekanan dan tuntutan yang lebih dan lebih lagi bila dibandingkan dengan fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah secara ala kadarnya.

Pertengahan November lalu, Media BPP mendatangi Rachman Kosasih dan Aji Nurcahyo, dua orang yang bekerja mengurus kesejahteraan dan nasib peneliti di BPP Kemendagri. Rachman dan Aji membagikan informasi yang lengkap pada kami terkait pasal-pasal baru dan beubah dari PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) ini yang sebelumnya bernama PP No 21 Tahun 2014 tentang hal yang sama.

Kebijakan pemerintah melalui KemenPAN RB merevisi PP tersebut memang mengatur segala jabatan ASN, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, termasuk peneliti di seluruh Kementerian/Lembaga. Meski hanya beberapa pasal yang mengatur mengenai JFP (Jabatan Fungsional Peneliti) dari sekira 364 pasal yang ada dalam PP tersebut, namun pasal tersebut cukup membuat ketidaknyamanan JFP di tengah tidur panjang penelitian dan pengembangan Indonesia.

Hilangnya istilah bebas sementara

Seperti pada Pasal 94 dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN menyebutkan PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional apabila: a. mengundurkan diri dari Jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Lalu pada Ayat (2) kembali dijelaskan: PNS yang diberhentikan dari JF karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan Jabatan.

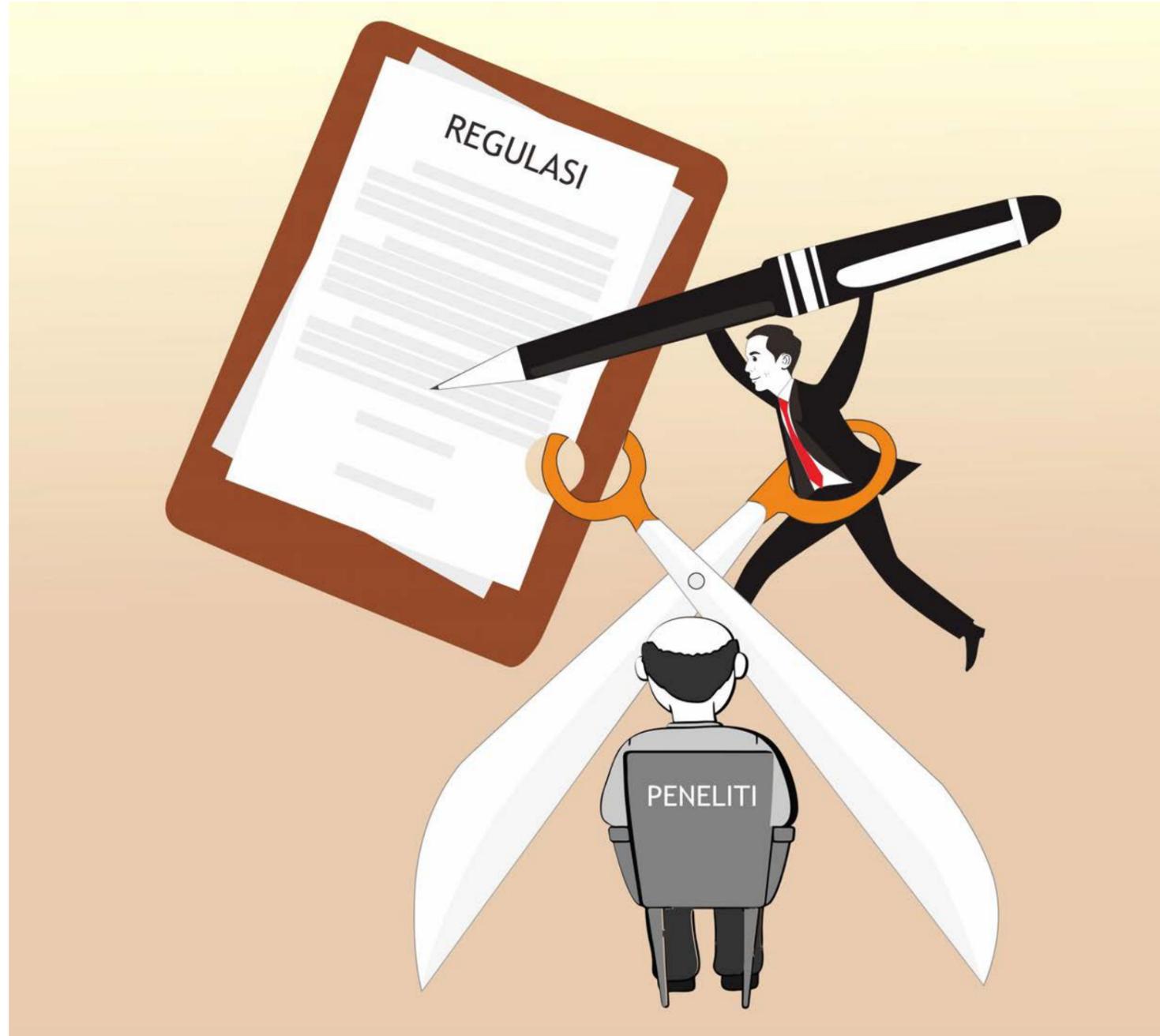
Artinya menurut Rachman, tidak ada lagi istilah "Bebas Sementara" bagi peneliti yang selama 5 Tahun + 1 tidak mengajukan angka kredit. "Kalau dulu ada istilah BS (Bebas Sementara), misalnya peneliti itu sedang belajar ke luar negeri, atau dia tidak produktif dalam waktu 5 Tahun + 1, maka dia bisa diberhentikan sementara, dengan catatan dikasih tenggang waktu +1 Tahun itu untuk mengajukan angka kreditnya, itu tertuang dalam PP No 21 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN sebelum direvisi menjadi PP No 11 Tahun 2017 tentang hal yang sama," imbuhnya.

Perubahan pasal tersebut juga mengartikan, tidak ada lagi istilah BS, dan bagi peneliti yang memang tercantum dalam point (b) diberhentikan sementara, (c) menjalani cuti di luar tanggungan negara, (e) ditugaskan secara penuh di luar JF, dan (f) tidak memenuhi persyaratan, maka mereka langsung diberhentikan, kecuali memang tersedia lowongan jabatan sejenis bidangnya di tempat lain. "Tapi kalau yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, biasanya dikasih toleransi untuk bergabung di lembaga yang sama. Kalau seperti yang lain, biasanya banyak orang yang mengalkalinya terpaksa *non job* atau ditaruh

di struktural sementara, baru setelah beberapa tahun dimasukkan lagi menjadi peneliti," paparnya.

Lebih aneh lagi, PP ini juga memunyai turunan, yakni Perka LIPI No 2 Tahun 2014 tentang Juknis Jabatan Sementara, dalam Perka LIPI tersebut masih memakai istilah BS. "Inilah yang kita bingung, ada dua aturan yang berbeda, mereka juga sedang mengajukan gugatan ke MA terkait PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN itu," terang Aji.

Namun, saat *Media BPP* mengonfirmasi hal tersebut kepada Dwi Eni Djoko Setyono Kapusbindiklat LIPI, pihaknya memang sedang menggodok rencana revisi Perka tersebut berkaitan dengan PP No 11 Tahun 2017 yang tengah dilakukan *judi-*



cial review. "Kami sedang menunggu keputusan dari MA, semoga ada titik cerah, dari situ juga kita bisa merevisi Perka LIPI, tentu kami berharap regulasi itu sejalan dengan induknya," terangnya.

Rangkap jabatan

Selain masalah BS, ada pasal yang dianggap Rachman dan Aji rancu dengan PP sebelumnya, yakni terkait rangkap jabatan peneliti. Pada Pasal 98 PP tersebut berbunyi: Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, pejabat fungsional dilarang rangkap jabatan dengan JA atau JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan

kompetensi dan bidang tugas JF.

Namun pada penjelasan PP tersebut dijelaskan, kata "kecuali" juga ditafsirkan seperti jabatan Jaksa, Perancang UU, dan Diplomat. "*Nah*, kalau kita masih mau mengembalikan, kata 'seperti' ini juga multitafsir, bisa juga peneliti masuk di dalamnya," kata Rachman.

Lalu saat *Media BPP* kembali konfirmasi kepada Djoko, KemenPAN RB sudah menjelaskan, bahwa kata 'seperti' dalam penjelasan itu berarti memang hanya 3 profesi tersebut, tidak ada yang lainnya termasuk peneliti. "Tidak ada, sudah pasti kecuali hanya 3 profesi tersebut, di LIPI memang masih ada beberapa peneliti yang rangkap jabatan di struktural,

tapi kami mulai tahun depan sudah harus menegaskan, peneliti yang rangkap jabatan mau memilih Jabatan Fungsional atau Jabatan Struktural," tandasnya.

Saat disinggung lebih banyak memilih mana peneliti LIPI yang selama ini merangkap jabatan, dengan malu-malu, Djoko menjawab "Lebih banyak yang memilih struktural," selorohnya.

Pilihan melepas Jabatan Fungsional Peneliti, diyakini Bambang sebagai salah satu jalan yang terpaksa mereka ambil, karena keterbatasan SDM Struktural. "Ya seperti Ketua LIPI kita, dia seorang peneliti juga struktural, semua yang lahir di sini itu berangkat dari peneliti. Tapi tenaga struktural kurang, dan secara tunjangan dan gaji tidak jauh beda, kerjanya mungkin lebih nyaman, jadi kebanyakan memilih menjadi pejabat struktural. Dilematis memang," imbuhnya.

Wajib organisasi

Pada PP tersebut juga dijelaskan bahwa peneliti wajib memunyai organisasi profesi untuk memudahkan koordinasi dan penguatan SDM. Dalam Pasal 101 ayat (1) menjelaskan, Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF.

Sebenarnya pada pasal ini tidak ada yang masalah setiap peneliti memunyai organisasi, karena notabeneanya sudah banyak peneliti yang memunyai organisasi sesuai dengan kepakarannya. Namun, lahirnya PP tersebut, LIPI kemudian menetapkan aturan bahwa organisasi yang dimaksud adalah Himpenindo (Himpunan Peneliti Indonesia) sebagai organisasi yang utama. "LIPI langsung menyebut Himpenindo, tapi Himpenindo awalnya tidak mau takut tidak independen, tapi saya dengar belakangan mereka sudah saling sepakat," kata Rachman.

Hal itu dibenarkan oleh Djoko, dirinya mengatakan bahwa sah-sah saja kalau peneliti mau bergabung ke Himpenindo kalau memang sudah memunyai organisasi. "Kita selalu terbuka untuk siapa saja," imbuhnya. (IFR)

DITUNTUT KERJA EKSTRA

Lahirnya PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara) juga menelurkan regulasi di bawahnya yang dirancang oleh LIPI seperti Pedoman Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional Peneliti yang dibuat LIPI, pedoman tersebut mensyaratkan beragam persyaratan yang berat bagi pejabat struktural yang ingin menjadi peneliti atau peneliti yang ingin naik tingkat. Seolah tugasnya sudah begitu berat, namun peneliti masih harus dituntut untuk lebih dan lebih lagi dalam berkarya.

L IPI mengeluarkan pedoman bagi formasi Jabatan Fungsional Peneliti di Kementerian/Lembaga. Aturan ini memang hanya berupa pedoman, tapi berkaitan erat dengan rencana 'dipaksa pensiun' pada Pasal 354 PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN. Pasalnya, Peneliti Madya yang usia pensiunnya mendekati usia 60 Tahun, per tanggal 7 April terpaksa harus pensiun lebih muda 5 Tahun dari aturan sebelumnya, yakni 65 Tahun. *Nah*, untuk mengajukan ke jenjang berikutnya ada persyaratan yang tidak mudah yang harus ditempuh oleh Peneliti Madya K/L agar terhindar dari zona pensiun dan memasuki zona nyaman sebagai Peneliti Utama.

Hal itu dituturkan oleh Rachman Kosasih dan Aji Nurcahyo, selaku Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional BPP Kemendagri. Mereka mengatakan, bagi Peneliti Madya yang ingin selamat dari masa pensiun lebih dulu, harus mengikuti standar LIPI selaku pembina peneliti di K/L.

"LIPI membuat IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) yang merupakan alat ukur pencapaian *output*/kinerja kegiatan. Dalam pencapaian *output* tersebut diperlukan sumber daya

yang mumpuni dan tidak lepas dari pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi," terang Aji.

IKK lanjutnya merupakan target tahunan yang diturunkan dari Indikator Kinerja Program yang acuan utamanya adalah Rencana Strategis Instansi. "LIPI telah membuat 15 butir kegiatan hasil kerja Lembaga Litbang yang butir-butir tersebut dinilai sebagian peneliti kami memberatkan," timpal Rachman.

Butir kegiatan hasil kerja litbang itu seperti menjadi pemakalah di pertemuan ilmiah terindeks global, menjadi pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi, KTI (Karya Tulis Ilmiah) diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, KTI diterbitkan di *proceeding* ilmiah terindeks global dan nasional, menciptakan buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit eksternal, dan ma-



sih banyak lainnya.

"Bayangkan untuk persyaratan seperti itu harus ditunjang dari segi si penelitinya, sementara Peneliti Madya di sini juga tergopoh-gopoh dengan dipaksa pensiun, pastilah sulit mengatur demikian," tandas Aji.

Memang, beberapa persyaratan itu berdasarkan klasifikasi dari jenjang penelitinya. Untuk yang bertaraf global atau internasional ini berlaku pada peneliti Madya dan Utama, sedangkan persyaratan untuk KTI nasional hanya berlaku pada peneliti muda dan pertama. "Tapi coba kita lihat, berapa banyak peneliti di K/L yang menembus jurnal internasional? Bisa dihitung jari, memang standar yang dibakukan LIPI bagus, tapi tidak sesuai dengan kapasitas SDM yang ada," papar Rachman.

Butir-butir persyaratan itu dianggap memberatkan oleh Rachman dan

Aji, mengingat waktu yang terbatas dan kesediaan peneliti yang juga sibuk meneliti program kerja sesuai dengan arahan Pejabat Eselon II dan terkadang permintaan Menteri terkait juga. Untuk itu, Rachman dan Aji mengakalinya dengan mencoba berkonsolidasi dengan Pejabat Eselon II selaku pimpinan Pusat Litbang dan mengajak peneliti untuk mengadakan semacam program khusus agar peneliti dapat memenuhi persyaratan KTI internasional. "Rencana kami demikian," imbuhnya.

Bagi Rachman dan Aji tidak adil rasanya apabila LIPI menyamaratakan kemampuannya dengan K/L yang banyak pekerjaan lain, bahkan lebih banyak strukturalnya dari pada penelitinya. "Bagaimana *ya*, susah juga kalau harus menyamakan standar LIPI dengan kapasitas peneliti di sini yang masih begitu-begitu saja," tutur Aji pesimis.

Namun saat dikonfirmasi ke LIPI, Dwi Eni Djoko Setyono Kapusbindiklat LIPI mengatakan, benar LIPI membuat aturan tersebut, terutama untuk jenjang peneliti yang berbeda-beda.

"Kalau untuk peneliti muda dan pertama itu sebenarnya cukup 1 kontributor utama saja, kalau untuk peneliti madya itu memang harus sudah *go internasional* namun sebenarnya tidak harus jadi kontributor utama, kontributor pendukung saja juga bisa, yang penting internasional. Kecuali kalau peneliti utama, dia memang harus jadi kontributor utama KTI internasional," jelasnya.

Tidak hanya terkait masalah kenaikan pangkat peneliti, syarat ini juga rupanya berlaku bagi mereka yang dari jalur umum (struktural) ke jalur peneliti, syaratnya kurang lebih sama dengan persyaratan kenaikan pangkat. Hal ini dikatakan Djoko sebagai wujud pembentukan kualitas peneliti yang jauh lebih baik lagi. "*Oh iya* pasti, mereka yang *inpassing* tidak bisa sembarangan menjadi peneliti, kasihan peneliti yang sudah merintis dari nol. Jadi memang pekerjaan peneliti ini tunjangannya paling besar, tapi pekerjaannya tidak bisa diremehkan, harus ada *passion* dan karakter dari dirinya, minimal suka membaca, menulis, dan mengamati banyak hal," tutupnya. (IFR)





Warga Zimbabwe merayakan kemenangan setelah Presiden Robert Mugabe mengundurkan diri. Mugabe berkuasa selama 37 tahun untuk Zimbabwe. Foto oleh REUTERS/Mike Hutchings

LAPORAN KHUSUS

Membangun Kembali Danau Toba

Presiden Joko Widodo tengah menekankan pembangunan 10 destinasi pariwisata baru seiring dengan bergeliatnya sektor industri pariwisata di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung Presiden membentuk lembaga-lembaga yang diberikan tanggung jawab khusus mengembangkan pariwisata. Danau Toba, misalnya, Presiden membentuk Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) melalui Perpres No 49 Tahun 2016 untuk mempercepat pembangunan setelah 30 tahun mati suri. Setahun dibentuk, lalu bagaimana kiprah BOPDT dan seperti apa BOPDT mengejawantahkan keinginan Presiden Joko Widodo dalam rangka mempercepat pembangunan Danau Toba?

Senja menghantarkan peralihan dari alam jaga ke alam tidur. Titik-titik cahaya di bibir danau mulai tampak ketika matahari yang mengiringi hendak bersemayam di peraduannya. Bersama para pelancong lain yang hendak menyebrang ke Samosir, *Media BPP* tiba di Parapat, Sumatera Utara tepat pukul 6.30 malam. Istirahat sejenak sebelum kendaraan yang ditumpangi bergegas ke tujuan selanjutnya.

Setelah bertemu dengan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT), *Media BPP* bermaksud mengunjungi Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) untuk memastikan pembangunan yang tengah berlangsung di sana. BOPDT sendiri adalah lembaga khusus yang dibentuk pemerintah secara resmi untuk mengoordinasikan kelangsungan pembangunan kawasan Danau Toba, dan memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Dari Medan menuju Kabupaten Tobasa, *Media BPP* mengambil akses jalan darat menggunakan jasa *travel* dengan waktu tempuh sekira 7 jam melintasi berbagai daerah yang melingkari Danau toba seperti Pematang Siantar, Seibudolok, Parapat, dan Ajibata.

Danau Toba menjadi salah satu danau terbesar di Asia Tenggara dan melebihi luas Singapura. Kawasan Danau Toba terus berkembang menjadi primadona wisatawan setelah ditetapkan menjadi destinasi pariwisata prioritas nasional oleh Presiden Joko Widodo. Keindahan alam Toba seolah menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diharapkan pengembangan kawasan Danau Toba bisa menggaet wisatawan untuk mengerumuni pulau seluas 1.130 kilometer tersebut.

Presiden juga menekankan pembangunan 9 destinasi pariwisata nasional lainnya di Indonesia seperti Belitung di Babel, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di DKI Jakarta, Candi Borobudur di Jateng, Gunung Bromo di Jatim, Mandalika Lombok di NTB, Pulau Komodo di NTT, Taman Nasional Wakatobi di Sulawesi Tenggara, dan Morotai di Maluku Utara.

Industri pariwisata kian menjanjikan dan tengah diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar. Pada 2019 pemerintah menargetkan USD 24 miliar melalui sektor ini. Pariwisata Danau Toba pun ditargetkan menjadi yang terbaik di kawasan regional

bahkan melampaui ASEAN. Alasan pemerintah cukup masuk akal, pasalnya pada 2019, industri pariwisata menempati peringkat empat di bawah minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit. Data dari Kementerian Pariwisata menunjukkan industri pariwisata terus tumbuh sejak 2014 dan ditargetkan menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia.

Pengembangan kawasan Danau Toba

Untuk mengembangkan kawasan Danau Toba, Pada 2016 pemerintah membentuk BOPDT, pembentukan diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo atas kekhawatirannya terhadap Danau Toba yang tak kunjung berkem-

bang, padahal memiliki segala potensi keindahan alam.

Media BPP beberapa waktu lalu menemui M. Tata Ridwanullah Direktur Destinasi Pariwisata BOPDT di Kementerian Pariwisata, Jakarta. Tata mengatakan Presiden Joko Widodo tengah memproyeksikan kawasan Danau Toba menjadi destinasi *super volcano geopark* kelas dunia dengan target kunjungan satu juta wisatawan mancanegara dan mampu meraup devisa hingga Rp 16 triliun, 300 ribu kesempatan kerja, 1 juta wisatawan mancanegara, dan 5 juta wisatawan lokal pada 2019. Target tersebut cukup rasional jika melihat *trend* pariwisata Indonesia yang terus menanjak setiap tahun. “Hal itu

juga diperkuat oleh keberadaan BOPDT untuk meningkatkan konektivitas dan penguatan lembaga,” ucap Tata.

Semangat membangun kawasan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat membuat BOPDT menunjukkan dampak yang signifikan selama setahun dibentuk. Sempat mendapat kekhawatiran akan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga yang mengurus wisata lainnya, di 7 kabupaten yang mengitari Danau Toba, BOPDT ternyata mendapat sambutan yang cukup baik di masyarakat. Tata mengklaim dibentuknya BOPDT memberikan kesempatan bagi Danau Toba untuk maju dan berkembang, setelah tertidur selama 30 tahun. “Selama 30 tahun mati suri, Danau Toba



dengan segala potensi keindahannya dibiarkan, tidak ada yang memasar-kan,” tuturnya.

Sebagai lembaga yang mendapat kepercayaan penuh terhadap Danau Toba, BOPDT memiliki fungsi koordina-tif dan memastikan semua jadwal pembangunan yang dirancang pemer-intah bisa berjalan sesuai rencana. BOPDT juga bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pem-bangunan, dan pengendalian di Ka-wasan Pariwisata Danau Toba.

“BOPDT memonitor dan memastikan jadwal pembangunan mereka (Ke-menterian/Lembaga) di Danau Toba berjalan sesuai rencana, kita cek ada problem apa. Kalau misal lahan, ayo ke mana kita selesaikan. Kita meng-undang rapat mereka dan mengi-nisiasai, kita minta laporan mereka. Kami menanyakan progres pemban-gunannya bagaimana, apakah lebih lambat atau lebih cepat. Itu tugas kita,” ucapnya.

Keseriusan pemerintah mengem-bangkan kawasan Danau Toba dit-unjukkan dengan pembangunan infrastruktur penunjang demi kenya-manan wisatawan. Sebagai penyum-bang devisa terbesar, tentu sektor pariwisata tidak bisa dibiarkan apa adanya. Untuk menjadikan kawasan pariwisata berkelas dunia membu-tuhkan pemikiran dan sumber daya yang tidak murah.

Keseriusan pemerintah dalam meng-enjot infrastruktur di bidang pari-wisata terlihat dari pembangunan yang dilakukan setahun terakhir. Melalui koordinasi BOPDT sebagai contoh pemerintah melakukan pe-ningkatan desain dan kualitas Band-a-ra Silangit yang beberapa waktu di-resmikan oleh Presiden Joko Widodo. “Silangit pun tiga bulan kami *endorse* baru Pak Menteri mau *ngurusin*. Kami juga beri jaminan ke Pak Menhub, akan ada penerbangan internasional. Kalau dulu dia kerja sendiri, dia *gak* peduli apakah ada wisatawan asing dan lokal. Di sinilah fungsi kami,” ucap Tata.

Selain pembangunan bandara, pe-merintah juga melakukan perbaikan di tiga dermaga utama dan mem-bangun satu dermaga baru, pemba-ngunan galangan kapal dan penye-diaan kapal *ferry*, pelebaran jalan

lingkar Samosir, revitalisasi kinerja pelayanan angkutan kereta api Me-dan-Siantar, pengoperasian jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, pembangunan Bandara Sibisa, dan pembangunan rel dan pengoperasian kereta api Siantar-Parapat.

Peningkatan kualitas infrastruktur menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai kunci pengembangan pariwisata. Infrastruktur juga akan mening-katkan daya saing Indonesia, yang pada akhirnya bakal menekan biaya ekonomi yang tinggi. sebagai contoh menurut Tata, dibangunnya jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi akan mempercepat akses dari Medan – Parapat yang semula harus ditem-puh selama 6 jam perjalanan menjadi 3 jam saja. Infrastruktur adalah pe-nyokong utama sektor pariwisata di negara mana pun.

Menurut rencana, kawasan Danau Toba akan dikembangkan layaknya Bali yang memiliki berbagai pilihan destinasi. Banyak pilihan ketika wisa-ta ke Bali, pengunjung tidak hanya disuguhkan wisata pantai dan alam, namun lengkap dengan wisata me-wah. Tak ayal Bali menjadi favorit para selebritas dan pemimpin du-nia. Begitu juga dengan Danau Toba yang akan dikembangkan tidak ha-nya suguhan danaunya, namun akan dilengkapi dengan berbagai destinasi. “Jadi orang ke Danau Toba tidak ha-nya menikmati keindahan danau saja, kalau hanya danau orang ke Parapat juga cukup. Selanjutnya dari berbagai aspek seperti Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas akan lebih ditingkatkan lagi,” tutur Tata.

Sebagai pembanding, cita-cita pem-erintah adalah Danau Toba bisa se-perti beberapa kawasan wisata yang sejenis seperti Danau Sun Moon di Taiwan, Danau Tahoe di United States, Langkawi di Malaysia, dan Danau Xihu di Hang-zhou. Danau Sun Moon, misalnya, mampu mena-rik 6 juta pengunjung do-mestik dan internasional, begitu juga dengan Da-nau Tahoe, Langkawi, dan Danau Xihu yang mampu menarik sekira 3 juta pe-ngunjung wisatawan do-mestik dan internasional setiap tahunnya, padahal



Danau Toba sendiri memiliki potensi keindahan dan luas yang jauh lebih besar dibanding beberapa tempat wisata tersebut.

Menjadikan Danau Toba agar seja-jar dengan beberapa tempat wisata di atas, bukan sekadar mimpi. Upa-ya terus dilakukan melalui berbagai promosi pariwisata di dunia. *Brand-ing* pemerintah melalui *Wonderful Indonesia* saat ini juga kian mendapat perhatian masyarakat dunia. Dari sisi pengunjung, pariwisata Indonesia se-jak 2015 mengalahkan Malaysia yang cenderung menurun.

Butuh dukungan dan komitmen pemerintah

Antonius Yuwono Kadiv Keuangan BOPDT mengatakan pengembangan Danau Toba juga akan semakin mudah ketika didukung oleh masyarakat serta komitmen lembaga-lembaga pemerintah. Aturan yang berbelit dan ti-dak selaras antara lembaga satu dan lainnya menurut A n -



ton kerap menjadi peng-hambat.

“Sebagai contoh, ketika akan mengurus pengoperasian Ban-dara Silangit, ada pemahaman yang tidak sama mengenai Kement-erian/Lembaga satu dengan yang lain-nya, untuk itu kita harus bikin *project* manajemennya. Hal ini tentu men-jadi penting, karena dukungan ma-syarakat di sana sudah baik. Dalam upaya membentuk atraksi, kita juga mendekati beberapa tokoh di sana dan mereka memiliki program yang baik dalam mendukung pariwisata,” ucap Anton.

Membangun destinasi pariwisata prioritas nasional berkelas dunia tentu tidak gampang. Anton menga-kui membutuhkan proses yang tidak sederhana. Begitu juga dengan anggar-an yang dibutuhkan untuk mengem-bangkannya. Menurut Anton idealnya dana yang dibutuhkan pemerintah untuk membangun kawasan Danau Toba sebesar Rp 20,06 triliun. “Rp 11,36 triliun investasi pemerintah dan Rp 8,7 triliun investasi swasta. Cepat atau tidaknya realisasi tergan-tung ketersediaan dana. Untuk itu kita sedang menarik terus investor dari luar, sehingga kita upayakan ker-ja sama *business to business*,” akunya.

Untuk 2017 sendiri pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 11 miliar dan Rp 73 miliar pada 2018. Dana tersebut untuk pengembangan di 700 hektare lahan di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) yang menjadi otoritas BOPDT. “Sebenarnya ang-garan yang paling besar dan mahal adalah bikin Master Plan dan *Detail Engineering Design (DED)*. Saat ini

sedang proses lelang di konsultan. Desainnya ha-rus standar internasional. Konsultan dan pelelang harus sudah bisa membuat kawasan, dan kawasan tersebut bisa dipergunakan untuk waktu yang lama, contohnya Bali,” kata Anton.

Pengembangan sumber daya

Anggaran yang belum mampu me-menuhi ekspektasi pembangunan juga harus dibagi dengan pengem-bangan sumber daya yang ada, dari sisi masyarakat, pengelola, hingga unit usaha. Sehingga seluruh aspek bisa terlibat dan terkena dampak positif keberadaan pariwisata. Selain itu, pengembangan bertujuan untuk mempercepat pembangunan Desti-nasi Pariwisata Danau Toba. “Sebut saja, misalnya, diperlukan pelatihan pengelolaan kawasan dan objek wisa-ta untuk Pemprov, Pemkab, *geopark*, pelatihan *hospitality in tourism*, *eco tourism* dan *responsible tourism* un-tuk Pemprov, Pemkab dan *Geopark*, juga sertifikasi pemandu wisata se-banyak 100 orang,” tegas Tata.

Selain dari sisi pengelola, dari sisi masyarakat dan pengusaha tidak ka-lah penting. Tahun sebelumnya BOP-DT melakukan sosialisasi, promosi, dan diseminasi *hospitality in tourism* dan *responsible tourism* di 10 Univer-sitas, 10 SMA, dan 5 LSM. Selain itu juga melakukan kampanye *Sapta Pe-sona* pariwisata di berbagai komuni-tas di masyarakat.

“Di bidang industri kita melakukan sertifikasi operator perjalanan wisa-ta dan auditor pariwisata kepada 10 Biro Perjalanan/*travel agent*, sertifi-

kasi restoran yang memenuhi standar kelayakan wisata pada 10 restoran, serta pembangunan inkubasi pengra-jin khas Sumatera Utara, ulos, dan se-bagainya,” tutup Tata.

Hal yang sama disampaikan pula oleh beberapa staf ketika Media BPP men-emui mereka di kantor BOPDT di Jalan Patimura Medan, Sumatera Utara. Mereka mengatakan tidak hanya pelatihan, BOPDT juga menampung semua aspirasi masyarakat termasuk yang mengusulkan diadakannya event besar. “Contohnya diadakan-nya acara festival musik, budaya dan sejenisnya,” kata Christina Anggraeni Staf Pelaksana BOPDT.

Wacana pengembangan kawasan wisata Danau Toba perlu didukung berbagai kalangan. Egosentrisme antar-lembaga pemerintah harus dihilangkan jika perbaikan taraf ke-hidupan masyarakat memang dicit-citakan. Keseriusan kinerja BOPDT harus sejalan dengan keseriusan pe-merintah memerhatikan keberadaannya. Jangan sampai cita-cita percepa-tan pembangunan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan seperti ke-siapan gaji untuk para pegawainya dan sarana prasarana yang memadai. (MSR)

“Cita-cita pemerintah adalah Danau Toba bisa seperti kawasan wisata yang sejenis seperti Danau Sun Moon di Taiwan, Danau Tahoe di United States, Langkawi di Malaysia, dan Danau Xihu di Hangzhou

LAPORAN KHUSUS

Toba dan Keseriusan Pemerintah Tobasa

Wacana pengembangan destinasi pariwisata nasional kawasan Danau Toba juga diapresiasi oleh pemerintah daerah. Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) salah satunya. Ketika ditemui *Media BPP* beberapa waktu lalu di Balige, Kepala Bidang Litbang dan Data BAPPEDA Dicky Tampubolon mengatakan, keberadaan BOPDT (Badan Otorita Pariwisata Danau Toba) akan memudahkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengelola kawasan Danau Toba.

Menurut Dicky, luasnya kawasan Danau Toba yang mengitari 7 kabupaten tidak bisa dibangun parsial. Pembangunan membutuhkan koordinasi yang serius dari kabupaten lain. Dicky melihat pentingnya konektivitas yang menjadi masalah utama pengembangan kawasan. Ia menyarankan perlu dibangun jalan yang menghubungkan semua kabupaten.

"Kita sedang meminta kepada pemerintah pusat untuk membangun jalan *auto ringroad*, jalan lingkaran Toba, yang menghubungkan semua kabupaten. Selama ini *kan* belum ada, Cuma masalahnya perlu juga anggaran besar, karena harus membelah gunung dan butuh biaya yang tidak sedikit. Beberapa waktu lalu kita juga sudah melakukan pertemuan dengan BOPDT, Kemenko Maritim, Kemen PUPR dan meminta dibuat jalan nasional untuk konektivitas. Jika sudah ada jalan tentu akan lebih siap," tuturnya.

Gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah semestinya juga diimbangi oleh fasilitas transportasi penghubung bandara Silangit ke Balige dan ke dermaga-dermaga

menuju Samosir yang merupakan destinasi utama Danau Toba. Hasil dari pengamatan *Media BPP* ketika mengunjungi Tobasa beberapa waktu lalu, sarana transportasi yang menghubungkan tempat-tempat wisata di Tobasa khususnya Balige sangat langka. Padahal Tobasa memiliki beberapa destinasi yang tidak boleh dilewatkan ketika mengunjunginya. Misalnya, Pantai Lumbun Silintong, Pantai Janji Maria, Air Terjun Sigur-gura, dan Bukit Tarabunga tempat untuk menikmati *landscapes* Danau Toba dari ketinggian.

Untuk mengunjungi Bukit Silintong yang hanya berjarak dua kilo saja, *Media BPP* harus merogoh kocek Rp 25 ribu dengan menggunakan *bentor* (becak motor). Sebetulnya spot terbaik di Balige adalah Bukit Tarabunga. Namun, tidak adanya transportasi membuat bukit tersebut tidak dikenal. "Tidak ada kendaraan ke sana, harus menggunakan kendaraan pribadi. Tidak ada juga motor yang bisa disewakan. Bisa saja pake mobil hotel, tapi harganya Rp 300 ribu," kata penjaga hotel.

Tobasa juga tengah mengembangkan bandara baru khusus pesawat kecil yaitu Sibisa di Ajibata yang tentu lebih dekat jika dibanding Silangit. Kehadiran bandara tersebut diharapkan bisa memangkas waktu tempuh perjalanan ke dermaga di Balige untuk para pelancong yang hendak menyebarkan ke Samosir.

Selain kurangnya sarana transportasi beberapa jalan di Tobasa tidak lebar. Di Balige yang menjadi pusat kota, misalnya, tidak pernah lepas dari kemacetan. Dicky mengatakan, kemacetan akan lebih parah setelah renovasi pasar dilakukan, apalagi pasar tersebut akan dikembangkan untuk tujuan wisata pada masa mendatang.

"Saat ini belum ada jalan lain. Baik truk maupun bus semua melalui jalan tersebut," terangnya.

Sebagai solusi pada masa yang akan datang Tobasa akan membangun *Balige bypass* sepanjang 10 kilometer. "Pada waktu yang akan datang akan ada penataan. Untuk mobil besar tidak melalui pasar tersebut. Untuk jalan tersebut sekarang masih pembebasan lahan," tutur Dicky.

Tobasa juga tengah melakukan penataan destinasi wisata. Menurut Dicky beberapa tempat wisata yang ada belum ditata secara maksimal. Selain itu, fasilitas yang tersedia di tempat wisata juga masih sangat minim. Beberapa tempat wisata yang sudah dilakukan penataan seperti Makam Sisimangaraja XII, Museum Batak di Tebe Silalhi Center, dan Taman Eden. Terkait penataan tempat wisata, menurut Dicky



Kabupaten Tobasa tengah menunggu *master plan* yang baru akan disusun tahun depan oleh BOPDT. "Kita juga bingung mau mengembangkan kawasan wisata di Tobasa. Padahal yang strategis banyak. Selain menunggu komando dari pemerintah provinsi, juga tidak ada *master plan*, masih menunggu *master plan* itu," ucapnya.

Isu lingkungan

Isu lingkungan di kawasan Danau Toba menjadi perhatian ketika hendak dijadikan tujuan pariwisata dunia. Banyaknya limbah cair yang berasal dari permukiman, peternakan, industri, dan hotel di sekitar membuat pemerintah kewalahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan telah terjadi pencemaran air sedang di danau terluas di Indonesia tersebut.

Limbah pakan ikan dari keramba se-



makin mengkhawatirkan dan menjadi penyumbang pencemaran terbesar. Terdapat lebih dari 8 ribu keramba jaring apung hingga saat ini yang menghasilkan limbah organik tinggi. Selain itu, terjadi kenaikan tingkat fosfor sebesar 300 persen dalam baku mutu Danau Toba dari 2012, serta kematian ratusan ton ikan.

Kabupaten Tobasa sendiri menurut Dicky telah menyarankan agar secepat mungkin dibuat regulasi dan dilakukan zonasi. "Yang boleh keramba itu di mana, sebaiknya yang dekat dengan aliran sungai. Dan kita juga sudah memikirkan jika seandainya tidak diperbolehkan ada keramba, kita akan kembangkan perikanan darat," gerutunya.

M. Tata Ridwanullah Direktur Destinasi Pariwisata BOPDT mengatakan ada beberapa solusi terkait permasalahan limbah tersebut di antaranya dengan mewajibkan setiap industri dan hotel memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik. Fungsinya agar air tersebut bisa dikembalikan kepada fungsinya.

Selain masalah limbah, permasalahan lainnya adalah pembalakan liar dan peralihan fungsi hutan yang dilakukan masyarakat tanpa sepengetahuan pemerintah. Untuk masalah tersebut, Dicky mengatakan akan dilakukan penanaman satu juta pohon yang diinisiasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. "Ini mendesak dilakukan. Kalau kita lihat hutan di Danau Toba ini terus menyusut setiap tahun hingga 16 persen dari luas hutan yang ada," ujarnya.

Dukungan penelitian

Hasil-hasil penelitian menjadi penting untuk mendukung pengemba-

ngan kawasan wisata di Danau Toba. Namun keberadaan badan penelitian yang sempit di daerah yang mengitari kawasan Danau Toba membuat ruang geraknya terbatas. Lembaga penelitian seperti Badan Penelitian dan Pengembangan di daerah tidak banyak menghasilkan *output* maksimal dalam mendukung pariwisata nasional.

Berbeda dengan Bidang Litang dan Data Kabupaten Tobasa, meski lingkup kecil bukan berarti tidak berdaya. Jauh sebelum ditetapkan menjadi destinasi pariwisata prioritas nasional, Bidang Litbang dan Data Kabupaten Tobasa melakukan penelitian sebagai upaya mengembangkan pariwisata lokal. Seperti melakukan penelitian terkait kawasan wisata tradisional di Tampahan. Kehidupan yang masih mempertahankan kearifan lokal menjadi daya tarik Tampahan.

"Masih ada kehidupan tradisional, menenun ulos, rumah batak, kita mau jual kehidupan masyarakat dan petani, dan Danau Tobanya yang bagus. Selain itu juga di sana masih ada tanaman langka. Hanya belum terealisasi. Padahal aksesnya juga dekat ke Silangit," tukas Dicky.

Selain penelitian kawasan wisata Tampahan, pada 2018 mendatang pemerintah Kabupaten Tobasa juga tengah mengembangkan penelitian terkait persepsi masyarakat di lokasi wisata yang ada. Hal tersebut ujar Dicky berguna dalam pengembangan kawasan wisata yang bersahabat dengan masyarakat.

"Kita akan analisis persepsi masyarakat. Lokasi wisata yang sudah ada seperti apa kita tanyakan ke masyarakat, yang kurang juga apa, jangan versi pemerintah saja. Sebagian



banyak di perdesaan, dan bereluang untuk pengembangan desa wisata. *Kan* pendanaan dari dana desa, jadi agak terbantu. Ditambah dengan dukungan pemerintah. Rekomendasinya nanti, apa saja yang perlu di kembangkan di daerah tersebut," ujar Dicky. (MSR)

Bidang Litbang Provinsi Bangka Belitung

Fokus Mengkaji Lada dan Pariwisata

Gugusan kepulauan Sumatera pecahan dari Provinsi Sumatera Selatan membentang mewarnai salah satu deretan panjang pulau dari Sabang sampai Marauke. Pulau ini mulai dikenal dengan film Laskar Pelangi, dan menjadi destinasi wisata menarik bagi turis lokal maupun mancanegara. Babel terus membenahi diri dan membangun pulau kecil ini menjadi pulau besar dan dikenal banyak orang, melalui hasil kajian pariwisata, agraria, dan ekonominya pada Bidang Litbang Prov. Babel yang di bawah naungan Bappeda

Ada banyak sekali potensi wisata cantik dan kekayaan alam yang bisa di-eksplor dari kepulauan Bangka Belitung. Mulai dari pantainya yang cantik, danau bekas tambang yang bewarna biru jernih dan kehijauan dan juga tempat menarik lainnya di Bangka Belitung, serta tempat kuliner khas ikan dengan aneka olahan makanan dan cemilan seperti kerupuk Bangka yang terkenal.

Tim Media BPP mengunjungi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bangka Belitung untuk mencari tahu hal apa yang bisa dikembangkan dari kepulauan yang disingkat Babel itu sekaligus memenuhi undangan pembinaan Rakor Kelitbang Provinsi Babel.

Pada 30 Oktober 2017 lalu, BPP Kemendagri diundang untuk mengisi acara Rakor Litbang Provinsi Babel yang dihadiri oleh beragam narasumber, dari BPP sendiri diwakili oleh Moh. Ilham. A. Hamudy Kasubbag Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi, lalu ada Prof. Dr. Erwiza Erman dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dan Herry Suhermanto juga dari Asosiasi Perencanaan Pemerintahan Indonesia dan Ketua Dewan Riset Daerah Prov. Babel.

Acara Rakorda itu diselenggarakan selama dua hari berturut-turut pada 30-31 Oktober. Beberapa peserta yang hadir tidak hanya dari Litbang Kabupaten/Kota, tetapi juga dari lembaga lain seperti Universitas Negeri Babel (UNB) dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

(STIE).

Dalam kesempatan tersebut, Ilham begitu ia disapa banyak memberikan paparan mengenai bagaimana pentingnya menghidupkan peran Litbang dalam memajukan suatu daerah. "Litbang berperan penting terhadap pembangunan suatu daerah melalui penelitian. Semestinya segala kebijakan, rekomendasi Kepala Daerah harus berangkat dari riset dan kajian yang dilakukan oleh Litbang," terangnya.

"Melalui litbang lah, masa depan daerah dapat ditentukan mau dibawa ke dalam sektor kemajuan bidang apa daerah tersebut," lanjutnya. Sementara itu, di Babel sendiri, Litbang masih belum berdiri sendiri menjadi Badan. Litbang masih menempel pada salah satu Bidang di Bappeda Provinsi Babel, dengan sub bidang dan sumber daya yang terbatas.

Sekilas tentang Bidang Litbang Babel

Sebelum bergabung menjadi Bidang Litbang di Bappeda Prov. Babel, litbang pernah berdiri sebagai UPT (Unit Pelaksana Teknis). Namun pada 2015 UPT tersebut kemudian bergabung bersama Bappeda dikarenakan belum mampu secara mandiri berdiri sendiri. Dari hasil penelusuran Media BPP, Bidang Litbang Bappeda Babel memang masih sangat terbatas, terutama dari segi SDM dan juga infrastruktur. "Waktu itu masih berupa UPT, dan belum ada penelitiannya, dan staf-staf UPT yang dulu sebagian pindah ke Bidang Ekonomi Bappeda," kata M. Kucin, Kepala Bidang Litbang Bappeda Babel.

Setelah pindah, Bidang Litbang Bappeda

da Babel bergabung bersama bidang perencanaan dalam hal teknis di lapangan. Menurut Kucin, bahkan beberapa program banyak mengekor pada bidang perencanaan dalam menjalankan program. Mengapa demikian? Menurut Kucin, sebelum-sebelumnya Litbang memang kurang dipandang dan didukung oleh pemerintah setempat.

Peneliti di Bidang Litbang Bappeda Babel pun hanya berjumlah 4 orang yang tergabung dalam 2 Sub Bidang, yakni Sub Bidang Sosial Budaya dan Pem-

berdayaan Masyarakat, Lalu ada Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Salah satu Kasubbid Inovasi dan Teknologi Mardani mengatakan, di Bidang Litbang Bappeda Bangka Belitung memang masih proses merangkak dalam hal pembangunan. "Kita selalu berusaha terbaik dari tahun ke tahun. Tahun ini saja kita punya banyak program kerja yang cukup berperan langsung ke masyarakat, dan harapannya ke depan bisa mendukung kinerja pemerintah setempat dalam membangun Bangka Belitung," terangnya.

Program yang berjalan

Program yang saat ini sedang dijalankan Bidang Litbang adalah riset tentang Kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan budidaya lada sebagai produk unggulan Bangka Belitung yang terkenal. Di bidang kesehatan, menurut Mardani telah melaksanakan pemanfaatan UKS (Unit Kesehatan Siswa) di sekolah-sekolah.

"Setelah diadakan penelitian UKS di sekolah-sekolah tidak berjalan dengan baik karena pembinaan UKS dilakukan oleh guru mata pelajaran yang sama (tidak ada tenaga ahli khusus yang mengerti soal kesehatan). Contohnya istri saya sedang mengajar di kelas, tiba-tiba ada anak sakit jadi harus meninggalkan kelas. Nah, ke depannya kami ingin

UKS di sekolah itu berkerja sama dengan AKPER (Akademi Keperawatan) sebagai tenaga kesehatan di sekolah-sekolah saat melakukan KKN (Kuliah Kerja Nyata), sehingga diharapkan keberadaan UKS di sekolah dapat dimanfaatkan optimal oleh siswa-siswa," terangnya.

Sementara pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Litbang Bappeda Prov. Babel mengadakan penelitian bagaimana mata pencarian masyarakat pasca tambang. Setelah diadakan kajian dan beberapa penelitian, ternyata memang banyak masyarakat yang dulu mata pencariannya sebagai penambang, sulit beralih ke mata pencarian lainnya, karena kurangnya skill di bidang lain. "Kalau mau buka usaha, juga tidak ada modalnya, inilah yang mau kita arahkan para mantan penambang itu agar memunyai kreativitas dan skill lain selain menambang," tuturnya.

Sementara di bidang pangan, Litbang memang fokus kembali kajian mengenai Lada. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan yang baru dilantik sejak 12 Mei 2017 lalu memang kembali mencanangkan kedaulatan agraria Bangka Belitung melalui lada. Menurutnya Lada di Bangka Belitung berbeda dengan Lada pada umumnya, dari cita rasanya terlihat berbeda karena ke-khasan tanahnya. "Ya

karena di sini kan banyak tanah bekas tambang jadi mungkin itu yang berbeda dari lada umumnya, rasanya lebih berani dan menyengat," kata Budiman Ginting, Plt. Kepala Bappeda Provinsi Bangka Belitung.

Namun beberapa permasalahan lada, menurut Mardani inilah yang membuat produksi lada tidak optimal, seperti penyakit lada yang menguning. Lada yang baru beberapa tumbuh bijinya menguning. Penyakit kuning ini sangat dikeluarkan para petani karena lada tidak tumbuh subur. "Nah, itulah yang mau kita cari tahu penyebab dan solusinya, saat ini kami sedang bekerja sama dengan IPB untuk mencari rasa lada yang paling baik di Babel dan mempelajarinya bagaimana proses pembuatannya," ungkap Mardani

Selain kontur tanah, cita rasa dan khas lada Babel yang membuat berbeda dari lada lain pada umumnya adalah cara pengelolaannya. Lada di Babel yang sudah panen biasanya langsung dikupas dulu kulitnya baru dijemur kemudian. Berbeda dari lada yang ditanam di Pulau Jawa, yang umumnya setelah panen langsung dijemur baru dikupas, sehingga menghasilkan lada yang kurang enak dan kontur warna yang hitam. "Kalau lada di kami ini kan putih-putih bulat-bulat bersih, karena dikupas dulu, itulah lada kami semestinya bisa jauh lebih mahal dari lada pada umumnya," terang Budiman.

Hasil kajian lada dan penelitian itulah yang sedang digarap oleh 4 peneliti yang dimiliki Bidang Litbang Bappeda Babel. Meski keterbatasan SDM, mereka nantinya akan dibagi-bagi setiap kajian kebidangan. "Meski keterbatasan SDM, saya inginnya peneliti di sini bekerja sama dengan perguruan tinggi dan menjadi pionir (ketua tim) penelitian ini," terangnya.

Fokus Lada dan Pariwisata

Selain mencari akar penyebab penyakit menguningnya lada, fokus lada yang juga digencarkan pemerintah setempat adalah mata rantai tata niaga lada. Beberapa pengaruh naik atau turunnya harga juga dipengaruhi oleh kurs dolar terutama pengaruh distributor lada (transportasi). Hal itulah yang hendak didorong oleh Budiman Ginting bersama seluruh jajaran Bappeda dalam mendukung Gubernur Provinsi Babel.

"Saat ini perlu diadakan penelitian



kembali terkait produksi lada. Seperti diketahui, Babel merupakan penghasil lada di Indonesia dan dunia. Peneliti harus mengadakan penelitian dengan inovasi baru bagaimana caranya membangun kembali kejayaan lada. Karena lada Babel berbeda dengan lada di daerah lain, yang membedakan lada Babel yaitu aroma dan rasanya. Sehingga lada kami sampai sekarang menjadi merk dagang dunia. Untuk mengembangkan produksi lada Babel sekarang telah berlangsung penelitian yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) agar mempermudah penanganan penyakit lada dan juga masalah distribusi lada kita ingin mendirikan transportasi yang lebih baik lagi,” kata Budiman.

Transportasi yang lebih baik lagi menurut Budiman, seperti wacana pembangunan jembatan penghubung dari Pulau Sumatera ke Babel. “Saya juga sudah bicarakan sama Gubernur soal wacana gila ini, dan Gubernur setuju. Saya rasa ini tidak perlu anggaran yang besar untuk sebuah gebrakan apalagi kalau kita terus-terusan persoalkan permasalahan anggaran. Kalau SDM-nya bisa melihat potensi dan membangun dae-

rah, saya rasa masalah-masalah lembaga yang klasik bisa diatasi,” tutur pria asal Medan yang tahun depan sudah mulai pensiun itu.

Selain transportasi penghubung seperti jembatan, Pemprov Babel melalui Bappeda juga sedang mengembangkan transportasi di Bangka Selatan untuk distribusi lada. Transportasi itu seperti jalur laut yang menghubungkan Kepulauan Bangka dengan Kepulauan Belitung, cara ini jugalah yang akan menghubungkan destinasi wisata antara Bangka dan Belitung.

Seperti yang diketahui, Provinsi Bangka Belitung mempunyai dua kepulauan besar yakni Kepulauan Bangka dan Kepulauan Belitung. Memang yang banyak sekali peminat wisatanya terletak di Kepulauan Belitung yang fenomenal karena negeri Laskar Pelangi. Di sana terdapat sekolah SDN 1 Gantong yang pernah dipakai *shooting* film Laskar Pelangi, dan Museum Kata Andrea Hirata. Selain terkenal dengan negeri Laskar Pelanginya, Belitung juga terkenal dengan pantainya yang indah, jernih, dan masih perawan. Sebut saja beberapa pan-

tai yang indah seperti pantai Lengkuas yang banyak bebatuan pantai dan merusainya.

Banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang mencari spot foto untuk sekadar diposting di *instagram* ataupun *prewedding*. Nah, momen inilah yang dilihat oleh Pemprov Babel dan Bappeda Babel yang dalam hal ini membangun di Bidang Pariwisata.

“Kita sedang bangun jalur kapal baru di Bangka Selatan, dan juga penerbangan khusus pariwisata di Babel ini. Kami sedang bekerja sama dengan beberapa maskapai penerbangan juga, untuk membuat pariwisata yang datang ke Belitung juga diwajibkan untuk datang ke Bangka juga,” terang Budiman.

Di masa yang akan datang, Bidang Litbang terus berupaya mendorong program kerja Pemrov Babel melalui kajian dan penelitian di bawah naungan Bappeda. “Saya berharap teman-teman di Bidang Litbang bisa bekerja optimal dan melakukan kajian yang lebih urgen dan mengena di masyarakat dan perekonomian Babel,” tuturnya. (IFR)

Namun sayangnya, beberapa Litbang Daerah masih belum mempunyai jurnal ilmiah atau masih banyak yang belum terakreditasi LIPI dan beralih ke *online*, padahal menurut Perdirjen DIKTI No 1 Tahun 2014 tentang Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik; dan Perka LIPI No 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah yang mewajibkan semua bentuk jurnal ilmiah beralih dari versi cetak ke elektronik (*daring*).

”BPP Provinsi diharapkan dapat mengkoordinasikan pengelolaan jurnal ilmiah di masing-masing BPP Kabupaten dan Kota. Perlu penyiapan anggaran dan sumber daya dilakukan sedari sekarang agar pada 2018 nanti jurnal ilmiah elektronik itu sudah dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Ilham.

Saat pemberian materi, terlihat memang banyak peserta yang antusias ingin belajar pengelolaan jurnal. Terlebih lagi banyak BPP Daerah yang belum punya jurnal atau wadah menampung hasil penelitiannya selama ini yang kurang terpublikasi. Salah satu BPP Daerah yang belum mempunyai jurnal adalah Bidang Litbang Prov. Babel sendiri. Namun Bidang Litbang Babel memang berencana akan membuat jurnal di tahun anggaran ke depan.

Mardani, Kasubbid Inovasi dan Teknologi dalam rakor tersebut mengatakan, Bidang Litbang Bappeda Prov. Kepulauan Babel sampai saat ini belum memili-

ki jurnal ilmiah untuk memublikasikan hasil-hasil kelitbangan.

“Ya karena kami di sini ini kurang SDM yang memiliki kompetensi publikasi ilmiah. Makanya itulah salah satu penyebab Bidang Litbang belum memiliki jurnal ilmiah. Selain itu minat peneliti untuk menulis masih kurang. Hanya satu atau dua peneliti saja yang telah mengirimkan artikelnya ke jurnal ilmiah dan media massa,” terangnya.

Meski terlihat begitu awam bagi sebagian peserta yang datang dari Litbang Daerah, ternyata masih ada juga peserta yang banyak mengerti tentang jurnal, hal itu didominasi dari peserta Perguruan Tinggi di Babel yang umumnya sudah punya jurnal namun belum terakreditasi. “Sayang sekali pak, kalau jurnal tidak terakreditasi apalagi kalau umur jurnal itu sudah 5 tahun lebih, serasa tidak ada hasilnya untuk peneliti di sini,” keluh Ilham.

Untuk itu, banyak sekali peserta yang bertanya di penghujung acara maupun di akhir acara sesi materi pentingnya jurnal ilmiah yang dibawakan oleh Moh. Ilham. A. Hamudy. “Karena kita keterbatasan waktu, kita sambung diskusi ini via nomor *WhatsApp* saya, atau Bidang Litbang ini sebenarnya bisa bekerja sama dengan PT (Perguruan Tinggi) di dalam pengelolaan jurnal dan penjangkaran naskah sebenarnya,” tutur Ilham.

Pemilihan tema jurnal

Salah satu syarat terbentuknya sebuah jurnal adalah, spesifikasi tema jurnal yang akan dibangun. Jurnal ilmiah yang baik harus mempunyai spesifikasi bidang keilmuan khusus, tidak bisa general atau campur aduk. Hal itu akan mempengaruhi penilaian akreditasi jurnal ilmiah dan kualitas jurnal itu sendiri. Nah, pada sesi kedua setelah Moh. Ilham A. Hamudy memaparkan, ada sesi berikutnya dari Erwiza Erman seorang peneliti LIPI yang konsen meneliti terkait tambang.

Bangka Belitung memang terkenal dengan daerah tambang dan kehidupan masyarakatnya yang miskin pasca tambang. Beberapa sejarah mengenai tambang Erwiza paparkan, agar menjadi salah satu inspirasi penelitian pada Bidang Litbang Prov. Babel atau fokus jurnal ilmiah yang hendak dirancang.

“Sebenarnya kalau memang ingin dilakukan penelitian, Babel bisa saja memulai dari yang dekat seperti persoalan tambang timah yang ada di sini. Sejujurnya informasi tentang sejarah timah sangat melimpah, namun sayangnya kurang publikasi atau diinformasikan kepada khalayak, terutama mengenai persoalan sektor ekonominya, dan sosial budayanya. Sehingga ke depannya, penelitian mengenai tambang ini perlu panduan penelitian arsip dan data lapangan,” kata Erwiza mengawali seminar.

Tata kelola pertambangan timah sebenarnya sudah ada sejak masa kesultanan sampai sekarang memiliki banyak persoalan. Mulai dari soal izin penambangan, eksploitasi, dan perdagangan. Banyak aspek politik, hukum, dan budaya yang berkaitan satu sama lain menjadi penentu sukses tidaknya penambang.

Menurut Erwiza memang ada dua pendapat terkait paradigma persoalan tambang ini. Di satu sisi, tambang sebagai rahmat, di sisi yang lain tambang sebagai musibah. “Sebagai agen pembangunan berdirinya izin tambang banyak membangun infrastruktur di Babel, seperti gudang, benteng rumah kongsi (sultan), jalan, jembatan, kantor, perumahan, dan pembangunan permukiman penduduk. Namun pada 1819-2001 terjadi ketimpangan pembangunan masyarakat lokal dengan masyarakat tambang. Sekelompok kecil masyarakat hanya mentok di Sekolah Dasar dan menjadi penambang sejak masih sangat belia. Terdapat jarak sosial yang tinggi antara penduduk lokal dengan masyarakat tambang yang dianggapnya lebih maju, akibatnya banyak penduduk yang menikahi anaknya dengan penambang, terjadilah nikah massal dan perceraian massal pula. Dan selama 300 tahun eksploitasi di Babel baru dikeluarkan aturan undang-undangnya,” jelasnya.

Nah, kajian dan isu yang seksi inilah yang dianggap Erwiza menjadi salah satu kajian menarik bagi para peneliti di Bidang Litbang Babel untuk membuat satu kajian yang nantinya dapat dimuat dalam jurnal atau publikasi media massa. Baik media internal maupun media lokal Bangka Belitung. “Inilah yang sebenarnya yang menarik dikaji untuk kemudian dipublikasikan dalam jurnal atau media seperti yang Pak Ilham katakan,” harap Erwiza. (IFR)

Tingkatkan Produk Kelitbangan

Pada Senin 30 Oktober 2017 lalu, BPP Kemendagri diminta oleh Bidang Litbang Bangka Belitung untuk mengisi acara Rakor Litbang Daerah di Babel. Pada kesempatan tersebut, yang mewakili BPP Kemendagri ialah Moh. Ilham. A. Hamudy, Kasubbag Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi BPP Kemendagri yang memberikan paparan mengenai pentingnya *output* dalam dunia kelitbangan.

Salah satu *output* atau ujung tombak litbang adalah produk penelitian yang dituangkan melalui jurnal ilmiah dan publikasi populer (majalah/koran). “Baik buruknya Litbang bergantung pada sumber daya peneliti dan produk penelitian dan pengembangan yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah,” terang Ilham mengawali pembicaraan Rakor

Litbang Daerah Provinsi Babel.

Dalam kesempatan itu, Ilham juga menekankan bahwa jurnal ilmiah juga menentukan seberapa produktif peneliti yang ada dan sejauh mana kualitas jurnal ilmiah yang dikelola. “Kehadiran jurnal bereputasi menjadikan Litbang sebagai lembaga yang diperhitungkan. Reputasi para peneliti pun ikut terdongkrak. Sebab artikel mereka bisa dibaca dan dijadikan rujukan,” tandasnya kepada seluruh peserta yang hadir.

Tidak hanya itu, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah bereputasi menjadi prasyarat pengajuan angka kredit peneliti. Dengan karya tulis yang baik itulah, dunia penelitian dan publikasi ilmiah Indonesia semakin terangkat di dunia internasional. “Kuncinya peneliti harus sadar akan pentingnya kualitas tulisan yang memiliki standar yang baik,” tambahnya.



Provinsi Bali

Proyeksi Wisata Kelas Dunia

Beberapa waktu lalu, situs pariwisata dalam jaringan Tripadvisor menobatkan Bali sebagai daerah tujuan wisata terbaik dunia 2017, dan menduduki urutan pertama berdasarkan pilihan wisatawan mancanegara. Bali berada di urutan pertama sebagai destinasi terbaik dunia dari 25 tujuan wisata. Sementara urutan kedua dan seterusnya diraih London, Paris, Roma, dan New York City.

Menjadi urutan pertama sangatlah wajar. Selain menyuguhkan kawasan wisata yang menawan, penduduk Bali dikenal ramah *nan sopan*. Sikap warga lokal bisa menjadi salah satu kunci utama kenyamanan pelancong dari berbagai penjuru dunia.

Seiring dengan prioritas wisata andalan nasional, kesiapan pemerintah daerah untuk menjadikan Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, ternyata tidak hanya terpaku pada modal alam. Bali juga memiliki kesiapan dalam hal infrastruktur, tata kelola, dan dukungan lingkungan bisnis yang siap menopang fondasi kokoh pengembangan pariwisata, ditambah lagi dengan nama Bali yang sudah terkenal ke seantero dunia.

Dari segi tata kelola, misalnya, kebersihan kawasan menjadi prioritas utama. Di beberapa tempat wisata seperti Pantai Uluwatu, Pantai Dreamland, dan Garuda Wisnu Kencana (GWK) hampir dipastikan tidak ada sampah bertebaran.

Destinasi wisata

Di GWK, pengelola mulai menaikkan standar menjadi destinasi wisata bertaraf internasional. Hal itu terlihat dari pelayanan dan fasilitas yang ditawarkan. Seperti contoh pertokoan yang nyaman dan toilet yang sudah

dilengkapi AC. Kenyamanan dan fasilitas yang ditawarkan tentu sebanding dengan harga tiket masuk yang dipatok Rp 70 ribu untuk wisatawan lokal dan Rp 150 ribu untuk turis mancanegara.

GWK berada di ketinggian 146 meter di atas permukaan laut. GWK dikenal juga dengan *GWK Culture Park*, pengunjung bisa menikmati berbagai karya seni seperti patung Dewa Wisnu karya I Nyoman Nuarta yang terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton dengan tinggi 20 meter. Sementara di belakangnya terdapat patung Garuda yang memiliki tinggi 18 meter. Di depan garuda terdapat pelataran dengan pilar batu kapur dan membentuk ruangan yang mampu menampung hingga 7.000 orang.

Di lokasi yang dikenal dengan *Lotus Pond* tersebut sering digelar acara besar seperti konser musik dan pertemuan bertaraf internasional. Seperti beberapa waktu lalu ketika Tim Media BPP mengunjungi GWK, di area tersebut akan digelar konser musik dengan sponsor utamanya salah satu perusahaan besar dari Singapura. GWK menawarkan salah satu karya seni patung terbesar dan karya yang paling menakutkan dan mencerminkan nilai budaya lokal Bali.

Menurut salah satu informan yang merupakan pemandu wisata, rencananya patung tersebut nantinya akan berdiri megah mengalahkan Patung Liberty di New York Amerika. "Di Kawasan ini akan di bangun, patung Dewa Wisnu yang sedang manaiki garuda dengan tinggi 126 meter dan lebar 60 meter, dan akan menjadi yang terbesar di dunia, melebihi patung Liberty di AS," katanya.

Bali juga menyuguhkan kawasan pantai terkenal yang tidak kalah menawan dari sekadar Tanah Lot dan



Pandawa, adalah pantai Uluwatu dan Dreamland. Di Uluwatu pengunjung akan menyaksikan luasnya hamparan Samudra Hindia, dengan ombak yang menghantam kaki tebing. Di sepanjang tebing pantai ke arah utara, para investor mulai melebarkan sayap membangun beberapa villa yang menghadap langsung ke pantai dengan menawarkan nuansa dan pemandangan istimewa. Tim diberi kesempatan memasuki sebuah villa yang tengah dibangun dan segera diresmikan bulan depan. Rudi, penjaga villa mengantarkan melihat-lihat kawasan tersebut, ia mempersilakan bersantai dan menawarkan spot foto terbaik serta menyuguhkan minuman andalan villa tersebut secara gratis. Menurut Rudi, Media BPP cukup beruntung, pasalnya bulan depan setiap pengunjung akan dikenakan biaya lagi sekira Rp 50 ribu perorang untuk memasuki kawasan tersebut.

"Di atas masih bisa melihat pemandangan yang tidak kalah bagus dari ini. Bulan depan pengunjung harus menambah uang untuk bisa ke sini," tutur pria kelahiran Labuan Bajo tersebut.

Setelah puas berbincang panjang lebar dengan Rudi, Media BPP segera bergegas ke tempat berikutnya. Rencananya, hari itu Media BPP bermaksud mengunjungi Pantai Dreamland menikmati *sunset* di waktu senja.

Dreamland merupakan surganya wisata pantai di Indonesia. Untuk menuju ke sana, kendaraan tidak bisa langsung menuju pantai. Namun akan diantarkan dengan bus wisata. Pantai Dreamland menjadi salah satu spot terbaik untuk melakukan aktivitas berselancar. Daya tarik lainnya adalah kebersihan pantai yang sangat terjaga.

Dreamland juga menjadi spot terbaik menikmati *sunset* di sore hari. Bersantai di balkon di sepanjang pantai menjadi pilihan Media BPP saat itu, menyaksikan perubahan warna alam dari berangin hingga kuning keemasan. Seketika matahari mulai terbenam dan membias di garis mata,



titik terujung senja mengantarkan rangkulan malam yang gelap. Bersama hilangnya cakrawala, perjalanan Media BPP menyusuri Pulau Dewata harus diakhiri.

Tidak ramah disabilitas

Perjalanan mengunjungi Bali menyisakan dua cerita, menggembirakan sekaligus membuat miris. Gembira karena di semua tempat wisata, warga lokal bisa dihitung dengan jari, wisatawan asing selalu mendominasi, artinya Bali menjadi tujuan wisata dunia. Di sisi lain, beberapa tempat wisata di Bali justru tidak memiliki akses disabilitas.

Pengalaman kami ketika mengunjungi

gi beberapa tempat wisata, misalnya, ada pengunjung berkebutuhan khusus harus menunggu di luar, atau beberapa temannya harus membantu menuju spot utama. Di beberapa tempat wisata, memang terdapat pengelola yang ramah dan bersedia mengantarkan dengan kendaraan bermotor, namun itu juga hanya di muka saja, mengingat akses menuju spot utama rata-rata sangat jauh.

Sebagai tempat wisata kelas dunia, Bali semestinya tidak hanya menampilkan keramahan penduduk, tetapi juga keramahan akses bagi wisatawan berkebutuhan khusus. Sudah saatnya Bali berbenah dan berpikir ke arah sana. Agar bali tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya namun juga keindahan sikap memperlakukan wisatawan berkebutuhan khusus. Sehingga pada masa mendatang Bali bisa menjadi salah satu tempat wisata ramah disabilitas.

Beberapa destinasi wisata lain di dunia juga menyediakan akses bagi wisatawan difabel. Sebut saja Playa del Carmen di Meksiko, Sagrada Familia di Spanyol, Taman Botani Sensorik di Sicilia, Italia dan lain sebagainya. Beberapa kawasan wisata tersebut menjadi salah satu tujuan destinasi favorit yang tidak kalah dari Bali.

Kendati pun begitu, pengelolaan wisata Bali harus diapresiasi. Bali sudah membuktikan, manajemen pengelolaan yang baik menjadikannya mendapat penghargaan dunia. Bali juga bisa menjadi contoh sekaligus *pilot project* bagi beberapa destinasi wisata di daerah lain di Indonesia. (MSR)

Pesona Pulau Dewata

Berbicara soal Bali, pasti tidak jauh dari keindahan pantai dan wisatawan asing dari seluruh mancanegara yang berbondong-bondong datang ke Pulau Dewata itu atau pulaunya para dewa. Tapi, ternyata pesona Bali tidak hanya dari keindahan pantainya saja *lho*, ada beberapa destinasi menarik lainnya yang tidak

kalah seru dan kaya akan nilai sejarahnya. Seperti pemandian suci Tirta Empul, Danau Bantur Kintamani, dan Pura Alun Danau Bedugul. Lalu seperti apa tempat-tempat menarik itu, yuk simak perjalanan wisata Media BPP ke beberapa tempat destinasi menarik di Bali.

Melukat di Tirta Empul

Semilir angin berhembus dari uda-

ra segar pepohonan Tampak Siring, Gianyar, Bali. Tidak terhitung berapa jumlah patung dan sesajen kembang yang terpampang di rindangnya pohon besar tersebut. Puluhan wisatawan dari berbagai manca negara turut berbondong-bondong mendatangi tempat bersejarah tersebut. Penduduk lokal menyebutnya Tirta Empul, tirta (air suci) dan empul (mata air/muncrat).

Bukan tanpa sebab, para turis lokal maupun manca negara mendatangi tempat yang disebut kramat itu. Tempat ini dipercaya dapat mensucikan pikiran, tubuh, dan segala jenis penyakit bagi siapa saja yang mengikuti ritual melukat atau upacara pembersihan.

Dari pusat Kota Denpasar, Tirta Empul dapat dijangkau dalam waktu 1 jam lebih dengan menggunakan kendaraan mobil. Kondisi medan yang cukup curam, karena di dataran tinggi, membuat Tirta Empul lebih dingin dari daerah Bali umumnya. Namun hal itu tidak mengurangi rasa penasaran para wisatawan yang datang. Mereka yang berkulit putih justru lebih senang dengan cuaca dingin di Tirta Empul karena sudah terbiasa.

Rata-rata dari mereka bahkan sudah membawa *tour guide* masing-masing dengan mahir menjelaskan sejarah Tirta Empul menggunakan bahasa asing. Ada yang menjelaskan dengan Bahasa Inggris, Jepang, Korea, China, Arab, bahkan India.

Untuk harga tiketnya, Pura Tirta Empul tidak membedakan wisatawan lokal maupun mancanegara. Semuanya seharga Rp 15 ribu untuk sekali masuk. Di dalamnya, pengunjung dapat berfoto di pura, atau melakukan ritual melukat.

Kami bertanya-tanya pada *tour guide* dari salah satu rombongan wisatawan yang sedang berdoa sebelum melukat, ada berbagai ritual yang 'sunah' dilakukan para pelancong yang hendak melukat di sumber air Tirta Empul itu. Yakni, lakukan berdoa di dalam hati dengan khusus dan tenang selama beberapa menit, dengan posisi duduk sila dan kedua telapak tangan saling bertemu. "Kami umat Hindu biasanya ditambah dengan mempersembahkan sebuah 'canang' yang diletakkan tepat di atas pancuran yang kemudian di isikan dupa yang telah di hidupkan. Sembari itu kami lakukan doa dengan tenang," jelasnya.

Baru setelah memanjatkan doa dan merenung akan dosa-dosa selama ini, pengunjung akan merasakan ketenangan dan melanjutkan dengan ritual pembersihan di kolam. Ingat, hanya perempuan yang suci yang boleh dibasuh, artinya perempuan yang sedang menstruasi dilarang

masuk. "Karena Tirta Empul itu kan artinya sumber mata air suci, jadi tempat ini harus benar-benar dijaga kesuciannya," tambahnya.

Setiap pancuran di kolam Tirta Empul ini memiliki nama tersendiri, diantaranya adalah Pancuran Penglukatan, Pancuran Pembersian, Pancuran Sudamala dan Pancuran Cetik (Racun). Air yang di pancurkan dari pancuran ini cukup dingin dan segar, karena bersumber dari mata air yang tidak jauh dari lokasi pemandian. Para wisatawan yang ingin membasuh diri harus menggunakan 'kamen', sebuah kain yang di ikatkan di pinggang yang lebih mirip dengan rok panjang, kamen ini sebenarnya sudah disediakan saat di loket depan, jadi pengunjung tidak perlu khawatir mencarinya.

"Ada tiga tahapan ritual melukat, yakni kolam pertama untuk membersihkan hati, kolam kedua untuk membersihkan pikiran, dan kolam ketiga untuk membersihkan seluruh badan," terangnya.

Perempuan muda asli Bali itu pun lalu menunjuk salah satu pancuran terakhir di kolam pertama yang tidak pernah ada orang yang melakukan ritual melukat di sana. "Mengapa?" tanya kami. "Karena ada pantangannya, di pancuran terakhir itu khusus untuk mensucikan mayat, jadi orang yang masih hidup mandi di sana, kemungkinan dia tidak akan hidup lama lagi," paparnya.

Untuk sebab itu, pengunjung yang datang ke sana tidak bisa sembarangan untuk datang dan mandi di sana, karena ada aturan dan adat yang mengatur. "Sebenarnya tradisi melukat ini tidak terikat dengan aturan agama apapun, semua bisa melukat di sini. Hanya saja, harus perhatikan adat yang ada," ungkapnya.

Menurut penduduk sekitar, Tirta Empul ini sebenarnya lebih dulu ada sebelum puranya. Sayangnya tim Media BPP tidak bisa masuk ke dalam pura, karena yang boleh masuk ke dalam hanya untuk orang-orang yang mau beribadah saja. *Tour guide* cantik itu juga menjelaskan, penduduk sekitar percaya bahwa mitologi Tirta Empul ini berasal dari kisah Raja Mayadewa yang tadinya bersikap sewenang-wenang dan tidak mengijinkan rakyat untuk melaksanakan upacara-upaca-



ra keagamaan untuk mohon keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah perbuatan itu diketahui oleh

Para Dewa, maka dewa yang dikepalai oleh Bhatara Indra menyerang Mayadewa. Mayadewa kalah dan melarikan diri hingga di sebelah Utara Desa Tampak Siring. Dengan kesaktiannya ia menciptakan sebuah mata air beracun mengakibatkan pasukan Bhatara Indra yang mengejarnya gugur akibat minum air tersebut. Melihat hal itu, Bhatara Indra segera menancapkan tombaknya dan "air keluar dari tanah" (Tirta Empul). Air Suci ini dipakai untuk mengobati pasukan Bharata Indra dari kejahatan Mayadewa, yang hingga kini dipercaya penduduk lokal dan wisatawan untuk mengobati berbagai jenis penyakit.

Di akhir perjalanan Tirta Empul, kami hendak beralih ke tempat destinasi selanjutnya. Sebelum itu, di pintu keluar pengunjung harus melewati pasar tradisional yang menjajakan aneka pernak-pernik khas Bali, seperti sarung, kain, kaos, gelang atau aksesoris lainnya.

Ada banyak sekali pedagang yang menjajakan barang dagangannya di sini, jadi kalau Anda tidak mendapatkan harga murah di toko A, Anda bisa

mendapatkannya di toko B. seperti kami yang ditawari Sarung Bali, awalnya pedagang itu memasang tarif Rp 85 ribu, begitu kaki tetap melenggang pergi, si pedagang menurunkan harganya bahkan sampai Rp 10 ribu. Jauh sekali ya! So, untuk mendapatkan harga yang murah, sebaiknya pastikan dulu wajah Anda jangan terlihat berharap akan barang yang diincar. Karena harga di pasar ini bisa sampai 5x lipat lebih kalau tidak ditawar

Danau Batur Kintamani

Selanjutnya dari Tirta Empul, perjalanan kami ke Danau Batur. Perjalanan dari Tirta Empul ke Danau Batur membutuhkan waktu 44 menit. Kami memang tidak langsung ke Danau Batur, karena lebih bagus jika mengambil *spot* foto dari atas yang menyaksikan penampakan gunung dan danau Batur secara menyeluruh.

Bagi Anda yang ingin seperti itu, Anda dapat pergi ke desa Penelokan. Desa ini berada di dataran yang lebih tinggi dari pada Danau Batur Kintamani, sehingga pemandangan danau yang sangat elok dan Gunung Batur yang berdiri kokoh dapat dilihat secara jelas dan menyejukkan. *Nah*, dari lokasi ini Danau Batur terlihat seperti seperti bulan sabit di kaki Gunung Batur. Kecil namun tetap indah dan elegan.

Pilihan *spot* di atas danau menjadi menarik, karena murah meriah alias gratis. Anda hanya perlu cukup pintar-pintar saja mencari tempat untuk foto atau memakirkan kendaraan Anda. Namun jika tetap susah mendapatkannya, di desa ini juga menyediakan *view* danau yang bagus melalui hotel dan restoran. Air danau yang tenang dan berwarna biru kehijau-hijauan membuat wisatawan yang berada di dalam restoran tersebut akan merasa tenang dan damai sambil mencicipi kuliner khas Bali. Soal harga? Pastinya sebanding dengan apa yang didapatkan, meski Anda harus merogoh kocek lebih dalam karena harga makan dan menginap di sekitar sini sangat mahal.

Pura Ulun Danu Bedugul

Setelah berhasil mendapatkan beberapa foto yang bagus dari atas Danau Batur Kintamani, perjalanan selanjutnya adalah ke Pura Ulun Danu Bedugul. Pura ini mulai terkenal dari mata

uang Rp 50 ribu.

Perjalanan ke tempat ini sangat berkesan, bermodal *google map* kami harus tersesat di beberapa tempat lain dahulu dan menempuh rute yang berbeda dari kebanyakan. Kurang lebih 2 jam 30 menit, perjalanan berkelok, curam, dan landai harus kami tempuh dengan kondisi lemas, lunglai, dan bingung. Kami bahkan sempat nyasar ke restoran besar yang juga bernama Bedugul. Beruntung, tak lama kami menjumpai seseorang yang bisa memberi petunjuk di mana destinasi Pura Ulun Danu Bedugul sebenarnya.

Sesampainya di Pura Ulun Danu, kami langsung ke loket masuk untuk membeli tiket. Harga di pura ini bervariasi. Untuk wisatawan lokal dikenakan tarif sebesar Rp 20 ribu, sementara wisatawan mancanegara dikenakan tarif Rp 150 ribu.

Begitu memasuki lokasi wisata pura, pertama kali yang kami temui adalah taman yang indah dan terawat, seperti pemandangan Monas, Jakarta. Bedanya, taman yang indah dan terawat ini semakin sempurna dengan pemandangan Danau Bratan yang jernih dan indah. Saat itu juga sedang banyak kabut yang mengitari wisata pura, sehingga menambah keasrian pemandangan.

Banyak pengunjung yang datang dari rombongan anak-anak sekolah, sambil sesekali berfoto dengan uang pecahan Rp 50 ribu untuk menyandingkan tempat yang sedang dijajaknya. Mereka berpose, seolah menjadi saksi duplikasi tempat yang terkenal melalui gambar di pecahan Rp 50 ribu. Tempat ini menjadi istimewa, mana kala ada wisatawan asing yang turut berfoto dengan menggunakan uang Rp 50 ribu.

Sayangnya, kami tidak dapat masuk dalam area pura karena dikelilingi danau di sekitar pura. Untuk akses ke sana, harus melompat atau menggunakan perahu. Menurut penduduk sekitar, sebenarnya pura ini digunakan untuk upacara persembahan Dewi Danu (dewi air, danau dan sungai), agar sungai atau Danau Bratan bisa tetap mengairi wilayah sekitar. Karena danau ini, hingga kini menjadi tempat untuk irigrasi penduduk setempat. (IFR)

DIREKTUR RISET SETARA INSTITUTE, ISMAIL HASANI PENELITI HARUS MENJADI BASIC POLICY MAKING

Menjadi peneliti merupakan jalan istimewa bagi siapa saja yang ingin mengabdikan diri sepenuh hati pada ilmu pengetahuan. Sebuah riset yang baik tentu akan menghadirkan pengaruh yang baik di tengah masyarakat, terutama peneliti yang bekerja pada instansi pemerintahan. Jalan istimewa itulah yang semestinya dijalani dengan semaksimal mungkin, agar peneliti dapat menjadi roda penggerak bagi instansinya untuk menciptakan "Basic Policy Making" (pembuat dasar kebijakan).



“PRODUKTIVITAS YANG MEREKA LAKUKAN MELALUI HASIL RISET HANYA MENTOK MELALUI MEDIA ATAU JURNAL, TANPA TINDAKAN TEGAS DARI PEMERINTAH. PADAHAL LEMBAGA-LEMBAGA LITBANG PEMERINTAH SERINGKALI MEMINTA DATA DAN HASIL RISET DARI LSM-LSM MACAM SETARA INSTITUTE ATAU LEMBAGA SEJENIS.

Matahari mulai terik, menerobos seluruh celah permukaan langit dan mulai menimbulkan tetes keringat di tubuh. Jarum jam sudah menunjukkan angka jam 12 siang, namun semangat untuk berkarya dan meneliti tetap membara bagai matahari di tengah hari bolong bagi pria yang satu ini.

Ismail Hasani, pria kelahiran Subang Jawa Barat itu memang belakangan ini namanya seringkali disebut-sebut di medi masa. Hasil penelitiannya mengenai kota intoleran di beberapa tempat, membuat sebagian masyarakat terkejut. Bagaimana tidak, Ismail begitu pria kelahiran 1977 itu disapa menyebutkan, kota Metropolitan, Jakarta justru menempati posisi paling tinggi kota paling intoleran.

Di balik hasil kajian tersebut, ada nama Ismail Hasani, Direktur Riset Setara Institut yang juga merupakan dosen Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berdasarkan hasil kajiannya dan tim, setidaknya ada enam parameter yang dikur dalam riset tersebut, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan diskriminatif, tindakan nyata pemerintah kota, pernyataan pemerintah kota, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan demografi penduduk berdasarkan agama

DKI Jakarta mendapatkan skor toleransi terendah karena sepanjang November 2016 sampai Oktober 2017 setidaknya ada 14 peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Ibu Kota. Tentu hal ini menimbulkan banyak tanya, dan juga tidak sedikit pula pro dan kontra atas hasil penelitiannya. Bagaimana tidak? Ibukota Jakarta dikenal dengan tempat berkumpulnya aneka ragam budaya Indonesia. Namun menurut Ismail, sejumlah peristiwa yang ada di Jakarta belakangan ini memperlihatkan sikap intoleran di kota yang pernah dipimpin oleh Basuki Tjahja Purnama itu.

Seperti pelarangan shalat jenazah bagi pendukung calon Gubernur tertentu pada Pilkada 2016, atau sejumlah kasus persekusi yang lainnya. Selain itu, tindakan pemerintah provinsi (pemprov) yang tidak merespon atau menindak tegas aksi intoleran tersebut, dalam bentuk regulasi atau penindakan menjadi daftar DKI sebagai kota intoleran.

Sebenarnya menurut Ismail beberapa kasus masalah intoleran sebelum kejadian besar di DKI

Jakarta itu, dirinya sudah sempat memperingatkan pemerintah melalui hasil riset yang sama 7 tahun silam. "Kami dulu mencoba memetakan kota-kota intoleran pada 2010 (era Presiden SBY), waktu itu saya bilang sama Pak Presiden, bahwa ada upaya penyeragaman dari kelompok-kelompok radikal yang tidak bisa didiamkan begini saja, ternyata benar, 7 tahun silam ini terjadi, pemerintah kebingungan, dan akhirnya membuat UU Ormas yang sekarang banyak diributkan orang-orang," paparnya.

Cikal bakal intoleran tersebut lah yang dianggap Ismail sebagai kondisi genting bangsa ini. "Intoleran bisa melahirkan terorisme," tandasnya.

Dalam beberapa kesempatan, setelah memublikasikan hasil risetnya, Ismail pernah diundang di sebuah acara TV bergabung dengan ormas dan LSM lainnya, salah satunya adalah HTI (Hizbuh Tahrir Indonesia). "Di dalam acara tersebut, HTI mengklaim ada 200 ribu anggota, padahal sewaktu saya meneliti di 2010 itu sudah 300 ribu. Saya langsung todong saja pimpinan HTI-nya, pasti 10 juta ya mas. Kemudian dia baru mengaku," terang Ismail.

Dengan masa yang begitu banyak, tentu negara harus sigap mengatasi upaya penyeragaman di tengah negara beragam seperti Indonesia. Namun lagi-lagi, Ismail menyayangkan tindakan pemerintah yang lamban, mengabaikan riset, dan membiarkan hal ini terjadi sampai sesuatu yang besar terjadi. "Padahal ujung tombak kemajuan bangsa ini adalah riset," ujarnya dengan kecewa.

Penjajahan melalui riset

Rasa kecewa seperti itu seringkali dirasakan oleh Ismail dan mungkin teman-teman peneliti di lembaga riset non pemerintah. Produktivitas yang mereka lakukan melalui hasil riset hanya mentok melalui media atau jurnal, tanpa tindakan tegas dari pemerintah.

Padahal lembaga-lembaga Litbang pemerintah seringkali meminta data dan hasil riset dari LSM-LSM macam SETARA Institut atau lembaga sejenis. "Yang saya juga herankan adalah, riset pemerintah selama ini kemana? Lembaga macam Litbang apakah sudah optimal mengeluarkan *output*, kalau memang belum mari kita bekerjasama demi kemajuan Indonesia, tapi hasilnya harus

ada perubahan, jangan hanya mengeluarkan kebijakan atau regulasi baru," terangnya.

Regulasi baru yang terus diciptakan tanpa ada pengawasan dan implementasi yang baik menurut Ismail hanya akan melahirkan kegemukan regulasi, bukan solusi apapun dalam mengatasi permasalahan bangsa ini. "Bayangkan, mungkin proyek satu PP (Peraturan Pemerintah) saja anggarannya bisa 5 miliar, dan itu biasanya dijadikan proyek besar," jelasnya.

Bagi mantan TPF (Tim Pencari Fakta) kasus meninggalnya aktivis HAM, Munir itu, sebenarnya riset tidak hanya dijadikan sebagai landasan untuk membuat kebijakan. "Hal itu sebenarnya sudah menjadi pokok seorang peneliti, menjadi *basic policy making*. Tapi yang dimaksud *basic policy making* bukan semata-mata harus melahirkan kebijakan terus menerus, ada permasalahan yang sebetulnya bukan dengan menciptakan kebijakan terus menerus. Coba sekarang lihat, Presiden Jokowi mencoba merampingkan 3.143 Perda dengan membatalkannya, itu artinya negara ini sudah obesitas regulasi. Aturan yang sudah dibuat tidak berjalan sesuai dengan harapannya, peraturan menjadi tumpang tindih, atau bahkan kebijakan yang dibatalkan itu juga bukan berdasarkan riset. Nah apalagi itu! Kalau sudah demikian kemana posisi peneliti pemerintah selama ini? Tidak turut andil dalam pembuatan kebijakan, apalagi mencari permasalahan bangsa ini melalui riset, tidak heran banyak orang yang menyebut Litbang sebagai singkatan dari sulit berkembang," keluhnya sambil tertawa

Peran riset dalam perkembangan ilmu pengetahuan sangatlah penting, apalagi menurut Ismail bangsa ini sudah jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga dan negara maju. Seperti Malaysia misalnya, negara serumpun itu telah memunyai hak cipta terhadap sejarah riset obat tradisional seperti jamu dan tanaman herbal. "Di Indonesia bagaimana? Tidak ada kan? Mungkin suatu hari, ketika produksi itu habis di Indonesia, kita akan membeli jamu atau obat tradisional di Malaysia, karena mereka sudah punya hak paten sejarahnya. Mengerikan sebenarnya penjajahan melalui riset itu," tandasnya.

Selain itu, Ismail mencontohkan, penjajahan riset lainnya juga terjadi sejak dulu melalui vaksin imunisasi Indonesia yang dibiayai oleh Australia. "Coba lihat masalah vaksin itu, Australia membiayai semua itu. Efek vaksin itu kan membutuhkan jangka waktu yang lama, kalau kita sudah ketergantungan vaksin dari luar negeri bisa saja suatu hari nanti kita akan minta obat atau vaksin anti polio kita ke Australia," paparnya.

Kegelisahan terhadap penjajahan riset itu menurut pria yang pernah mengambil S2 Ilmu Hukum UGM, dan S3 di Hukum Tata Negara UGM itu merupakan tindakan preventif yang harus segera dipikirkan jangka ke depannya oleh pemerintah. Kalau terus menerus begini akan fatal akibatnya.

Sebagai Direktur Riset di Setara Institut, dirinya hanya bisa berharap, suatu hari nanti akan ada perubahan pada dunia riset Indonesia. SDM nya cukup dan berkualitas, fasilitasnya didukung, dan peneliti harus punya *passion* lebih terhadap minat membaca, menulis dan mengamati sekitarnya.

Seperti yang sudah dilakukan Ismail, ada banyak sekali serangkaian hasil riset yang telah dipublikasikannya di berbagai media dan jurnal. Jika namanya di ketik pada pencarian Google Scholars akan muncul ratusan *citation* dan hasil penelitiannya yang telah diciptakan, beberapa usulan penelitiannya juga pernah dipakai oleh pemerintah, manakala dulu rancangan pembuatan UU masih belum berdasarkan riset dan naskah akademik.

"Dulu itu kita masih mengacu pada UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana saat itu landasan riset dan naskah akademik belum diwajibkan. Namun setelah kita melakukan kajian dan berbicara dengan pemerintah (Kemenkum HAM), lahir UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," jelasnya.

Lanjutnya, sebenarnya penelitian ini bisa saja maju kalau dari pemerintah dan penelitiannya bisa bersinergi. "Pemerintah mendukung, dan penelitiannya berkualitas menjadi *Basic Policy Making* tadi," tutup pria yang juga pernah menjadi peneliti di Komnas Perempuan itu. (IFR)

Kemendagri Masih Evaluasi Anggaran TGUPP di APBD Jakarta 2018

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengevaluasi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) DKI tahun 2018. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono mengatakan, salah satu pembahasan yang tengah didalami adalah anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang melonjak signifikan dari Rp2,3 miliar menjadi Rp28,99 miliar.

“TGUPP kita lagi memikirkan apa di oke-in, apa dikurangi, apa dihilangkan sama sekali. Ini kita lihat,” ujarnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurutnya, pembahasan tersebut dilakukan lantaran santernya isu-isu miring terkait jumlah TGUPP tersebut. “Sementara belum ditemui keanehan. Hanya isu-isu aja yang muncul,” kata dia.

“Sekarang 74 pertanyaannya dibutuhkan untuk apa, ditempatkan di mana dan tanggung jawabnya seperti apa, dan deskripsinya jelas. Kalau perhitungan saya, logikanya yah kalau mau jumlah sebetulnya 45. Kenapa? Hitungannya karena pada Kabupaten dan Ibukota itu. Lima (orang) dikali 6 jadi 30, ditambah di sini 15 jadi 45. Itu idealnya,” imbuhnya.

Selain anggaran untuk TGUPP, pos lain yang juga sedang dibahas Kemendagri adalah dana hibah untuk sejumlah organisasi. Pembahasan tersebut meliputi aspek administrasi, konsistensi perencanaan daerah, dan legalitasnya.

Sumarsono mengungkapkan, Kementerian akan memeriksa kembali kesesuaian dana hibah di mulai dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja.

“Hibah regulasi sesuai enggak sesuai, karena prinsipnya evaluasi kan mensinkronkan antara dukungan perencanaan

dan dokumen budget. Dokumen anggaran harus sinkron. Yang kedua juga hal-hal yang sifatnya menjadi perhatian publik,” imbuhnya.

Dari waktu yang ditentukan, kata Sumarsono, Menteriannya masih memiliki waktu dua minggu untuk mengevaluasi APBD 2018 tersebut. Nantinya, hasil evaluasi bakal disertai rekomendasi yang harus dilaksanakan pemerintah Jakarta.

Bila Pemprov DKI tak melaksanakan rekomendasi tersebut, kata dia, maka Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa saja membatalkan APBD 2018 sehingga yang berlaku adalah APBD tahun 2017 yang sedang berjalan.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa dirinya siap menerima hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Menurutnya, hal itu adalah kewenangan Kemendagri berdasarkan amanat undang-undang dan harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah. “Kita tunggu proses, kita beri ruang dan kehormatan pada Kemendagri untuk me-review,” ungkapnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).

la juga mengatakan bahwa dirinya tak ingin berspekulasi apakah dana untuk tim tersebut akan dikurangi atau tidak. Namun, menurutnya, jumlah TGUPP di masa pemerintahannya dan Gubernur Anies Baswedan telah dipikirkan matang-matang dan direncanakan berdasarkan kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat pembangunan dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

“Tentunya keadilan ketimpangan selama ini dikeluhkan oleh masyarakat ingin perlu tim yang punya kemampuan untuk planning, doing, checking and action,” ujarnya. (TIRTO.ID)



Mendagri: Kepala Daerah Harus Tegas terhadap Ormas Anti Pancasila

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh kepala daerah harus memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk berkumpul dan masyarakat dengan membentuk partai politik atau ormas.

Akan tetapi, pemerintah daerah juga harus tegas terhadap ormas yang ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

“Kepala daerah tidak boleh menghalangi masyarakat untuk berserikat. Ormas keagamaan mau dakwah silakan, sampai geng motor juga harus diakomodasi. Tetapi kalau ada yang ingin mengubah ideologi negara, ini yang harus dicermati. Pemerintah harus tegas,” ujar Tjahjo, saat memberikan pembekalan ‘Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017’, di Aula BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan,

Rabu (6/12/2017).

Tjahjo mengatakan, sesuai ketentuan UU Ormas, setiap ormas dilarang memiliki paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Paham yang dilarang oleh pemerintah yakni ateisme, marxisme, leninisme, dan paham radikalisme lainnya yang ingin mengganti ideologi Pancasila.

Pemerintah daerah, kata Tjahjo, harus tegas dan memiliki wewenang untuk membubarkan ormas anti-Pancasila.

“Ajaran ateisme, marxisme dan leninisme harus disikat jangan diberi napas di daerah. Kalau ada ormas yang ingin mengubah ideologi kita, itu juga harus kita ingatkan dan kita bubarkan organisasinya,” kata Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan bahwa ormas berbasis keagamaan memiliki kebebasan untuk melakukan dakwah.

Namun, ormas berbasis keagamaan tidak boleh memiliki agenda yang bertentangan dengan tujuan penerintah dan dasar negara, seperti yang terjadi pada kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Dakwah silakan tapi kalau ada agenda melawan pemerintahan yang sah ya dibubarkan. Termasuk ormas yang baru dibubarkan (HTI), bukan karena dakwahnya,” kata Tjahjo. (KOMPAS.COM)



Tiga Kunci Sukses Pilkada 2018 Menurut Tjahjo Kumolo



JAKARTA-Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan ada tiga poin yang menjadi kunci agar pemilihan kepala daerah atau pilkada 2018 dikatakan sukses. Hal tersebut disampaikan Tjahjo ketika memberikan sambutan dalam rangka sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016, yang diselenggarakan Kementerian Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Selasa, 5 Desember 2017.

Menurut Tjahjo, poin pertama adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada dari tahun sebelumnya. Pada pilkada serentak sebelumnya, tingkat partisipasi pemilih sekitar 70 persen. “Target tahun depan 78 persen. Memasuki pileg (pemilihan legislatif) dan pilpres

(pemilihan presiden) 2019 sebesar 80 persen,” katanya.

Kedua, kata Tjahjo, tidak adanya politik uang dalam pilkada 2018 juga menjadi poin penting. Dia berujar undang-undang memberikan wewenang lebih kepada Badan Pengawas Pemilu untuk menindak tegas pasangan calon yang mengandalkan politik uang demi mendapatkan suara rakyat.

Poin ketiga, menurut Tjahjo, adalah bagaimana kandidat pemimpin dalam pilkada bisa beradu ide, adu program, dan adu konsep dalam membangun daerah. Kampanye dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta ujaran kebencian harus dilawan. “Pilkada memilih pemimpin daerah,” ujarnya.

Pada 2018, ada 171 daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan rincian 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota. Tjahjo mengatakan pilkada tahun depan sudah beraroma pileg dan pilpres 2019.

Tjahjo juga menyebut sebagian besar daerah yang mengikuti pilkada serentak 2018 merupakan daerah padat penduduk sehingga menjadi cerminan untuk pileg dan pilpres nanti.

“Mencerminkan 67 persen pemilih pileg dan pilpres. Dan tahapan-tahapan konsolidasi komunikasi pilkada 2018, aroma pilkada tahun depan udah aroma pileg 2019,” ucapnya. (cnn Indonesia)

Jamur Tahi Sapi, Memabukkan Bak Narkoba

Jamur *Psilocybe* sering disebut sebagai jamur tahi sapi beberapa belakangan ini banyak menghebohkan jagat maya Indonesia dengan penjualan dalam bentuk kripik jamur. Usut punya usut, ternyata jamur ini memiliki efek seperti narkoba, dapat memabukkan karena memiliki senyawa psikoaktif.

Kepolisian Daerah (Polda) Bali menangkap tiga orang penjual *magic mushroom* alias jamur dari kotoran sapi yang mengandung narkoba Golongan I. Ada tiga tersangka yang ditetapkan oleh polisi. Tersangka berinisial H bertugas mencari jamur, M alias A meraciknya, sedangkan W menjaga jamur tersebut. "Tersangka ini mencari jamur di sawah dan tanah lapang di sekitaran Renon dan Jalan Teuku Umar Barat, Denpasar," kata Sudjarwoko di Mapolda Bali.

Selanjutnya, jamur yang tumbuh di kotoran sapi itu dibersihkan lalu disimpan di lemari pendingin. Pembeli yang ingin membeli secara utuh bisa langsung datang kepada tersangka. Namun jika ingin membeli dalam bentuk olahan lainnya seperti jus, tersangka akan mengolah jamur tersebut dengan cara diblender lalu campuran minuman kemasan. "Jamur itu diblender dicampur dengan *big strawberry*. Mereka kemas dalam botol air mineral. Satu botolnya dijual seharga Rp 5 ribu hingga Rp 20 ribu, tergantung besar kecilnya botol air mineral itu," ujar Sudjarwoko.

Barang bukti yang diamankan petugas mencapai 1,16 kilogram jamur tahi sapi yang siap edar. Jamur ini memberikan efek halusinasi,

mengubah mood, serta meluapkan perasaan sedih maupun senang. Oleh karena itu, jamur ini pun digolongkan sebagai narkotika golongan I. Daya khayal yang ditimbulkan dari mengonsumsi jamur ini sangat tinggi, sehingga membahayakan si pengguna karena bisa melakukan tindakan yang berbahaya. "Yang jelas bisa merugikan dirinya sendiri, seperti melompat dari gedung tinggi kemudian melukainya diri sendiri," ucapnya.

Berdasarkan penelusuran data di BPOM sendiri, kemasan jamur yang diberi nama *Snack Good* itu tidak mempunyai izin edar Badan POM maupun nomor izin edar Dinas Kesehatan (PIRT). Kasus ini baru mencuat setelah polisi berhasil menangkap tersangka pembuat kripik jamur yang dipasarkan online tersebut.

Sementara itu, Peneliti Herbarium Bogoriense dari Pusat Penelitian Biologi di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Atik Retnowati, mengungkapkan jamur *Psilocybe* sudah digunakan untuk mengurangi depresi bagi penderita kanker. Kandungan senyawa *psilocybin* dan *psilocin* pada jamur *Psilocybe*, kata Atik, akan mengurangi depresi penderita kanker. "Di Indonesia, saya tidak pernah tahu

(manfaat untuk mengurangi depresi kanker). Saya dapat dari pustaka, karena penelitian saya memang tidak sampai ke pemanfaatannya," ujar Atik

Di dunia, jenis *Psilocybe* yang paling terkenal memabukkan adalah *P. cubensis*. Tapi, jenis ini tidak ditemukan di Indonesia. *P. cubensis* ada di Kawasan Amerika Tengah, seperti Meksiko dan Kuba. Sedangkan di Asia bisa ditemukan di India, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Sementara di Indonesia, ungkap Atik, ada tujuh dari 116 jenis *Psilocybe* di dunia. "Meksiko paling banyak, 44 jenis," lanjut Atik.

Dari tujuh jenis *Psilocybe* di Indonesia, dua jenis sudah diidentifikasi mengandung senyawa psikoaktif, yaitu *P. subaeruginacens* dan *P. aeruginromaculans*. "Cara membedakan fisiknya, akan berubah menjadi kebiruan kalau dilukai tudungnya, ini karena mengandung senyawa *psilocybin* dan *psilocin*," jelas Atik.

Diketahui, pada umumnya secara morfologi warna tudung buah jamur *Psilocybe* berwarna cokelat. Selain pada kotoran hewan, *Psilocybe* juga bisa hidup di lumut, ranting, daun, kayu yang busuk. (IFR/Diolah dari berbagai sumber)



Pertolongan Pertama pada Bau Mulut Saat Tak Sempat Gosok Gigi

Untuk menjaga aroma napas kita selalu segar, tentu kita harus rajin membersihkan mulut. Bahkan, tidak sedikit yang selalu membawa sikat gigi serta odol kemana pun untuk menghindari bau napas tidak segar.

Namun sayangnya, cara tersebut tidak praktis. Ada beberapa cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah bau mulut, yaitu;

Permen mint tanpa gula

Permen yang menyegarkan adalah solusi sementara saat bau mulut. Menurut Tripti Mysman, dokter gigi dari Minneapolis, permen mint memang tidak menghilangkan bakteri penyebab bau mulut, tetapi setidaknya bisa menyegarkan napas sampai kita sempat menyikat gigi.

Pilih permen tanpa gula. Mengapa? Karena bakteri di mulut mendapat makanan dari gula makanan yang kita asup, lalu menghasilkan asam. Nah, asam ini bukan hanya merusak enamel gigi tapi dalam jangka pendek membuat bau napas menjadi masam.

Makan buah

Meski buah-buahan memiliki gula alami, tetapi mengunyah buah bisa menghambat aktivitas bakteri dalam mulut. Misalnya saja buah apel yang mengandung polifenol dan akan menekan bakteri dan mengurangi amonia dalam mulut.

Buah-buahan yang kaya vitamin C, seperti jeruk, stroberi, atau anggur, juga akan menghasilkan lingkungan yang membuat bakteri sulit berkembang biak.

Kerok lidah

Jika tidak membawa sikat gigi, kemungkinan besar kita pun tidak membawa alat pengerok lidah juga. Tapi, seperti makanan tertentu yang bisa menyegarkan napas, ada alat sehari-hari yang juga

berguna untuk membersihkan lidah, salah satunya sendok.

Manfaat mengerok lidah adalah menyingkirkan bakteri. Alat pengerok lidah memang ideal, tetapi sendok bisa memiliki hasil yang hampir sama bagusnya. Kerok lidah perlahan-lahan dari bagian atas ke bawah.

Minum air

Ini adalah solusi mudah yang sering diabaikan. Bakteri mulut bersifat anaerobik, yang berarti akan tumbuh subur dalam kondisi kering.

Makanya jangan heran jika pagi hari napas akan berbau tidak enak. Minum air akan menyeimbangkan lagi lingkungan dalam mulut dan

juga menyingkirkan sisa makanan yang tersangkut di gigi.

Yogurt

Pilihlah yogurt yang tidak ditambahkan gula. Probiotik dalam yogurt akan menurunkan sulfat hidrogen yang dihasilkan bakteri. Sulfat hidrogen adalah salah satu komponen yang memicu bau mulut. (IFR/Tabloid Nova)





Ayat-Ayat Cinta 2
Sutradara: Guntur Soehardjanto
Pemain: Fedi Nuril
 Tatjana Saphira
 Chelsea Islan
 Dewi Sandra
 Pandji Pragiwaksono
Produser: Manoj Punjabi, Dhamoo Punjabi
Produksi: MD Pictures
Tayang: 21 Desember 2017
Durasi: 102 menit



Ketulusan Cinta Fahri & Sarat Nilai Toleransi

Ayat-Ayat Cinta 2 merupakan sekuel dari film sebelumnya *Ayat-Ayat Cinta* yang sempat menghebohkan jagat perfilman Indonesia pada 2008. Film itu sukses mencapai 3,6 juta penonton dan mampu menandingi penonton film *Hollywood* terlaris di Indonesia, *Titanic*. Berbeda dari cerita sebelumnya yang mengisahkan cinta segitiga antara Fahri dengan Aisha dan Maria, Film garapan MD Picture ini masih bercerita tentang Fahri Abdullah (Fedi Nuril) namun dengan latar dan peran yang berbeda.

Setelah memutuskan keluar dari Mesir, Fahri dalam film ini bukan lagi seorang mahasiswa, namun ia dikisahkan sebagai seorang Dosen di University of Edinburgh, Skotlandia. Ia ditemani asistennya Hulusi (Pandji Pragiwaksono). Fahri hidup tanpa Aisha. Kisah asmaranya bersama Aisha harus berakhir. Aisha pergi bersama salah satu teman wanitanya seorang jurnalis ke Palestina. Sejak saat itu Fahri tidak pernah

lagi mendengar kabar tentang Aisha. Namun Fahri tetap teguh menunggunya dan yakin Aisha kembali.

Kenyataan bahwa istrinya menghilang, membuat Fahri nelangsa dan putus asa. Kesedihan yang coba ia atasi dengan kesibukannya sebagai seorang dosen dan juga pengusaha sukses di kota tersebut. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menenggelamkan diri dalam kesibukan pekerjaan, penelitian, mengajar, dan juga bisnis.

Fahri seringkali dihadapkan pada persoalan tetangga-tetangganya yang beragam. Ada nenek asal Yahudi, Catarina (Dewi Irawan) yang sedang mengalami permasalahan dengan anak tirinya. Ada juga Keira McGills (Chelsea Islan) seorang pemain biola berbakat yang sangat membenci Fahri, karena dianggap sebagai teroris yang telah menyebabkan kematian ayah mereka akibat bom di London.

Fahri mencoba terus menjalankan amanah Aisha agar dia bisa membantu orang-orang di sekelilingnya. Niat baik Fahri ini sering kali malah membuat salah paham dan menyeret ke persoalan yang lebih rumit dan membahayakan hidupnya. Kehidupan Fahri menjadi

semakin rumit ketika hadir Hulya (Tatjana Saphira) keponakan Aisha yang sekarang sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik.

Hulya yang ceria dan dinamis, menunjukkan ketertarikannya pada Fahri. Hulya bersedia menggantikan peran Aisha dalam kehidupan Fahri. Fahri ragu untuk membuka hatinya bagi kehadiran Hulya, itu sama saja dia mengakui bahwa Aisha sudah meninggal. Fahri masih berharap, setiap malamnya, Aisha kembali muncul dalam hidupnya. Semua mendukung Fahri melanjutkan hidupnya bersama Hulya, termasuk Sabina (Dewi Sandra) seorang perempuan terlantar berwajah cacat yang ditampung Fahri untuk tinggal bersama mereka. Sabina yang sudah dianggap saudara oleh Fahri, ternyata tidak saja membantu mengurus rumah Fahri, tapi juga mampu membuat Fahri melanjutkan hidupnya.

Nilai toleransi

Menarik, karena film yang diangkat dari novel dengan penulis yang sama yakni Habiburrahman El Shirazy ini, tidak hanya bercerita soal ketulusan cinta antara Fahri dan Hulya, namun

dalam trailer filmnya yang sudah dirilis MD Picture berdurasi kurang lebih dua menit baru-baru ini, film tersebut menunjukkan ketulusan cinta sesama manusia lintas bangsa. Nilai toleransi menjadi muatan film ini layak ditonton. Fahri yang dalam cerita sebagai seorang muslim, hidup bertoleransi dengan tetangga yang memiliki agama berbeda, bahkan ketika tetangga yang selalu ia tolong membenci dirinya dan agamanya.

Arti penting toleransi juga semakin kentara, karena setiap orang yang dimunculkan dalam trailer film ini lebih kuat meskipun diperankan orang ketiga. Seperti nenek Catarina, seorang Yahudi yang sering dibantu Fahri hingga meninggal, Jason yang dibiayai sekolah bola oleh Fahri dan akhirnya menjadi pemain sepak bola yang sukses dan masuk Islam, dan Keira yang dibiayai Fahri di sekolah biola hingga menjadi juara dunia. Yang tak kalah penting adalah tokoh antagonis dari novel ini yang tak lain adalah Baruch.

Latar film yang berlokasi di dua negara yaitu Skotlandia dan London membuat sinematografi film semakin *epic*, terlebih film memunculkan lokasi-lokasi

strategis dan bersejarah di dua negara tersebut. Jika dalam novel *Ayat-Ayat Cinta 2*, pembaca dibawa berimajinasi seperti di berada di beberapa kota yang diceritakan, maka dalam filmnya nanti, penonton akan dibawa melangkah jauh ke Eropa sekaligus merasa menjalani skenario yang ditampilkan sutradara.

Nilai toleransi yang dimunculkan dalam film ini semakin relevan di tengah menjamurnya isu-isu yang menjurus pada intoleransi, serta miskinnya wahana untuk mencetak nilai-nilai toleransi saat ini. Film ini diharapkan menjadi medium yang efektif dalam memberikan pengaruh moralitas di masyarakat. Khususnya di kalangan anak-anak muda yang labil karena pengaruh gegap gempita teknologi informasi dan serbuan informasi yang tidak berimbang. Film-film yang mengangkat tema toleransi layak disemarakkan di tengah serbuan kisah-kisah skandal selebritas, sinetron *picisan*, *reality show* murahan, serta kegemparan kabar buruk dunia politik.

Film ini rencananya akan tayang 21 Desember 2017, layak ditunggu....

MENDALAMI PANCASILA MELALUI KISAH KETELADANAN

Buku yang ditulis oleh Yudi Latif mengenai *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan* adalah karya yang dapat menentramkan kondisi Indonesia saat ini yang dihiasi dengan disintegrasi bangsa, perpecahan internal berbau SARA. Buku ini bisa dikatakan sebagai kelanjutan buku sebelumnya *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Dalam buku sebelumnya *Negara Paripurna*, Yudi memperlihatkan pergulatan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila, sebagai tatanan baru untuk Indonesia yang modern. Ia menunjukkan betapa pemikiran para pendiri bangsa mampu menyelami pandangan masyarakat Nusantara di masa lalu, sehingga mampu menciptakan Indonesia sebagai bukan *fotocopy* dari negara mana pun. Dalam buku ini, Yudi kembali membahas mengenai pentingnya Pancasila dalam praktik kehidupan.

Yudi membagi buku ini ke dalam lima pokok bahasan di antaranya pengamalan ketuhanan, pengamalan kemanusiaan, pengamalan persatuan, pengamalan kerakyatan, dan pengamalan keadilan. Kelima bahasan yang dituturkan sarat makna sekaligus menjadi konsep yang bisa memberi manfaat bagi keutuhan bangsa.

Buku ini diuraikan dengan kisah keteladanan para tokoh yang mewakili segala keragaman Indonesia. Lewat buku ini Yudi menyajikan satu model pembelajaran Pancasila lewat kisah. Dengan begitu akan terjadi proses pendalaman penghayatan dan pengarusutamaan kisah-kisah teladan dalam kesadaran politik. Sama halnya sejauh ini kisah-kisah keteladanan banyak digambarkan lewat cerita fiksi, yang memengaruhi kehidupan, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi, dan bahkan mengubah dunia.

Sejalan dengan konsep Pancasila, Yudi memulai Bab dengan urgensi ketuhanan dalam mempertahankan keberagaman internal bangsa mulai dari suku, agama, pendapat serta saling menghormati dan memandang, perbedaan adalah hal yang positif, yang dilakukan para

tokoh teladan seperti Soekarno, Hamka, Mohammad Hatta, Ni Wayan Gedong dan sebagainya. Menurut Yudi, Sila Ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Pada bab dua pengamalan kemanusiaan masih dikisahkan dengan para tokoh teladan dengan visi kebangsaan yang humanis, memiliki komitmen besar menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia berdasarkan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak asasi manusia. Yudi mengisahkan para pendiri yang telah mewariskan kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal.

Bab selanjutnya menceritakan kerelaan berkorban para tokoh bangsa yang selalu mengutamakan kepentingan umum, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mencintai nusa bangsa menurut Yudi harus tercermin dalam semangat persatuan dalam keragaman serta penuh kekeluargaan, dan semangat gotong royong yang positif dan dinamis.

Bab keempat Yudi mengisahkan demokrasi oleh para pendiri bangsa



Judul : Mata Air Keteladanan Pancasila dalam Perbuatan

Penulis : Yudi Latif

Penerbit: MIZAN

Terbit : November 2017

Harga : Rp 125.000

merupakan hal yang paling mungkin untuk dipilih. Pasalnya, demokrasi merupakan cara mencintai sesama manusia dengan menghormati manusia sebagai subjek yang berdaulat. Selanjutnya di bab terakhir Yudi berbicara potret kepemimpinan. Menurut Yudi seorang pemimpin harus memiliki kepedulian terhadap permasalahan bangsa. Seberat apapun permasalahan akan dapat diatasi oleh pemimpin bermental aparaturnya sehat, dan konsisten dalam menjalankan demokrasi. Dengan begitu aksi ekstremisme dapat diminimalisasi. Menurutnya kecerdasan bukan tolok ukur seseorang berhasil memimpin, tetapi aspek yang lebih penting adalah jiwa yang sehat.

Sebagai orang yang aktif di Nahdlatul Ulama (NU), Yudi tidak mengesampingkan keterlibatan NU yang mampu meminimalisasi dan menjadi penengah ketika terjadi guncangan SARA. NU menyadari, Indonesia dengan multi agama wajib menghargai dan mencintai serta kerelaan bergotong royong penuh toleransi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Ia mengutip tokoh NU Abdurrahman Wahid (Gusdur) yang mengatakan selama masyarakat di bawah naungan Pancasila, wajib memperoleh perlakuan yang sama.

Sisi kelemahan buku ini adalah pengulangan sejarah yang sudah dikisahkan di awal bab. Istilah asing dan penjelasan lebih lanjut dibuat dalam halaman akhir bab. Tidak diberikan *footnote* seperti halnya buku *Negara Paripurna*. Hal ini bisa memunculkan beragam persepsi dari para pembaca.

Terlepas dari itu, karya anak bangsa yang berharga ini memang layak menjadi konsumsi penengah bagi masyarakat Indonesia yang kerap kali gamang, dan risau dengan jati dirinya. Buku ini membawa masyarakat untuk kembali ke Pancasila, sebagaimana mengamalkan nilai-nilai luhur untuk mewujudkan demokrasi yang ideal, tanpa doktrinasi, intimidasi, dan anarkis, serta bersama-sama saling memperkuat toleransi menuju Indonesia yang humanis dan harmonis. (Ray Septianis Kartika/MSR)



Nasihat Sang Budha

Oleh: Hari Taqwan Santoso

Manusia hina, belum pernahku kuajarkan dharma dalam banyak cara, demi lunturinya gairah dan bukan gairah, demi belenggu nafsu dan bukan pembebasannya, demi pembebasan dari ketergantungan dan bukan ketergantungan?

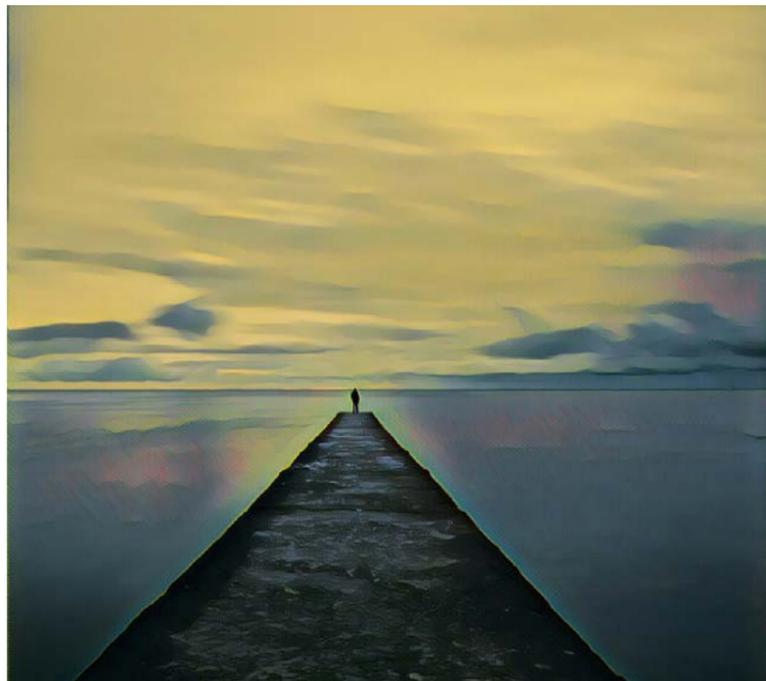
Kata-kata Sang Buddha menggema di telinga Andre bersama dengan mengumpulnya kesadaran ketika bangun dari tidur. Andre mengerjap-ngerjap, kepalanya sedikit pening karena sisa efek minuman keras semalam. Di atas ranjang itu tubuhnya terbaring dalam keadaan tanpa pakaian, tapi sebagian tertutupi oleh selembur selimut yang menebar bau khas. Malas bangun, Andre menyelipkan kedua telapak tangannya di antara kepala dan bantal. Kepalanya sekarang mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan dengan posisi itu matanya menerawang, menatap langit-langit.

Andre masih tidak percaya dengan perbuatan yang telah dilakukannya semalam. Bercinta dengan pacarnya untuk pertama kali di bawah pengaruh minuman keras. Sebenarnya semalam ia masih sadar dan bisa memilih untuk tidak melakukannya, meskipun pilihan itu sulit diambil karena badannya lebih panas dari biasanya. Akan tetapi pada kenyataannya, nafsu yang terlampaui menggebu dapat mengalahkan *dharma*-nya sehingga perbuatan itu pun terjadi.

Banyak laki-laki yang tidak ragu untuk “menerkam” pacarnya begitu ada kesempatan muncul, tapi Andre bukan orang seperti itu. Ia bukan lelaki hidung belang. Ia memang mencintai perempuan bersuami yang berna-

ma Tamara itu. Cinta dalam bentuk keinginan untuk melindungi dan mengayomi, bukan semata-mata untuk mengejar kenikmatan badaniah. Namun terkadang nafsu begitu pandai menyusup. Semalam, cinta itu berubah bentuk ketika mereka hanya berdua saja. Keinginan untuk melindungi dan mengayomi berubah menjadi birahi.

Bagi Andre, bercinta dengan Tamara adalah perbuatan aneh, karena dia telah bersuami. Itu bukan perbuatan yang benar. Seandainya saja semalam Andre tidak mabuk. Sayangnya, waktu tidak pernah berjalan mundur meski sesaat. Apa yang telah terjadi akan tetap menjadi kejadian yang telah terjadi. Orang memang tidak dapat kembali ke masa lalu untuk menghapus hal-hal yang keberadaannya tidak dia inginkan.



Bagaimanapun, bagi Andre pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan tidak seharusnya dinodai meskipun ia telah rapuh hingga ke tingkat terburuk sekalipun. Ya, Tamara dan suaminya bukan pasangan yang harmonis. Mereka sering bertengkar hebat. Adu mulut adalah suara yang biasa terdengar dari rumah Tamara setiap pagi. Tidak ada kekerasan secara fisik dalam setiap pertengkaran itu, hanya kata-kata. Sayangnya, justru kata-katalah yang mampu memberikan luka dalam pada orang tanpa harus mengeluarkan darah.

Api pertengkaran begitu mudah tersulut hanya karena hal-hal sepele. Pagi hari sebelumnya, Tamara membuatkan teh untuk suaminya seperti yang dia lakukan setiap hari sebelum laki-laki itu berangkat bekerja. Ia mungkin lupa takaran gula bagi suaminya dan tehnya terlalu manis. Hanya karena itu saja, suami Tamara lalu menuduhnya tidak perhatian pada kesehatan suami. Bagaimana kalau nanti kena kencing manis atau bahkan diabetes karena terlalu banyak mengonsumsi gula? Padahal jika tehnya terlalu manis, dia tidak perlu minum hingga teguk kedua tanpa komplain sejauh itu. Gara-gara gula yang terlalu banyak itu, sekali lagi, adu mulut menggema dari rumah Tamara sebagaimana yang terjadi hampir setiap pagi. Suami Tamara membanting pintu keras-keras sebelum meninggalkannya pergi.

“Begitulah,” tutur Tamara pada Andre semalam. Ia yang usianya beberapa tahun lebih muda dari perempuan itu hanya terdiam. Soal rumah tangga, Andre tidak pernah punya pengalaman. Jangankan istri, pacar saja tidak pernah punya, sebelum akhirnya dia dekat dengan Tamara. Andre tidak tahu apa-apa soal cara menjaga keharmonisan suatu hubungan dan Tamara sering mengeluhkan tingkah laku suaminya yang melampaui batas itu padanya. Jadi dia lebih banyak menjadi pendengar dari pada komentator. Kebersediaannya untuk menjadi pendengar itulah, yang justru menjadikan keduanya semakin dekat.

“Bagaimanapun perbuatan ini salah,” katanya dalam hati. Dia adalah seorang penulis amatir. Gurat-gurat kegelisahan tampak memenuhi wajahnya saat itu. Sehari ia tidak keluar dari kamar kosnya karena merenung, menyesali apa yang telah ia lakukan. Ia telah meniduri istri orang lain. *Yah*, meskipun ia dan kekasih gelapnya itu sama-sama suka dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya, sebab si perempuan telah diperlakukan dengan sangat buruk oleh suaminya, tapi tetap saja batinnya memberontak. Salah! Jiwa manusia suci yang semula bersembunyi jauh di kedalaman jagad batinnya, tiba-tiba saja menggugat. Batinnya bersikukuh, perbuatan yang telah dilakukannya itu nista, sebuah dosa besar.

Dia malu pada dirinya sendiri karena *dharma*-nya terlalu mudah runtuh. Fakta bahwa ia menuruti nafsunya untuk melakukan perbuatan itu menunjukkan, jiwanya masih lemah. Ketiadaan paksaan dalam perbuatan serong itu tidak bisa ditoleransi. Alasan bahwa si perempuan tidak menemukan keharmonisan dalam rumah tangganya juga tidak menjadikan dia boleh menidurinya begitu saja.

Dia menyesali perbuatan itu. Berhari-hari dia merenung. Kopi dan rokok yang biasanya dia gunakan untuk membuat syaraf-syaraf otaknya rileks, kini seolah kehilangan khasiatnya. Bercangkir kopi telah dia minum dan berbatang rokok telah dia habiskan dalam sehari selama beberapa hari terakhir, tapi tidak ada yang mampu menghapus kegelisahan dari dalam hatinya. Kegundahan selalu membayangi langkahnya kemanapun dia pergi. Penyesalan adalah kawan baru yang seolah tak mau meninggalkannya walau sesaat.

...

Manusia hina, belum pernahku dalam banyak cara kuajarkan padamu untuk meninggalkan kenikmatan sensual, memahami kesan-kesan sensual, menundukkan rasa haus sensual, menghancurkan khayalan-khayalan sensual serta meredakan demamnya? Manusia hina, akan lebih baik jika kemaluanmu tersangkut dalam mulut ular berbisa daripada masuk ke lubang perempuan. Akan lebih baik jika kemaluanmu tersangkut dalam tungku penuh bara yang menyala...

“**KEGUNDAHAN SELALU MEMBAYANGI LANGKAHNYA KEMANAPUN DIA PERGI. PENYESALAN ADALAH KAWAN BARU YANG SEOLAH TAK MAU MENINGGALKANNYA WALAU SESAAT.**”

Sekali lagi, kata-kata itu terngiang. Andre bukan pengikut Buddha yang taat, agamanya pun bukan Buddhisme. Namun pada suatu waktu, ia pernah membaca potongan *Patimokkha*, tentang kritik Sang Buddha terhadap seorang biarawan yang melanggar sumpah membujangnya. Andre hampir sama sekali lupa dari mana ia mendapatkan tulisan itu. Kalau tidak salah dari artikel di koran yang dia temukan di sebuah halte ketika sedang menunggu bis kota, atau mungkin juga dari laptop temannya yang sedang menyala tapi ditinggal besamanya sewaktu masih kuliah. Entahlah! Akan tetapi Andre jelas-jelas pernah membacanya. Sebagian isinya lalu masuk ke dalam relung-relung alam bawah sadarnya. Sekarang, kata-kata itu menyeruak keluar untuk suatu alasan.

Menyusul kata-kata sang Buddha itu, bayangan wajah Tamara semalam muncul. Andre dapat mengingat dengan jelas, Tamara terlihat sangat tertekan ketika sedang menceritakan kejelekan suaminya. Seolah ia telah mencapai batas kesabaran yang mampu diberikan oleh seorang istri. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh, tapi Andre tahu bahwa di dalam, perempuan itu sedang menangis hebat. Selain Andre, sebotol *Whisky* menjadi teman bagi Tamara untuk menumpahkan segala masalah. Satu atau dua teguk

membuat syarafnya rileks, selebihnya membuat ia semakin lupa. Andre masih setia mendengarkan, dia tidak dapat berkata-kata, lagi pula tidak ada yang dapat dikatakannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menemani Tamara minum. Dia ikut-ikutan minum, dan dari sanalah semuanya dimulai.

Berbeda dari tubuh Tamara yang lebih terbiasa menyerap minuman keras, tubuh Andre memberikan reaksi hebat. Sedikit saja dia minum, kepalanya langsung pusing. Dunia di sekelilingnya mulai berputar dan ia lupa tentang detail bagaimana akhirnya mereka berdua bisa bercinta di atas ranjangnya. Tentang siapa yang punya gagasan dan menggodanya dengan genit lebih dulu, Andre tak bisa mencapai informasi itu dalam otaknya seolah ada tembok tebal yang tak bisa ditembus. Akan tetapi samar-samar ia ingat jemarinya melucuti pakaian Tamara satu persatu. Sebuah ingatan yang tidak cukup, berupa kilasan-kilasan adegan terputus-putus tapi cukup untuk menyusun cerita yang runtut.

Smartphone Andre berbunyi. Nadanya khas, ia langsung tahu bahwa dari seberang Tamara mengirim pesan. Semalam sangat menyenangkan, terima kasih Sayang. *Kapan-kapan lagi ya.* Andre mengembangkan senyum kecut disertai desah pendek setelah membaca pesan yang pada bagian akhirnya dibubuhi *emoticon* cium jauh itu. Ia lega, meski tidak banyak membantu setidaknya dia dapat meringankan beban orang yang dicintainya. Akan tetapi Andre juga sekaligus menyesal. Bagaimana pun, rasanya perbuatan itu masih tidak dapat dibenarkan.

Sambil mengecek pesan dari Tamara, Andre juga melihat jam yang tertera di layar *smartphone*-nya. Pukul 08.00 adalah waktu ketika ia seharusnya sudah berada di kelas sebuah lembaga bimbingan untuk memberikan les matematika kepada sepuluh orang murid. Andre terhenyak. Ia bergegas menuju ke kamar mandi. Wajah Tamara dan segala masalah yang datang bersamanya pun ditepisnya sesaat. Pikiran-pikiran yang berlalu lalang dalam kepala Andre sekarang berubah, dari perempuan itu ke cara agar dia sampai ke lembaga bimbingan tempat dia mengajar secepat mungkin. Untungnya kelas milik lembaga itu terletak tidak jauh dari rumahnya, hanya lima menit jalan kaki. Andre yakin ia bisa sampai ke kelas dalam lima belas menit.

"Kebiasaan orang-orang di sini adalah memberlakukan jam karet. Itu sebenarnya kebiasaan buruk, tapi tidak bisa di-

mungkiri, karena keberadaannya aku beruntung saat ini. Yang dibutuhkan oleh pengajar les yang telat hadir di kelas lima belas menit adalah permintaan maaf dan semuanya beres. Tidak akan ada pemotongan gaji," kata Andre dalam hati. Ia mulai membasuh kepalanya dengan air dingin ketika sekali lagi kata-kata Sang Buddha mulai kembali menggema.

Manusia hina, belum pernahkah...

"Maaf Sang Buddha..." Andre menyela benaknya sendiri. "Tidak ada tupai yang tak pernah jatuh, selihai apapun dia melompat di antara dahan-dahan pohon. Pun manusia. Tidak ada orang yang benar-benar suci. Tapi aku mengaku telah melakukan perbuatan yang salah, lain kali aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak akan pernah," katanya dengan hati mantap dan tekad yang bulat.

Tidak diragukan lagi bahwa Andre mencintai Tamara yang sayangnya adalah istri orang itu. Namun ia akhirnya setuju dengan hati kecilnya sendiri, bahwa bercumbu dengan istri orang lain adalah perbuatan nista tidak peduli serapuh apapun rumah tangga mereka dan meskipun dilandasi rasa suka sama suka.

...

Ia, yang seorang penulis amatir itu melihat sekeliling. Tiba-tiba matanya tertuju pada sebuah novel yang baru selesai dibacanya beberapa hari yang lalu, IQ84 karya Haruki Murakami. Adegan demi adegan dalam novel tersebut membanjiri kepalanya dan bersamaan dengan itu ia mendapatkan gagasan bahwa untuk meringankan bebannya, ia akan mengukui perbuatannya pada dunia tidak secara langsung. Ia akan membuat sebuah cerpen yang mengisahkan kesalahan karena telah melakukan perbuatan tersebut. Ia berharap dengan menuliskan cerita yang didasarkan pada kisah nyatanya, jiwanya akan merasa lebih tenang. Ia lalu mengambil inspirasi dari novel Murakami itu.

"Yep, nama tokoh utama dalam cerpen ini adalah Andre, dan aku akan mengawali cerita dengan kata-kata Sang Buddha," katanya girang.

Samar-samar, jauh di kedalaman lubuk hatinya, raut wajah damai Sang Buddha sedang mengembangkan senyum.

Samar-samar, jauh di kedalaman lubuk hatinya, raut wajah damai Sang Buddha sedang mengembangkan senyum.

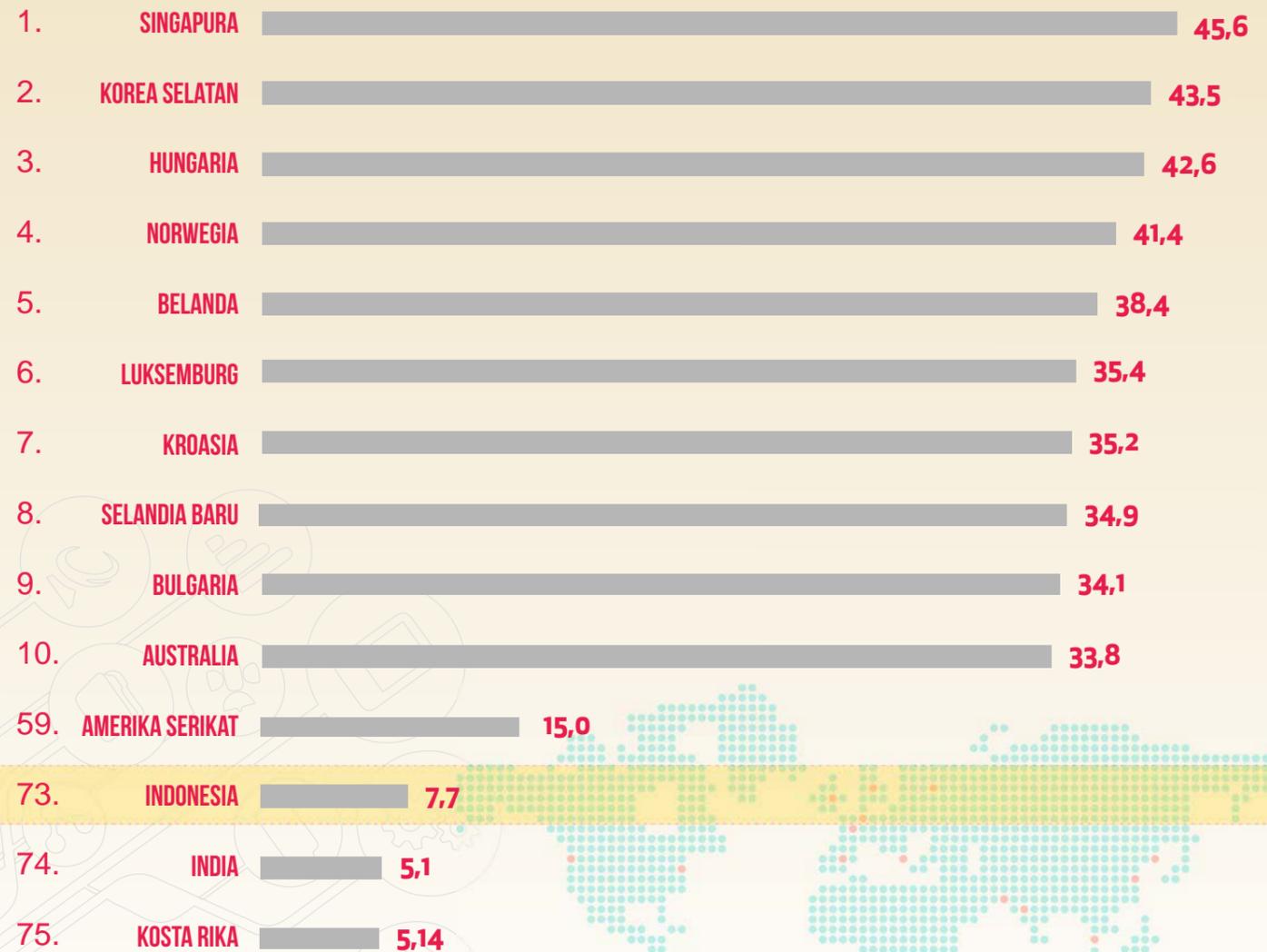
Kos Don Juan, 09 September 2017

TIDAK ADA TUPAI YANG TAK PERNAH JATUH, SELIHAI APAPUN DIA MELOMPAT DI ANTARA DAHAN-DAHAN POHON. PUN MANUSIA. TIDAK ADA ORANG YANG BENAR-BENAR SUCI. TAPI AKU MENGAKU TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG SALAH, LAIN KALI AKU TIDAK AKAN MELAKUKANNYA LAGI

KONEKSI PALING NGEBUT

AMERIKA SERIKAT boleh bangga menjadi pemimpin teknologi di dunia. Negara ini punya Apple, Alphabet, IBM, Amazon, dan Microsoft yang telah mengubah dunia menjadi lebih mudah dengan digital. Namun nyatanya, dalam koneksi 4G, yang bisa diukur dengan kecepatan mengunduh, negeri ini terbelakang. Kecepatan *download* 14,99 Mbps hanya sepertiga kecepatan pengguna perangkat seluler di Singapura. Kehebatan AS berada di urutan ke-59 dalam urutan global. Indonesia di posisi ketiga terbawah di atas India dan Kosta Rika.

KECEPATAN RATA-RATA AKSES INTERNET 4G PADA KUARTAL PERTAMA 2017 (MBPS)



Opini Joko Tri Haryanto

MENGHUKUM PERUSAK LINGKUNGAN

Pemerintah baru saja memenangkan gugatan terhadap PT Waringin Argo Jaya (WAJ) yang dianggap bertanggung jawab atas kebakaran hutan atas lahan perseroan di wilayah Sumatera Selatan pada 2015 silam. Sebagai ganti rugi atas biaya pemulihan lingkungan, PT WAJ diwajibkan membayar lebih dari Rp 466 miliar, masih lebih kecil dibandingkan tuntutan sebesar Rp 754 miliar. Dalam gugatannya, pemerintah yang diwakili Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggunakan pasal 88 dari UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 88 tersebut merupakan bentuk pasal *Strick Liability* yang berbunyi Setiap orang yang tindakannya, usahanya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Perkara ini juga bukan yang pertama kalinya. Beberapa waktu yang lalu, akibat gerah dengan sikap para Perusahaan Pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang menelantarkan areal tambang mereka, pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) tentang Kewajiban Peningkatan Tahap Kegiatan bagi KK dan PKP2B. Tujuannya jelas menata kembali industri pertambangan melalui peningkatan kepedulian terhadap areal pertambangan. Jika memang tidak mampu mengelola, maka areal pertambangan tersebut wajib diserahkan kembali ke pemerintah.

Pengesahan kebijakan tersebut kemudian me-

ngundang banyak simpati dari beberapa kalangan. Sudah menjadi rahasia umum jika operasionalisasi pasca-tambang sering kali menjadi hal yang terabaikan. Padahal dampak kerusakan yang ditimbulkan, khususnya persoalan sosial dan kerusakan lingkungan justru sangat merugikan. Akibatnya di banyak kasus, lokasi-lokasi bekas tambang tersebut bukannya memberikan kemanfaatan tetapi justru menimbulkan petaka dan bencana.

Seharusnya pemerintah dapat memberikan sanksi yang lebih tegas kepada perusahaan tambang tersebut, bukan hanya sekedar ultimatum pengambil alihan lokasi tambang semata. Toh perangkat regulasi serta institusi penuntut juga sudah mendukung baik dari sisi regulasi lingkungan maupun peraturan di bidang pertambangan migas itu sendiri. Apalagi Pemerintah beberapa periode yang lalu juga sudah memiliki kisah sukses terkait penuntutan perusahaan atas dakwaan pengrusakan lingkungan.

Seperti sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) juga memutus perkara sengketa pengrusakan hutan

dengan penuntut utama pemerintah melalui KLHK atas PT. Selatnasik Indokwarsa dan PT. Simbang Pesak Indokwarsa. Dalam dakwaannya, MA memenangkan gugatan pemerintah dan menghukum ke-2 perusahaan tersebut dengan denda sebesar Rp32 miliar atas kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan akibat operasional tambang pasir di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung.

Kedua perusahaan itu juga menimbun kawasan pesisir Pulau Belitung hingga mencorok ke pesisir laut sepanjang 1,7 km dengan lebar kurang lebih 20 km, yang difungsikan sebagai dermaga dan jalan akses ke lokasi penambangan. Dalam gugatannya, Menteri LHK menyebutkan adanya mekanisme penggalian dan pengerukan tanah

sedalam 7 hingga 13 meter, lalu diangkut dengan truk besar untuk dilakukan proses pencucian dan penyaringan pasir kwarsa maupun pasir bangunan. Usai dikeruk, bekas galian tersebut dibiarkan begitu saja dan mengakibatkan struktur bentang alam pada hutan lindung rusak berat.

Optimalisasi UU P3H

Meski ada beberapa pihak yang kemudian mencoba membawa Pasal 88 tersebut dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), namun tidak sedikit yang mengapresiasi putusan tersebut. MA bahkan diyakini sudah mulai berjalan di arah kebenaran, meskipun sejauh ini nilai denda yang dikenakan masih jauh dari tingkat kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkan. Putusan tersebut juga tercatat sebagai salah satu *milestone* dalam peradilan lingkungan di Indonesia, karena terlalu banyaknya bandit-bandit dan maling-maling perusak lingkungan yang masih bebas tak tersentuh hukum di Indonesia.

Dalam kacamata penulis, sekecil apapun prestasi yang ditorehkan para Hakim Agung dalam kasus ini, dampak psikologis yang dihasilkan harusnya lebih besar, khususnya bagi para perusak lingkungan. Meskipun belum ada jaminan konsistensi putusan, secercah harapan akan adanya keadilan di Indonesia diharapkan muncul. Ke depannya, pemerintah diharapkan menjadi lebih aktif dan agresif dalam menggugat berbagai sengketa lingkungan demi terciptanya aspek pembangunan berkelanjutan yang lintas generasi.

Terlebih, sejak tahun lalu pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) sebagai pengganti UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU P3H ini disusun dengan pertimbangan utama hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945.

Selain itu, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi

kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Dalam UU P3H tersebut juga disebutkan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga untuk pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Regulasi yang ada sekarang dianggap belum mampu dan tidak memenuhi upaya dalam menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi sehingga pemerintah dianggap perlu membentuk Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H).

Berkaca kepada kasus gugatan pemerintah atas perusahaan perusak lingkungan tersebut, ada hal yang cukup menarik jika dikaitkan dengan ketentuan mengenai Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (LP3H) yang wajib dibentuk Presiden. Presiden adalah penguasa tertinggi atas kedaulatan hukum di Indonesia, sehingga hanya dengan kepemimpinan seorang Presiden yang betul-betul mau menjalankan perannya, bukan hanya menjadi simbol semata, seluruh upaya penyelamatan lingkungan dapat ditegakkan. Namun demikian UU P3H juga memberikan ruang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya mencegah dan memberantas perusakan hutan.

Kondisi tersebut didasarkan fakta bahwa masyarakat berhak atas: lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan, pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, upaya pemberdayaan masyarakat serta penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.

Atas semua kondisi yang sudah dijabarkan dalam regulasi tersebut, seyogyanya sudah tidak ada lagi ruang yang tersisa bagi kegiatan perusakan hutan dan lingkungan di Indonesia. Namun di atas itu semua, prasyarat fundamental yang dibutuhkan adalah adanya kemauan dan keinginan dari pemerintah untuk menjunjung tinggi peraturan di atas segalanya, demi tercapainya tujuan Indonesia yang asri dan lestari, berkelanjutan baik untuk generasi masa kini maupun mendatang.



Joko Tri Haryanto

Pegawai di Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI

Opini Ryutaro Siburian

RPJMD DAN TOLOK UKUR KANDIDAT PETAHANA

Hiruk-pikuk Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada Juni 2018 sudah terasa nuansa panasnya. Hal ini lumrah terjadi mengingat terdapat 17 Gubernur, 115 Bupati, dan 39 Walikota yang akan memperebutkan kursi di daerah masing-masing, termasuk kandidat petahana.

Tidak jarang, beberapa kandidat petahana justru menjadi kandidat kuat untuk terpilih kembali. Ada yang

memang prestasinya bagus atau politik dinasti yang sudah menyeluruh hingga ke akar. Tapi yang pasti, seluruh petahana yang maju dalam Pilkada tahun 2018 diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pembuktian janji-janjinya pada masa kampanye dalam bentuk program pembangunan.

Memilih pemimpin yang Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan Pilkada yang berkualitas, yakni terciptanya kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas serta memenuhi unsur akseptabilitas, pemerintah melalui KPU sebaiknya perlu melakukan uji publik terhadap seluruh bakal calon, termasuk calon petahana. Bagaimana caranya? Yakni bisa dengan

cara evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD dilaksanakan akan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, se-

hingga pada saat pelaksanaan tahapan Pilkada, telah tersedia data pencapaian RPJMD minimal untuk 3 (tiga) tahun. Hasil evaluasi ini sudah selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk menguji kelayakan seorang petahana dipilih kembali atau tidak, sekaligus bisa digunakan sebagai pengetahuan bakal calon lainnya terhadap kondisi terkini atas suatu daerah.

Melalui hasil evaluasi RPJMD, maka akan diketahui target-target yang tercapai dan yang tidak tercapai oleh sang petahana. Dalam RPJMD tersebut telah tersedia indikator-indikator, sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang diamanatkan peraturan perundangan, baik dari aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Pada aspek kesejahteraan, terdapat data yang menunjukkan angka kemiskinan, angka rata-rata lama sekolah, persentase balita gizi buruk, skor Indeks Pembangunan Manusia, dan lain-lain. Dari aspek pelayanan umum, antara lain rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, angka kematian bayi, panjang jalan dalam kondisi baik, penanganan sampah perkotaan, jumlah kelompok PKK aktif, jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera, dan lain-lain. Sedangkan dari aspek daya saing antara lain persentase desa/kelurahan swasembada, angka kriminalitas, lama proses perijinan, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk pembelajaran para kandidat.

Cukup dengan melihat angka pada tahun awal masa jabatan, lalu dibandingkan dengan target dan realisasi pada tahun dilaksanakannya Pilkada, maka seorang petahana sudah dapat dinilai *track record*-nya. Seperti yang disampaikan Walikota Surabaya beberapa waktu yang lalu di media massa, seorang petahana memiliki waktu 5 tahun untuk berkampanye, maka seharusnya hasil evaluasi RPJMD menjadi salah satu tolok ukur yang harus diketahui oleh seluruh rakyat. Sedangkan bagi bakal calon yang baru, hasil evaluasi ini dijadikan sebagai pembanding, apakah permasalahan daerah yang menjadi fokus perhatian atau solusi yang ditawarkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi ini, setiap orang bisa mengukur, apakah dirinya telah hidup semakin baik dalam kurun waktu 5 tahun ini, kemudian apa yang dia harapkan 5 tahun ke depan. Dengan

demikian, masing-masing pemilih dapat menentukan pilihan kepada petahana atau kepada yang lain, mampu mengesampingkan "citra" para bakal calon, dan tidak menyesal di kemudian hari.

Hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah. Di samping melaksanakan tugas utama untuk mengurus rakyat dari bangun tidur sampai tidur lagi, sejak dari dalam kandungan hingga disemayamkan dalam kuburan, pemberian kewenangan kepada daerah otonom juga untuk "mempercepat" terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Pengawasan akan menjamin keserasian dan keharmonisan antara tindakan pemerintah pusat dengan tindakan pemerintah daerah, sehingga peluang bagi kreasi dan inovasi pemerintah lokal, mampu meringankan beban pemerintah pusat. Berkaitan dengan itu, capaian sasaran pembangunan daerah yang mendukung sasaran pembangunan nasional pada masing-masing aspek, seperti kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD yang semakin meningkat, jumlah investor/nilai investasi PMA/PMDN, indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pertumbuhan penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan fokus penilaian lain sesuai kebutuhan, yang juga terdapat dalam RPJMD, dapat dijadikan sebagai bahan untuk menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan.

Oleh karena itu, sudah saatnya masyarakat kita disuguhkan dengan data dan fakta, bukan sekadar kemampuan mengolah kata, apalagi pencitraan. Pilkada yang berkualitas ditentukan kapasitas rakyat yang memberikan suara. Selanjutnya, efektivitas pembangunan daerah dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan otonomi daerah, hanya terwujud jika Pilkada melahirkan pemimpin yang mampu menjadi lokomotif pembangunan.



Ryutaro Siburian,

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

BAGI-BAGI JATAH PASCA PILKADA

Pasca pilkada, hal yang wajib publik waspadai dan perlu pengamatan saksama adalah penyusunan dan pembahasan rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Pasalnya, RAPBD acap kali digunakan kepala daerah terpilih dan anggota dewan untuk kongkalikong mengakali peruntukannya. Anggaran dibelokkan dari kepentingan rakyat menjadi kepentingan pribadi atau pun kelompok.

Rakyat yang jadi konstituen pada saat kontestasi, pasca pilkada hanya menjadi penonton dari pelaksanaan anggaran daerah. Momen pilkada hanya menjadi kepentingan sesaat bagi calon kepala daerah. Rakyat yang sejatinya adalah ujung tombak, kini hanya disisakan janji palsu oleh kepala daerah terpilih. Hal ini adalah korupsi politik yang diwujudkan dalam APBD yang kental aroma balas budi dan bagi-bagi jatah untuk tim sukses.

Penyusunan dan pembahasan APBD rawan terjadi penyimpangan. Di DPRD sendiri, pembahasan APBD menjadi ruang bagi-bagi jatah proyek di kalangan anggota dewan. Sementara itu, bagi kepala daerah, pembahasan APBD bisa menjadi ajang balas budi terhadap para penyandang dana dan suara yang mendukungnya semasa kampanye. Yakni, dengan memilih mereka sebagai pelaksana proyek yang diadakan pemerintah daerah atau memberikan dana hibah dan bantuan sosial lainnya.

Bahkan, yang lebih ekstrem lagi adalah APBD acap menjadi ajang bancakan antara kepala daerah dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti kepala dinas, anggota dewan, dan beberapa pengusaha. Tiga unsur itu seolah menjadi segitiga kongkalikong. Tidak jarang pula unsur-unsur lain seperti swasta menjadi pelengkap. Modusnya bermacam-macam mulai dari setoran rutin, pembahasan aturan daerah, bahkan hingga urusan promosi jabatan. Semuanya butuh uang pelicin agar urusan mulus.

Contoh gamblang terlihat pada penyusunan dan pembahasan APBD DKI Jakarta 2018. Pasca pilkada 2017, proses penyusunan dan pembahasan APBD yang kerap alot dan kisruh karena perdebatan sengit antara kepala daerah dan DPRD kini berubah menjadi *adem ayem*. Dulu, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama selalu ribut dengan DPRD karena tidak sepakat dengan rancangan APBD. Pasalnya, menurut gubernur, DPRD kerap mengada-ada dalam memasukkan

program dan kegiatan dalam RAPBD. Bahkan, dengan bahasa sarkastis gubernur mengatakan banyak anggaran siluman yang disusupkan oleh oknum SKPD maupun anggota dewan ke dalam APBD.

Kalau sekarang, gubernur dan DPRD tampak akur. Malah, saking akrabnya, beberapa alokasi anggaran yang tidak langsung bersentuhan dengan rakyat dapat lolos lenggang kangkung disahkan dalam rapat paripurna penetapan APBD 2018. Tidak tanggung-tanggung, Rp 1,7 triliun digelontorkan gubernur sebagai dana hibah buat ormas, LSM, yayasan, lembaga pendidikan rohani baik formil maupun non formil. Dalam situs apbd.jakarta.go.id tertera 104 organisasi yang akan mendapat dana hibah.

Lembaga yang cukup banyak mendapatkan dana hibah adalah majelis *ta'lim*, masjid, dan mushola. Dana hibah untuk lembaga itu tersebar di beberapa wilayah Jakarta. Dana hibah untuk majelis *ta'lim* sekira Rp 20 juta sampai Rp 25 juta. Tidak heran, sebab sang gubernur terpilih memang didukung banyak ormas keagamaan dan pada saat kampanye telah berjanji memberikan sejumlah bantuan.

Hal lain yang ditengarai sebagai bagi-bagi jatah adalah bantuan parpol. Gubernur terpilih menganggarkan bantuan kepada parpol sebesar Rp 4.000. Padahal, mengikut ketentuan dari pemerintah pusat yang termaktub dalam Permendagri No 6 Tahun 2017 bantuan untuk parpol hanya Rp 1.000 per suara.

Daftar politik balas budi itu masih bisa diperpanjang dengan memberi contoh membengkaknya usulan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Tim itu diberi anggaran Rp 28 miliar untuk 73 orang anggota, Banyaknya anggota tim gubernur dikhawatirkan akan menimbulkan disharmoni. Disharmoni itu bisa terjadi antara anggota TGUPP dengan SKPD maupun dengan deputi gubernur.

Untuk itu, publik harus mengawal ketat anggaran daerah agar tidak menjadi bancakan para elit dan tim suksesnya. Sebab, sudah jelas bahwa kepala daerah terpilih pasti akan melakukan pembayaran uang dan politik kebijakan kepada pendukungnya setahun hingga lima tahun setelah dia berhasil terpilih. Oleh karenanya, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan perlu memberikan perhatian khusus terhadap pos-pos APBD pada tahun pertama setelah pilkada dan selanjutnya.

● Moh Ilham A Hamudy



Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal baru di bawah naungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, yang fokus pada publikasi hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah. MP terbit sebanyak tiga kali setahun (Maret, Juli, dan November).

MP memuat naskah hasil penelitian terkait pelbagai inovasi kebijakan. Oleh karenanya, kami mengundang para peneliti, dosen, mahasiswa, dan para pemerhati inovasi untuk mengirimkan naskah hasil penelitiannya agar dapat dimuat di Matra Pembaruan.



Naskah merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dipublikasikan dan tidak memuat unsur plagiat.

Naskah yang dikirimkan berupa resume hasil penelitian, bagian dari skripsi, tesis, atau disertasi yang telah mengalami penyesuaian untuk standar jurnal ilmiah. Artikel mengandung unsur temuan baru, yang merespon isu-isu dan wacana kontemporer terkait inovasi kebijakan dalam berbagai perspektif.

Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris sebanyak 38.000 s.d 40.000 karakter (tanpa spasi) sudah termasuk referensi, daftar pustaka, dan tabel (jika ada). Naskah dalam Bahasa Indonesia disertai abstrak Bahasa Inggris, dan sebaliknya.

Sumber referensi minimal 10 buah dan 50% di antaranya harus berasal dari sumber primer, seperti: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan/atau disertasi.



Sistematika penulisan terdiri dari empat pembabakan: Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, dan Kesimpulan. Sedangkan gaya penulisan referensi dan kutipan MP menggunakan gaya APA (*American Psychological Association style*).

Lampirkan biodata ringkas dan nomor telepon seluler penulis.



Submit artikel Anda ke matrapembaruan.com



Informasi lebih lanjut di redaksi@matrapembaruan.com
Moh. Ilham A Hamudy
0821 1139 3927



Jurnal Matra Pembaruan Diterbitkan Oleh:
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri



MATRA PEMBARUAN
Jurnal Inovasi Kebijakan

CALL FOR PAPERS



CALL FOR PAPERS

JURNAL BINA PRAJA



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

THEME

“Home Affairs Governance”

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

INDEXED BY:

Accredited No 735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016



TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38000-40000 character in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact number.

Submit a scientific paper
on the theme of Home Affairs Governance to binaprajajournal.com
More information at
editorial@binaprajajournal.com | 0821 1139 3927 (Ilham)